

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## MASA DEPAN KELABU REZIM BARU

Bagaimana  
Mengadili  
Penguasa  
Zalim?

-0,03

-0,08

-0,03

Kerapuhan  
Ekonomi Global  
dan Domestik



H. M. Ismail Yusanto:  
**PENTING MEWUJUDKAN  
Pemerintahan Islam**

# SEJARAH GAZA

## Mengenang 1 Tahun Genosida GAZA

Serangan yang dilancarkan Israel terhadap Gaza berubah menjadi genosida skala besar sejak hari pertama. Selama periode satu tahun ini, penjajah menyerang warga Palestina yang tidak bersalah dengan segala kesempatan yang mereka miliki. Sementara ribuan umat Islam menjadi martir, ratusan ribu orang harus pindah. Faktanya, peristiwa tersebut memiliki latar belakang sejarah yang serius.

### Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/gazze-olaylarinin-tarihi-arka-plani>

### Kongres Zionisme Pertama 1897

• Kongres Zionisme Pertama diadakan di Basel, Swiss. Jurnalis Theodor Herzl menerbitkan buku berjudul "Der Judenstaat" yang berarti Negara Yahudi. Ide-ide dalam buku tersebut dibahas pada kongres ini. Alasan utama mengapa penulis buku ini membawa ide-ide ini ke dalam agenda adalah meningkatnya gerakan anti-Semit di Eropa.

• Herzl adalah seorang Yahudi yang tinggal di Wina dan mengajukan agar orang Yahudi mendirikan negara mereka sendiri. Pada Kongres Zionisme, tesis "Negara Yahudi" dibahas dan dibahas secara menyeluruh dan akhirnya sebuah dokumen diterbitkan.



• Nama dokumen yang diterbitkan adalah "Program Basel" dan dinyatakan: Pembentukan tanah air Yahudi di Palestina dan aktivasi Organisasi Zionisme Dunia untuk mencapai tujuan ini. Saat itu tahun 1897.

• Landasan pendudukan Palestina diletakkan pada hari itu, pada kongres tersebut. Apa yang dideklarasikan dengan dokumen yang diumumkan tersebut adalah untuk membuat para pemukim Yahudi, beserta gerakan migrasi mereka, tampak tidak bersalah.

• Ratusan ribu orang Yahudi bermigrasi ke Palestina, yang berada di bawah mandat Inggris, dalam lingkup proyek Zionis. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam.

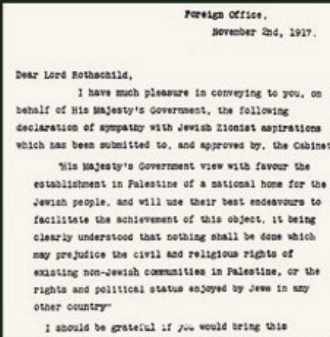
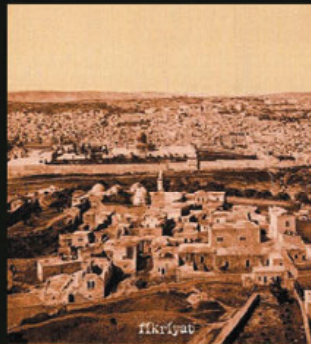
• Sensus yang diselenggarakan Inggris pada tahun 1922 menunjukkan jumlah orang Yahudi mencapai 11 persen dari 750 ribu penduduk Palestina. 300 ribu orang Yahudi lainnya akan tiba dalam 15 tahun mendatang. Konflik juga dimulai pada tahun-tahun ini.

• Pada bulan Juli 1937, Komisi Kerajaan di Inggris, yang diketuai oleh Lord Peel, mantan menteri luar negeri yang bertanggung jawab atas India, mengusulkan pembagian wilayah ini menjadi dua antara negara Yahudi dan Arab. Negara Yahudi akan menduduki sepertiga wilayah Palestina yang diamankan Inggris dan mencakup Laut Galilea dan dataran pantai.

• Pada masa Perang Dunia Pertama, Palestina dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Situasi ini berlanjut hingga kekuatan lokal yang didukung Inggris mengakhiri dominasi Turki Utsmani. Inggris menduduki wilayah tersebut pada tahun 1918.

• Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour berjanji untuk mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Janji itu tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada Lord Rothschild, salah satu pemimpin Zionis.

• Surat ini dikenal dengan nama Deklarasi Balfour. Dengan keputusan Liga Bangsa-Bangsa yang diambil pada tanggal 25 April 1920, Inggris diberi wewenang untuk mengurus mandat wilayah tersebut



• Inggris, yang telah memerintah Palestina sejak tahun 1920, menyerahkan tanggung jawab penyelesaian masalah Palestina kepada PBB pada tahun 1947. Proyek pendirian tanah air bagi umat Yahudi dilaksanakan selangkah demi selangkah dengan mengabaikan bahkan menghancurkan umat Islam.

• Komite khusus yang dibentuk PBB mengusulkan pembagian wilayah antara Palestina dan negara-negara Arab. Meskipun

perwakilan Palestina, yang dikenal sebagai Komite Tinggi Arab, menolak tawaran tersebut, perwakilan Yahudi menerimanya.

• Rencana pembagian tersebut menyisakan 56,47 persen wilayah Palestina menjadi milik negara Yahudi dan 43,53 persen menjadi milik negara Arab. Yerusalem akan berada di bawah administrasi internasional.

# Daftar Isi

## Hiwar: Penting Mewujudkan Pemerintahan Islam

46

Sejak awal sudah sering ditegaskan bahwa penting dan wajib menegakkan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islam. Sebabnya jelas. *Selain* kewajiban syariah, tentu penerapan syariah Islam adalah solusi atas segenap problem kompleks yang terus-menerus menggelayuti umat manusia hari ini, khususnya di negeri ini. Itulah di antara yang disampaikan oleh **Ustadz H. M. Ismail Yusanto** dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

## Iqtishadiyah: Kerapuhan Ekonomi Global dan Domestik

18

Kondisi ekonomi global dan domestik hari ini sesungguhnya tidak sedang baik-baik saja. Hal ini pun terjadi di sejumlah negara maju, khususnya AS, Eropa dan Cina. Di dalam negeri, dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi juga tak kunjung membaik. Dalam 5 bulan terakhir bahkan terjadi deflasi karena daya beli masyarakat makin rendah.

## Siyasah-Dakwah: Bagaimana Mengadili Penguasa Zalim?

26

Pada dasarnya, di dalam Islam, semua pihak, baik rakyat biasa atau pejabat dan penguasa, berkedudukan sama di depan hukum. Jika penguasa melakukan ragam kezaliman terhadap rakyatnya, bagaimana mekanisme untuk mengadili mereka sesuai dengan tuntunan ajaran dan hukum Islam? Inilah yang dibahas dalam rubrik *Soal-Jawab* kali ini.

<i>Pengantar</i> .....	2
<i>Dari Redaksi:</i> Setahun Genosida Palestina .. .	3
<i>Opini</i> .....	5
<i>Muhasabah:</i> Pemimpin Terburuk .....	7
<i>Fokus:</i> Masa Depan Suram Pemerintahan Baru ..	9
<i>Analisis:</i> Solusi Islam Menyelesaikan Problematika Bangsa .....	14
<i>Iqtishadiyah:</i> Kerapuhan Ekonomi Global dan Domestik .....	18
<i>Soal Jawab:</i> Bagaimana Mengadili Penguasa Zalim? .....	22
<i>Siyasah Dakwah:</i> Transisi Kekuasaan Dalam Islam .....	26
<i>Ibrah:</i> Semangat Dakwah .....	30
<i>Nafsiyah:</i> Meniti Jejak Rasulullah saw Sebagai Negarawan .....	32
<i>Fikih:</i> Seputar Doa Untuk Kehancuran Yahudi ..	35
<i>Atsar :</i> Langkah Yang Menyelamatkan Umat Manusia 134 Tahun Lalu: Vaksin Rabies .. .	38
<i>Lintas Dunia</i> .....	40

<i>Baiti Jannati:</i> Menanamkan Kebanggaan Sebagai Muslim Pada Anak .....	42
<i>Hiwar:</i> H. M. Ismail Yusanto:Penting Mewujudkan Pemerintahan Islam .....	46
<i>Catatan Dakwah:</i> 'Pemimpin Visioner' .....	51
<i>Nisa:</i> Perlindungan Perempuan Di Bawah Rezim Baru .....	54
<i>Tafsir:</i> Malaikat Pencatat Amal Manusia .....	57
<i>Afkar:</i> Pentingnya Kesadaran Politik Umat, ..	62
<i>Telaah Kitab:</i> Kebijakan Pendidikan Di Negara Khilafah (Telaah Kitab Muqaddimah ad- Dustuur Pasal 170) .....	66
<i>Takrifat:</i> <i>Al-Muthlaq</i> Dan <i>Al-Muqayyad</i> .. .	70
<i>Hadis Pilihan:</i> Penimbunan Yang Haram .....	74
<i>Dunia Islam:</i> Di Balik Pembunuhan Hassan Nasrallah .....	76
<i>Tarikh:</i> Pembukaan Dayeuh Pakuan Untuk Islam (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480-1680)(Bagian Kesepuluh) .....	79

*Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

# Pengantar

Pembaca yang budiman, banyak kalangan di negeri ini, terutama tentu saja rakyat Indonesia secara keseluruhan, kembali berharap pada rezim baru. Kali ini di bawah Presiden Prabowo Subianto. Harapan mereka pastinya sangat besar. Pasalnya, selama 10 tahun rezim Jokowi, rakyat Indonesia benar-benar dibuat sengsara dan menderita. Mereka kecewa berat. Tak ada tanda-tanda mereka bahagia, kecuali tentu para *buzzer*, tukang survei yang dibayar penguasa, juga pendukung rezim yang setia dan membabi-but. Aneh saja jika selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, berdasarkan survei 'abal-abal', kepuasan masyarakat terhadap rezim Jokowi menjelang lengser tetap tinggi. Di atas 75%.

Padahal fakta di lapangan begitu jelas: Selama 5 bulan terakhir terjadi deflasi. Penurunan harga-harga. Ini menunjukkan daya beli masyarakat makin menurun. PHK terjadi di mana-mana. Otomatis angka pengangguran makin meningkat. Artinya, lapangan kerja makin sulit. Pajak makin menjerat. Utang luar negeri makin tinggi. Jumlah kelas menengah makin berkurang. Angka kemiskinan makin membesar. Penguasaan sumberdaya alam oleh asing dan aseng makin ugali-ugali. Oligarki makin mencengkeram. Kriminalitas makin meningkat. Korban pinjol dan judol makin banyak. Termasuk sejumlah problem sosial lainnya.

Karena itu, sekali lagi, harapan rakyat akan perubahan yang lebih baik yang diletakkan pada pundak rezim baru begitu besar. Pertanyaannya: Di tengah beban warisan rezim lama yang amat berat dan kompleks, mampukah rezim baru memenuhi harapan rakyat? Bagaimana caranya? Akankah dengan sistem kapitalisme-demokrasi-sekuler—yang juga digunakan rezim lama dan rezim-rezim sebelumnya—rezim baru bisa berhasil melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Ataukah rezim baru akan mengulangi kegagalan yang sama sebagaimana rezim-rezim sebelumnya?

Jawabannya tampaknya tak akan menggembirakan. Bisa dipastikan, jika rezim baru tetap mempertahankan sistem status quo, mereka akan gagal. Masa depan bangsa dan negeri ini pun pasti kelabu. Satu-satunya cara agar mereka berhasil sehingga bangsa dan negeri ini bisa menatap masa depan yang gemilang adalah kembali pada ideologi Islam. Kembali pada aqidah dan syariah Islam.

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi  
Politik Dan Dakwah  
Islam **Alamat :** Gedung  
Graha Mampang Lt-1 -  
Suite 101. Jl.  
Mampang Prapatan  
Raya Kav. 100, Jakarta  
Selatan  
e-mail: redaksialwaie  
@gmail.com **Pemimpin**  
Umum: M. Anwari.  
**Pemimpin Perusahaan**  
dan Keuangan: M.  
Anwari **Pemimpin**  
Redaksi: Ibnu Faruq.  
**Redaktur Pelaksana:**  
M. Arief Billah.  
**Redaktur:** Abu Umam,  
Yahya Abdurrahman.  
Layout: reeun.  
**Pemasaran:** Tedi  
**Harga:** Rp. 10.000,- (P.  
Jawa) dan Rp.  
14.000,- (Luar P.  
Jawa).



## SETAHUN GENOSIDA PALESTINA

Sejak Oktober 2023, genosida terhadap rakyat Gaza Palestina terus berlangsung. Seolah tidak ada yang bisa menghentikan. Korban dalam jumlah besar pun berjatuhan. Laporan *Anadolu Agency*, mengutip Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza, menyatakan bahwa 79% dari 1.245 masjid di Gaza dihancurkan. Sebanyak 19 dari 60 kuburan menjadi sasaran. Jenazah digali dan dinodai. Laporan dari sumber lain menyatakan zionis Yahudi telah membunuh lebih dari 41.000 warga Palestina. Sebanyak 10.000 orang hilang dan belum ditemukan. Namun, diduga mereka sudah tak bernyawa di bawah reruntuhan. Diperkirakan secara total lebih dari 100.000 rakyat Palestina menjadi syuhada.

Genosida ini bukanlah baru setahun. Pembantaian ini sudah terjadi bahkan sebelum entitas penjajah Yahudi berdiri pada tahun 1948, dengan mengatasnamakan negara Israel. Israel adalah negara palsu. Dia lahir dari rahim kolonialisme yang dibidani Inggris. Dia lalu dijaga dan dipelihara dengan harga mati oleh Amerika Serikat dan sekutu Baratnya. Pada periode 1947 hingga 1949, setidaknya 750 ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka. Pasukan Zionis mengambil 78 persen wilayah Palestina. Mereka menghancurkan sekitar 530 kota dan desa di sana. Mereka sekaligus membunuh sekitar 15 ribu warga Palestina. Pembunuhan dan penghancuran oleh Yahudi terus berlangsung hingga kini.

Satu tahun Genosida terhadap Gaza

mengungkap banyak hal penting. Yang utama, tentang keteguhan dan kesabaran rakyat Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Meskipun ujian berat diderita, rakyat Gaza telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah SWT. Keikhlasan saat diuji dengan musibah tampak dari wajah-wajah para ibu yang ditinggalkan oleh anak dan suaminya. Kesabaran yang muncul dari kesadaran perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Semua itu akan dibalas surga oleh Allah SWT. Ujian ini juga tidak membuat rakyat Palestina surut dari perjuangan. Mereka tetap gigih melakukan perlawanan meskipun para penguasa Arab hanya diam tidak membantu mereka.

Setahun genosida Gaza juga mengungkap kegagalan sistem politik internasional yang dibuat oleh Barat serta yang dipimpin dan dikendalikan oleh mereka. Semua institusi internasional ala Barat yang dibanggakan akan bisa menciptakan perdamaian internasional gagal total saat menghadapi kekejian entitas penjajah Yahudi. Semuanya menjadi mandul tak bertaji. Ini semakin membuktikan bahwa institusi internasional ini hanya alat Barat untuk mengendalikan dunia demi kepentingan mereka. Karena itu sungguh bodoh para penguasa negeri Islam yang masih berharap pada PBB untuk menyelesaikan masalah ini.

Setahun Genosida ini semakin menunjukkan bahwa Amerika, Inggris dan sekutu Baratnya—yang secara loyal, irrasional, tidak peduli kemanusiaan dan terus mendukung entitas Yahudi ini—adalah musuh umat Islam. Mereka masuk



dalam katagori *muhaarib[an] fi'[an]* (kaum kafir yang nyata-nyata memerangi umat Islam).

Entitas penjajah Yahudi ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan politik, ekonomi dan militer dari Amerika Serikat dan sekutunya. Lebih dari 22,76 miliar dolar (sekitar Rp 357 triliun) telah digelontorkan Amerika untuk mendukung genosida yang dilakukan Yahudi ini. Termasuk operasi di Yaman. Dari laporan Brown University's Watson Institute, bantuan militer AS yang ditujukan untuk Israel sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023 yakni mencapai 17,9 miliar dolar AS (sekitar Rp 281 triliun). Berdasarkan laporan tersebut, angka itu adalah total bantuan tahunan tertinggi AS untuk Israel yang pernah diberikan. Sebagaimana dilansir dari *Al-Jazeera*, Senin (7/10/2024), bantuan untuk Israel merupakan gabungan dari pembiayaan militer, penjualan senjata, dan transfer dari persediaan senjata AS. Sebagian besar persenjataan yang dikirim AS adalah amunisi, termasuk peluru artileri dan bom seberat 2.000 pon atau 907 kg.

Semua ini sudah seharusnya memperjelas sikap kaum Muslim terhadap Amerika Serikat sebagai negara musuh. Siapapun yang berharap dan bergantung pada negara musuh ini adalah pengkhianat umat Islam.

Meskipun pengkhianatan penguasa Arab sudah jelas tampak sejak lama, bahkan saat entitas penjajah Yahudi didirikan pada tahun 1948, genosida satu tahun ini semakin mengungkap secara nyata pengkhianatan yang menjijikkan ini. Hampir seluruh penguasa negeri Islam, terutama negara-negara Arab, tidak sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang menghentikan pembantaian Yahudi ini. Sikap simpati palsu, membanggakan bantuan kemanusiaan, solusi dua negara, berhenti pada kecaman, menjadi bukti pengkhianatan ini. Jelas, sikap mereka tidak menyentuh persoalan mendasar masalah Palestina, yaitu keberadaan penjajah Yahudi. Sikap mereka malah mengokohkan keberadaan entitas penjajah ini dengan solusi dua negara, bergantung pada PBB. Walaupun ada serangan dari Iran, itu bukanlah serangan yang serius untuk mengenyahkan

penjajah Yahudi ini. Semuanya merupakan serangan terukur untuk menyelamatkan muka. Terukur dalam kendali Amerika sampai pada titik yang bukan untuk menghancurkan keberadaan Zionis Yahudi ini. Bisa disebut merekalah sebagai '*iron dome*' sejati, yang paling kuat melindungi entitas penjajah Yahudi ini.

Terakhir, setahun genosida ini semakin mengokohkan kebutuhan persatuan umat pada level global. Tentu untuk memiliki kekuatan yang seimbang menghadapi entitas penjajah Yahudi yang juga didukung secara global oleh Amerika dan sekutunya Baratnya. Selain itu, perlu adanya panglima perang di tengah-tengah umat Islam untuk menggerakkan angkatan bersenjata mereka, dengan meninggalkan penguasa mereka yang berkhianat. Kebutuhan persatuan umat Islam ini sangat mendesak. Persatuan sejati ini akan membentuk kekuatan negara adidaya yang merepresentasikan kekuatan umat Islam secara global. Semua itu hanya akan terwujud dengan tegaknya kembali Khilafah '*alaa minhaaj annubuwwah* di tengah-tengah umat Islam.

Juga penting bagi para panglima perang di negeri-negeri Islam, terutama negeri Arab untuk memenuhi seruan dan panggilan tulus dari Hizbut Tahrir Irak yang dalam pernyataan persnya (7/10/2024) menyerukan: "*Wahai bala tentara kaum Muslim. Wahai keturunan Khalid, Abu Ubaidah dan Al-Qaqa. Telah tiba saatnya bagi kalian untuk kembali sadar, memohon ampunan kepada Tuhan kalian dan menebus dosa karena telah duduk diam sehingga kalian dapat mulai menghancurkan singgasana-singgasana yang busuk ini dengan mendukung Hizbut Tahrir, pelopor yang tidak berbohong kepada rakyatnya, untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Khilafah Rasyidah di atas manhaj kenabian, dan menyatakan jihad terhadap setiap orang yang berani menyerang kaum Muslim. Kalian layak untuk itu. Kalian memiliki perlengkapan dan jumlah. Terutama kalian memiliki aqidah yang tidak menghalangi kesulitan apa pun.*"

*Allaahu Akbar!* [Farid Wadji]

# Opini

Pembaca

## Hentikan Ekspor Pasir Laut!

**M. Nur Rakhmad**  
(Justice Monitor)

Keputusan Pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah peraturan terkait penambahan sedimen, kemudian disusul dengan peraturan tentang ekspor sedimen dan

pasir laut, merupakan kebijakan yang sangat ekstrim. Kebijakan ini ekstrem karena telah menganulir sejumlah kebijakan yang melarang penambangan pasir dan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama 20 tahun.

PP 26 tahun 2023 dan turunannya dinilai sebagian pihak telah mengkerdikan aturan-aturan sebelumnya di era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menangani dan menghentikan penambangan dan ekspor pasir laut yang merusak lingkungan secara masif dan menimbulkan kerugian ekonomi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati mengeluarkan Inpres No. 2 tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.

Publik patut bertanya: Apa latar yang mendasari keputusan Pemerintah mengeluarkan kebijakan penambangan sedimen hingga berniat menjualnya ke luar negeri. Selama 20 tahun, larangan penambangan dan penjualan pasir laut keluar negeri tentu dengan alasan yang sangat kuat, yakni melindungi kepentingan wilayah dan rakyat Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil menghadapi dua tekanan yang besar: *Pertama*, tekanan oleh dampak krisis iklim. Kedua, tekanan oleh kebijakan yang melahirkan proyek-proyek yang merusak ekosistem pesisir dan laut seperti penambangan pasir dan reklamasi.

Ini berpotensi mengundang ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat di sekitar. Terdapat ribuan desa dan kelurahan tepi laut yang notabene kehidupannya dipengaruhi oleh sumberdaya pesisir laut yang sehat.

Belum puas melakukan penambangan di pulau kecil, kini pesisir dan laut juga akan ditambang untuk dijual di dalam dan keluar negeri. Ini ironis di tengah banyaknya jargon visi maritim dan negara maritim dikumandangkan selama satu dekade ini.

Ekspor pasir laut merupakan praktik eksploitasi yang menimbulkan ketidakberlanjutan dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Tolak! □



## Kabinet & Koalisi Gendut, Salahkah?

**Ummu Hasyim**  
(Ibu Rumah Tangga)

**W**acana pembentukan koalisi besar pemerintahan Prabowo-Gibran minim oposisi dikhawatirkan bakal mengulang pemerintahan Jokowi yang otoriter dan tanpa kendali. Ini juga

menunjukkan sikap ketakutan. Jika mayoritas partai bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, artinya mereka ramai-ramai akan menikmati kekuasaan. Pemerintahan yang mengakomodasi seluruh parpol tanpa “oposisi” dinilai merupakan tanda berakhirnya era keterbukaan dan kebebasan kritik.

Pemerintahan yang ditopang oleh mayoritas anggota DPR akan membuat segala rencana kebijakan Pemerintah berjalan mulus. Tidak ada mekanisme *checks and balances*. Ini karena hampir semua parpol di Parlemen menjadi bagian dari Pemerintah.

Jika memang demikian, sangat penting kelompok masyarakat rakyat arus bawah akan mengambil peran oposisi. Tentu guna mengoreksi kebijakan pemerintahan. Publik tentu tidak ingin adagium guru besar sejarah modern Universitas Cambridge, Inggris, Lord Acton, yang disampaikan pada abad ke-19, menjadi nyata, yakni, *‘power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’*; atau kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.

Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula sehingga perlu adanya pengoreksi atau ruang kritik dan nasehat. Selain itu rezim pemerintahan baru pun dipastikan akan bernasib sama. Apalagi rezim pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo bakal mewarisi beban sangat berat dan segudang persoalan yang ditinggalkan rezim Jokowi. Khususnya di bidang ekonomi. Di antaranya angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran dan PHK yang makin meningkat, pajak yang makin besar, daya beli masyarakat yang makin menurun, jumlah kelas menengah yang makin berkurang, beban pembayaran utang negara yang makin berat, penguasaan sumberdaya alam milik rakyat oleh segelintir orang (asing dan aseng) yang makin tak terkendali, beban ekonomi masyarakat yang makin besar, dsb.

Di sisi lain, kekuasaan oligarki makin mencengkeram. Ini terlihat jelas dalam struktur politik dan ekonomi di mana sejumlah kecil konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis, seperti sumberdaya alam (pertambangan, perkebunan), infrastruktur dan perbankan.

Para oligarki ini juga sering memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik. Ini memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan ulama dan kelompok dakwah. □



## PEMIMPIN TERBURUK

Muhammad Rahmat Kurnia

"A" mirul Mukminin, anak paduka itu lebih layak untuk menerima jabatan khalifah ini. Jadikan sajalah ia menjadi khalifah. Kami akan menerimanya." Begitu kata sebagian kaum Muslim kepada Khalifah Umar bin al-Khatthab. Suatu tawaran tulus dari sebagian Sahabat Rasulullah saw. Jauh dari sikap menjilat. Bukan karena Abdullah bin Umar semata anak sang Khalifah, melainkan juga beliau adalah salah seorang pemuda yang dalam ilmunya.

Kala itu ada tiga Abdullah sahabat muda Rasulullah yang terkenal ilmu dan adabnya: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar.

Abdullah bin Umar merupakan perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Ada sebanyak 2.630 hadis yang beliau riwayatkan. Beliau selalu mengikuti kemana Rasulullah saw. pergi. Aisyah ra. istri Rasulullah saw., pernah memuji dirinya dan berkata, "Tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya, seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar."

Berbagai peperangan pun beliau ikuti seperti Perang Khandaq, Perang Mu'tah, Fathu Makkah, Perang Yarmuk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Namun, sekalipun putranya layak sebagai khalifah, Umar bin al-Khatthab ra. menolak tawaran

itu. "Tidak ada kaum keturunan Al-Khatthab hendak mengambil jabatan khalifah ini untuk mereka. Abdullah tidak akan turut memperebutkan jabatan ini."

Beliau pun melirik ke putranya seraya berkata, "Anakku Abdullah, sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan engkau terbersit hendak mengambil jabatan ini!" Abdullah bin Umar pun menjawab dengan tegas, "Baik, Ayah."

Begitu kisah indah penuh tawadhu yang ditampakkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. dan putranya sebagaimana dinukil oleh Buya Hamka dalam bukunya, *Sejarah Umat Islam*.

"Rasanya jarang ya sikap seperti itu," ujar Ahmad. "Umumnya sekarang penguasa mendorong-dorong keluarganya menjadi pejabat. Ada yang mempromosikan anaknya menjadi anggota Dewan atau wakil kepala negara. Istrinya menjadi wali kota. Mantunya menjadi gubernur. Pamannya menjadi hakim MK, dan sebagainya," tambah anak muda itu.

"Rezim sekarang apa lagi. Membangun dinasti," Daffa menimpali.

Itu rupanya realitas yang dirasakan. Pada Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya digugat ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan dugaan melanggengkan nepotisme dan membangun dinasti politik di Indonesia. Penggugatnya adalah Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara. "TPDI

dan Perikat Nusantara melihat Nepotisme Dinasti Politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat, sehingga telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Koordinator Perikat Nusantara, Carrel Ticalu (12/1/2024).

Pada 20 September 2024, sekelompok mahasiswa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo atas berbagai dugaan kasus korupsi. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, menyampaikan, “Sepuluh tahun berkuasa, dia meninggalkan banyak luka di hati rakyat yang terzalimi.”

Pada 30 September 2024, Habib Rizieq Syihab, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara dan Munarman menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta

*Sebaik-baik imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian serta yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan kalian. Seburuk-buruk imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian serta yang kalian laknat dan mereka juga melaknat kalian...*

Selatan. Dalam gugatan ini dijelaskan bahwa sejak menjadi Cagub DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai Presiden, Jokowi dianggap telah melakulkan rangkaian kebohongan. “Sidang perdana G30S/Jokowi akan dimulai 8 Oktober. Apakah istana akan teror dan ancam para penggugat?” Alfian Tanjung berkomentar.

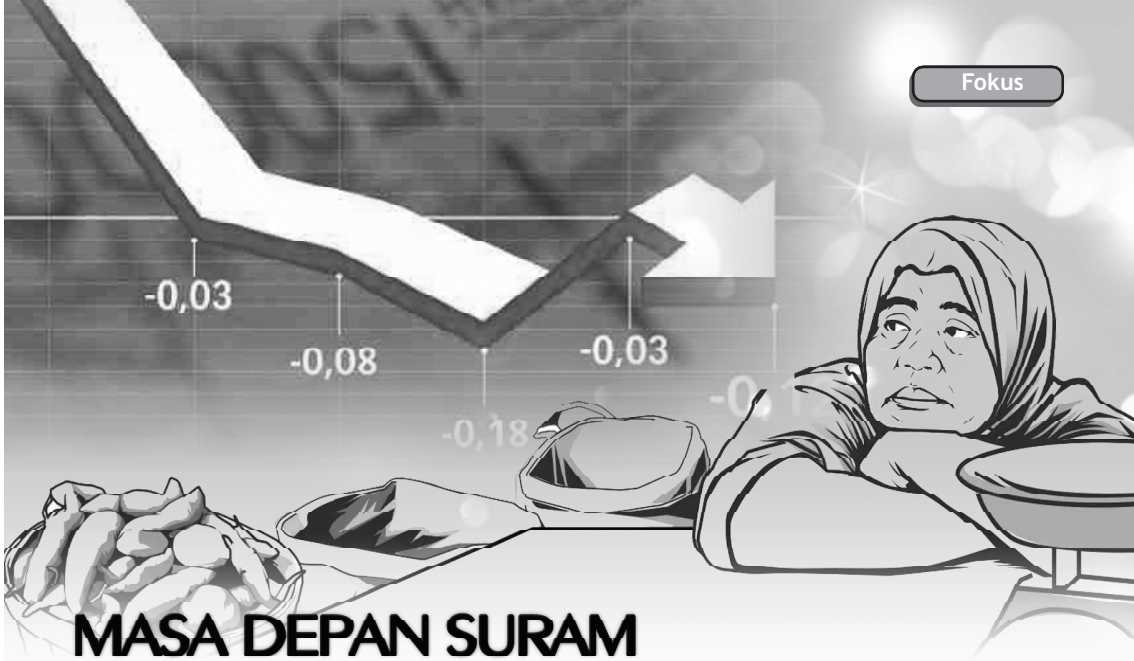
Dalam *Bang Edy Chanel* (4/10/2024), menantu Bung Hatta, Prof. Sri Edi Swasono mengatakan, “Sejak dua tahun lalu saya sudah katakan, Jokowi *common enemy*. Seharusnya sejak dulu rakyat bergerak untuk melengserkan dia.”

“Ribet. Bagaimana ya perasaan di akhir kekuasaan banyak masyarakat yang tidak menyukainya?” tanya Daffa secara retorik.

Saya jadi teringat pada hadis Rasulullah saw. saat beliau bersabda, “*Sebaik-baik imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian serta yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan kalian. Seburuk-buruk imam (pemimpin) kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian serta yang kalian laknat dan mereka juga melaknat kalian.*” Mereka berkata: Kami berkata, “Wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka pada saat demikian?” Rasul menjawab, “*Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ingatlah, siapa yang diperintah oleh seorang wali, lalu ia melihat wali itu melakukan sesuatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya ia membenci kemaksiatan itu dan janganlah ia melepaskan tangan dari ketaatan.*” (HR Muslim, Ahmad dan ad-Darimi).

Ternyata, pemimpin yang membenci rakyat dan karena itu ia dibenci oleh rakyatnya termasuk dalam katagori seburuk-buruk pemimpin. *Na’uudzu billaahi min dzaalik.*

*Wallaaahu a’lam. □*



# MASA DEPAN SURAM PEMERINTAHAN BARU

**Dr. Julian Sigit**

Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)

Setelah sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan tongkat estafet kepada pemerintahan baru yaitu Prabowo. Pemerintahan baru yang segera terbentuk di Indonesia menghadapi tantangan besar dari warisan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meninggalkan jejak mendalam di berbagai sektor.

## Ekonomi

Pemerintahan Prabowo Subianto akan menghadapi sejumlah tantangan berat dalam bidang ekonomi yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Berikut adalah beberapa fakta dan analisis dari sudut bidang ekonomi:

### 1. Pertumbuhan Ekonomi Menurun.

Pada tahun 2024, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 4,9%. Ini jauh lebih

rendah dari target yang diharapkan Prabowo sebesar 8%. Penurunan ekspor, penurunan harga komoditas, serta perlambatan ekonomi global menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia (*Resetdoc.org*).

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih rendah dari target (sekitar 4.9% pada 2024) dapat menekan penciptaan lapangan kerja baru, memperlambat kenaikan upah, dan mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat. Perlambatan ini juga akan berdampak pada investasi yang lebih rendah, terutama di sektor-sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan pertumbuhan yang lemah, potensi pengangguran meningkat. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan kemiskinan.<sup>1</sup>

Selain itu, keputusan hubungan kerja (PHK) juga masih mengancam berbagai industri. Data terbaru Kementerian

Ketenagakerjaan menampilkan terdapat 46.240 orang tenaga kerja terkena PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024 (*Bisnis.tempo.co*).

### 2. Daya Beli Masyarakat Menurun.

Kenaikan inflasi yang dipicu oleh peningkatan harga pangan dan energi telah berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia terancam melambat jika daya beli terus tergerus.<sup>2</sup>

Tingginya inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini paling berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki porsi pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pokok. Tekanan harga yang terus naik tanpa diimbangi dengan kenaikan upah yang signifikan akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang berujung dapat meningkatkan angka kemiskinan. Ditambah lagi dengan kebijakan kenaikan pajak penghasilan menjadi 12%. Ini tentu akan semakin menambah berat daya beli masyarakat.

### 3. Angka Kemiskinan Masih Tinggi.

Berdasarkan data, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang (*Setkab.go.id*). Jumlah itu mengacu pada kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 sebesar Rp 582.932 perkapita perbulan. Itu merupakan batas pengeluaran untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak (*Finance.detik.com*).

Ironi memang. Bagaimana tidak. Negeri yang begitu melimpah SDA, namun banyak rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan. Jika

kriteria kemiskinan itu dinaikan tidak sebesar Rp 582.932 perkapita perbulan atau sesuai dengan kriteria bank dunia sebesar US\$ 3 perhari, maka jumlah rakyat miskin naik menjadi 40% dari total penduduk Indonesia (*Cnbcindonesia.com*). Yang lebih menyedihkan lagi, kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan struktural dan sistemik.<sup>3</sup> Artinya, sebagian besar hal itu karena kebijakan yang kurang tepat.

### 4. Kondisi Moneter yang Ketat.

Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekan inflasi. Namun, kebijakan moneter yang ketat ini berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit dan investasi, terutama di sektor riil.<sup>4</sup> Hal ini juga dapat memperburuk kesulitan bagi UMKM dalam mengakses permodalan (*Eastasiaforum.org*).

Dengan kebijakan moneter yang berbasis ribawi dari Bank Indonesia melalui kenaikan suku bunga,<sup>5</sup> biaya kredit akan meningkat. Hal ini berdampak pada konsumsi dan investasi.<sup>6</sup> Masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses permodalan murah, terutama untuk pembiayaan perumahan dan kebutuhan konsumsi lainnya. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Jika kebijakan ini tetap berlangsung maka dipastikan daya beli masyarakat akan tetap rendah.

### 5. Pajak yang Semakin Mencengkeram.

Pemerintahan baru Prabowo berencana untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari sekitar 10% menjadi 16%. Hal ini guna menutupi pembiayaan proyek-proyek besar (*Internationalfinance.com*). Namun, kebijakan

ini berpotensi menambah beban bagi dunia usaha dan masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tekanan pajak yang meningkat dapat menurunkan konsumsi dan investasi .

Rencana peningkatan rasio pajak untuk menutupi defisit anggaran akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama kelas menengah dan dunia usaha. Peningkatan pajak dapat berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini juga dapat mempengaruhi sektor investasi, mengurangi kapasitas mereka untuk berinvestasi dan sulit menciptakan lapangan kerja baru. Seperti kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sudah barang tentu memiliki multiplier efek bagi rakyat. Sebabnya, ternyata PPN 12 persen menjadi PPN tertinggi kedua di wilayah ASEAN (*Antarnews.com*).

Dampak kenaikan PPN ini bisa memunculkan dampak dan efek domino pada masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Hal ini bisa memicu kelesuan aktivitas bisnis dan daya beli masyarakat semakin menurun.

#### 6. *Utang yang Mengikat.*

Sampai saat ini jumlah total utang negara ini mencapai Rp. 9.993 triliun. Jika jumlah utang itu dibagi dengan jumlah rakyat Indonesia maka masing-masing harus menanggung sebesar Rp 35,4 juta rupiah perorang (*Kedaulatan Rakyat*, 21/8/2024).

Meskipun demikian, Prabowo tetap berencana melonggarkan batas defisit ini serta meningkatkan rasio utang terhadap PDB yang saat ini berada di sekitar 38.11%, dengan beban pembayaran bunga yang besar (*Eastasiaforum.org*).

Kebijakan ini sangat berpotensi menambah tekanan fiskal jika tidak dikelola dengan hati-hati. Pasalnya, dengan utang negara yang terus meningkat, anggaran negara akan semakin terbebani oleh pembayaran bunga dan cicilan utang, mengurangi alokasi untuk program sosial dan infrastruktur penting yang dapat langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini berpotensi memperpanjang kesulitan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan. Pasalnya, APBN yang seyogyanya dialokasikan untuk rakyat akan tergerus untuk membayar utang. Tahun ini saja total alokasinya untuk bayar utang bunga dan pokoknya dari APBN mencapai Rp. 1.153 triliun (*Datanesia.id*).

#### 7. *Ekonomi Populis yang Butuh Dana.*

Prabowo telah berjanji untuk menerapkan kebijakan populis, termasuk subsidi dan program sosial, yang akan membutuhkan anggaran besar. Program-program ini dapat memerlukan dana besar yang akan memperluas defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan kebijakan populis dengan disiplin fiskal yang ada (*Reset DOC*).

Jika ekonomi tidak tumbuh sesuai harapan, program-program populis ini justru dapat memperberat defisit dan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi

#### 8. *Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).*

Proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi tantangan besar bagi Prabowo. Proyek ini diperkirakan memerlukan dana lebih dari Rp 500 triliun. Sebagian besar pendanaannya berasal dari APBN dan investor asing. Namun, ada kekhawatiran tentang kemampuan menarik investasi dan dampak

proyek ini terhadap lingkungan (*Internationalfinance.com*).

Mega proyek yang bombastis ini memunculkan kekhawatiran. Pasalnya, alokasi anggaran untuk IKN dapat mengorbankan sektor-sektor lain yang lebih mendesak bagi masyarakat luas, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.

### 9. PHK yang Semakin Membesar

Sektor manufaktur dan industri menghadapi tantangan berat, dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat. Perlambatan global serta tekanan biaya produksi membuat banyak perusahaan merampingkan tenaga kerja. Prabowo harus menghadapi masalah ini dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat sektor-sektor strategis nasional (*Eastasiaforum.org*).

Dampak perlambatan ekonomi global dan penurunan permintaan ekspor telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia meningkat pada tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sepanjang Januari sampai 26 September 2024 total hampir 53.000 orang dipecat (*Detik.com*).

Industri manufaktur dan teknologi yang berorientasi ekspor menghadapi tantangan besar, yang dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran di kalangan tenaga kerja produktif. Tanpa intervensi Pemerintah yang kuat, PHK massal ini bisa menciptakan tekanan sosial yang lebih besar.

### 10. Lapangan Kerja yang Sempit

Ketersediaan lapangan kerja menjadi salah

satu isu utama, terutama bagi generasi muda. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan peningkatan PHK, persaingan untuk lapangan kerja akan semakin ketat. Generasi muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, akan menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Kurangnya peluang di sektor formal juga berpotensi meningkatkan jumlah pekerja informal yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan.

## Politik dan Hukum

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi sejumlah tantangan berat terkait politik dan hukum di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari warisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tantangan-tantangan ini mencakup potensi dinamika koalisi politik yang rumit, kepastian hukum, serta ketegangan antara kontrol eksekutif dan kekuatan oligarki.

### 1. Koalisi Politik yang Rentan

Meskipun berhasil memenangkan Pemilu, Prabowo tidak memiliki mayoritas legislatif yang solid. Partai Gerindra, yang dia pimpin, hanya memperoleh sekitar 14% suara di Parlemen. Ini menjadikan Gerindra partai terbesar ketiga. Hal ini berarti Prabowo harus merangkul koalisi politik yang luas untuk menjalankan pemerintahan, yang berpotensi menciptakan ketegangan internal. Koalisi ini mencakup berbagai partai dengan agenda yang berbeda. Upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dapat mempengaruhi stabilitas politik pada masa depan (*Nbr.org*). Dengan koalisi yang gemuk sangat memungkinkan untuk muncul *conflict of interest*. Niat hati untuk mensejahterakan rakyat ujung-ujungnya

cenderung sebatas bagi-bagi kekuasaan.

## 2. *Kekuasaan Oligarki yang Mengcengkeram.*

Di Indonesia, fenomena ini telah menjadi isu yang signifikan. Kekuasaan oligarki yang mengakar kuat memiliki dampak besar dan kompleks terhadap rakyat. Dari kesenjangan ekonomi hingga eksploitasi sumberdaya alam hingga pelemahan institusi negara, pengaruh oligarki sangat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Salah satu ciri utama oligarki adalah konsentrasi kekayaan yang luar biasa pada segelintir orang. Dalam konteks Indonesia, ini terlihat jelas dalam struktur politik dan ekonomi di mana sejumlah kecil konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis, seperti sumberdaya alam (pertambangan, perkebunan), infrastruktur dan perbankan. Para oligark ini juga sering memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik. Ini memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi.

Tidak hanya dalam politik. Dalam aspek penegakan hukum yang pengaruh oligarki begitu kuat. Kekuatan politik dan oligarki memiliki keistimewaan hukum yang tidak dimiliki rakyat biasa. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung keadilan, dan semakin memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap nagara dan aparat penegak hukum. Hasilnya banyak kasus hukum yang beberapa waktu lalu menjadi trending kini hilang entah kemana, seperti kasus KM 50, kasus suap tambang batu bara dll.

## Sosial

Di bidang sosial, pemerintahan Prabowo Subianto akan menghadapi sejumlah tantangan sosial-politik yang kompleks dan berat, yang akan berdampak langsung pada

rakyat Indonesia. Beberapa di antaranya adalah masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meningkat, tingkat stres masyarakat yang tinggi, fenomena pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol), angka perceraian yang meningkat, dan LGBT yang semakin menguat.

Ketidakmampuan Pemerintah untuk menangani semua problem sosial ini secara efektif dapat memperburuk perasaan tidak aman di masyarakat. Rakyat akan merasa bahwa mereka tidak terlindungi dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan siber. Selain itu stres yang terus meningkat akibat tekanan ekonomi dan sosial berpotensi meningkatkan masalah kesehatan mental di kalangan masyarakat. Ini akan menambah beban bagi sektor kesehatan, terutama jika fasilitas dan sumberdaya kesehatan mental yang ada tidak mencukupi untuk menangani lonjakan kasus.

*Wallaaahu a'lam.* []


## Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 259-268.
- <sup>2</sup> Permana, E., Subhan, N., Juliana, J., & Abduh, M. (2024). The Role of Fundamental Strategies in Overcoming the Inflation. *KEDJATI Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 20-34.
- <sup>3</sup> Marlina, R., Juliana, J. J., Adila, N. A., & Robbani, M. B. (2019). Islamic Political Economy: Critical Review of Economic Policy in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 47-55.
- <sup>4</sup> Alamsyah, I. F., & Juliana, J. (2021). Transition to A True Currency: Impact of COVID-19 on The World Currency System. *Islamic Research*, 4(2), 42-47.
- <sup>5</sup> Putra, D. A., Juliana, J., Firmansyah, F., & Marlina, R. (2023). The Effect Of Interest Rate, Inflation Rate And Rupiah Exchange Rate On Investment Results In Sharia Life Insurance Companies In Indonesia. *Tsarwatica (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 5(1), 41-57.
- <sup>6</sup> Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., Juliana, J., & Anggrismo, A. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research*, 6(1), 63-68.

# SOLUSI ISLAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA BANGSA

**Luthfi Afandi**

Direktur Pusat Kajian Islam Kaffah

 Jika ditelusuri, berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini tidak terjadi secara alami. Semua diproduksi secara sistemik dan bermuara pada satu akar utama, yakni penerapan sistem Kapitalisme sekuler dan ketiadaan penerapan syariah Islam secara *kaaffah* (totalitas) dalam institusi pemerintahan.

## Sirkulasi Elit Politik dan Peluang Perubahan

Pada tahun 2024 ini banyak peristiwa politik terjadi. Di antaranya Pilpres yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemilu Legislatif yang digelar bersamaan dengan Pilpres juga telah menempatkan 580 orang menjadi anggota DPR RI, 136 orang menjadi anggota DPD RI serta 19.817 orang menjadi anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota dari seluruh daerah di Indonesia. Pada tanggal 27 November 2024 juga digelar Pilkada serentak yang memilih 37 pasang gubernur dan wakil gubernur, 415 pasang bupati dan wakil bupati dan 93 pasang walikota dan wakil walikota.

Sistem demokrasi memiliki mekanisme berkala setiap lima tahunan. Tidak lain untuk memastikan sirkulasi elit dalam konteks pergantian kepemimpinan politik, baik eksekutif maupun legislatif, dari pusat hingga ke daerah. Mekanisme ini menurut para pegiat demokrasi untuk memastikan agar terwujud iklim demokrasi yang sehat.

Namun demikian, sistem demokrasi sesungguhnya tidak didesain dan tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukan perubahan yang fundamental. Sistem demokrasi memang memberikan ruang kepada siapapun untuk berkuasa, tetapi tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mengubah sistem yang ada. Karena itu, jika akar permasalahan bangsa ini penerapan sistem Kapitalisme sekuler, dan kita ingin sistem ini diganti dengan sistem Islam, maka keinginan ini tidak memiliki ruang sama sekali dalam sistem demokrasi. Artinya, pemerintahan yang baru ini tidak akan mampu membawa bangsa ini keluar dari problematika yang sistemik. Sebabnya, yang terjadi hanya sirkulasi elit semata. Mereka tetap menjalankan dan melanjutkan ideologi dan sistem

Kapitalisme sekuler seraya tetap mengabaikan syariah Islam. Lalu, bagaimana bisa bangsa ini keluar dari berbagai permasalahan, sementara yang menjadi sumber masalahnya masih tetap dipertahankan?

## Perubahan Mendasar dengan Ideologi dan Sistem Islam

Jika bangsa ini ingin keluar dari berbagai masalah, akar masalahnya harus dicerabut, yakni ideologi dan sistem Kapitalisme sekuler, kemudian diganti dengan ideologi dan sistem Islam yang dapat menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Ini karena ideologi dan sistem Islam berasal Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Adil, Allah SWT.

Islam adalah ideologi yang melahirkan sistem kehidupan yang mencakup politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya Pendidikan, dll. Sistem kehidupan Islam inilah yang akan menjadi jawaban dan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan umat manusia. Namun, agar ideologi dan sistem Islam ini benar-benar menjadi solusi, ia wajib diterapkan oleh negara. Tentu untuk menggantikan sistem kehidupan lainnya, seperti Kapitalisme sekuler maupun Sosialisme komunis.

### 1. Penerapan Sistem Politik Islam.

Sistem politik Islam adalah sistem yang terpenting di dalam Islam. Sistem lainnya seperti sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem lainnya tidak akan dapat diterapkan kecuali terlebih dulu ditegakkan sistem politik Islam. Sistem politik Islam Khilafah.

Khilafah Islam dibangun berdasarkan empat pilar. *Pertama*: Kedaulatan di tangan Syariah (*As-Siyaadah li al-Syar'i*). Hukum-hukum yang diterapkan oleh negara harus berdasarkan sumber Hukum Islam, yakni al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'i*. Bukan berasal dari akal manusia yang terbatas.

Apalagi manusia pasti memiliki kepentingan ketika diberi wewenang membuat hukum dan undang-undang. Sebaliknya, aturan yang berasal dari Allah SWT pasti mengandung kesempurnaan, menjadi solusi dan dapat mewujudkan keadilan.

*Kedua*: Kekuasaan di tangan umat (*As-Sulthaa li al-Ummah*). Umat memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengangkat seorang khalifah melalui proses *baiat*. Khalifah dipilih oleh umat dan bertanggung jawab menjalankan hukum-hukum syariah Islam serta menjaga kepentingan umat. Pilar ini tentu berbeda dengan sistem demokrasi, karena di dalam sistem demokrasi pemimpin dipilih untuk menjalankan keinginan dan kehendak manusia. Juga berbeda dengan sistem teokrasi yang memandang pemimpin sebagai wakil tuhan, yang tidak bisa salah, dan rakyat tidak memiliki kewenangan memilih pemimpin yang mereka kehendaki.

Di dalam Islam, hanya khalifah yang dipilih umat. Adapun struktur di bawahnya, seperti *wali* (kepala daerah setingkat gubernur) atau *amil* (kepala daerah setingkat kabupaten/kota), diangkat oleh khalifah, tidak dipilih oleh rakyat. Dengan demikian kebijakan khalifah akan selalu sinkron dengan kepala daerah di bawahnya dan pasti akan jauh lebih efisien dibandingkan ketika kepala daerah dipilih oleh rakyat.

*Ketiga*: Wajib mengangkat seorang khalifah (pemimpin) saja untuk seluruh kaum Muslim di dunia. Pilar ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Tidak terpecah-belah menjadi negeri-negeri yang kecil dan lemah. Keterpecahbelahan kaum Muslim tentu akan memudahkan bagi negara-negara kafir untuk menjajah mereka.

*Keempat*: Fungsi adopsi (*tabanni*) hukum berada di tangan Khalifah (kepala negara) saja. Prinsip ini berbeda dengan negara demokrasi yang kewenangan legislasinya ada pada anggota dewan atau parlemen. Berdasarkan



prinsip ini, Khalifah dapat menhadopsi suatu hukum menjadi undang-undang negara. Prinsip ini diterapkan, di antaranya untuk menghilangkan perselisihan atau perbedaan pandangan tentang suatu perkara yang berpotensi mengganggu stabilitas negara Khilafah. Ketika Khalifah telah mengadopsi suatu hukum, maka seluruh warga negara wajib taat, tanpa kecuali.

### 2. Penerapan Sistem Hukum Islam.

Hukum Islam berasal dari Allah SWT. Bukan hasil rancangan manusia. Karena itu pasti ada jaminan kesempurnaan dan keadilan. Sistem persanksian (*nizhaam 'uquubaat*), yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, misalnya, diterapkan dalam rangka menjaga kehidupan masyarakat dan menjamin agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan aman.

Hukum persanksian di dalam Islam tentu memberikan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Di antara falsafah penting penerapan sanksi di dalam Islam adalah sebagai pencegah (*zawaajir*) dan sebagai penebus dosa (*jawaabir*) bagi pelakunya. Bersifat *zawâjir*, yakni dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan kriminal serupa. Karena itu penerapan sistem hukum Islam akan dapat menurunkan angka kriminalitas. Masyarakat pun akan terjaga dari berbagai kerusakan dan kehancuran.

### 3. Penerapan Sistem Ekonomi Islam.

Di dalam sistem ekonomi Islam, syariah tidak membatasi kepemilikan seseorang terhadap barang dan jasa berdasarkan *jumlahnya*, sebagaimana halnya dalam sistem ekonomi Sosialisme-komunis. Prinsip ini tentu akan menjamin produktivitas masyarakat, sehingga ekonomi akan bertumbuh. Akan tetapi, syariah Islam membatasi kepemilikan barang dan jasa berdasarkan *cara*

*perolehannya*; termasuk di dalamnya apa yang boleh diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan. Barang dan jasa yang haram jelas tidak boleh diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan.

Sumber-sumber ekonomi tersebut juga dihasilkan melalui mekanisme yang benar, baik sebab kepemilikan, maupun sebab pengembangan harta yang sah. Jenis kepemilikan, baik kepemilikan individu, umum dan negara dikelola berdasarkan hukum syariah. Syariah Islam melarang pengembangan harta dengan cara haram, seperti riba, judi, manipulasi, penimbunan, kartel, mafia, dan sebagainya.

Di dalam Islam, negara harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masing-masing individu mulai dari sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Caranya dengan mewajibkan tiap individu, khususnya pria dewasa untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, orangtuanya berikutnya sanak kerabatnya. Karena itu negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya. Jika pria dewasa yang mampu bekerja tidak ada, maka orang terdekat berkewajiban untuk menjamin mereka. Jika tidak ada, Negara Khilafahlah yang wajib menjamin kebutuhan mereka.

Ini adalah mekanisme yang adil dan produktif. Dengan mekanisme seperti ini, jaminan yang diberikan oleh Negara Khilafah ini tidak membuat rakyat malas bekerja. Sebaliknya, mereka tetap produktif. Jaminan ini diberikan oleh Negara Khilafah bisa melalui skema zakat, pemberian modal kerja (*iqthaa*), dan sebagainya. Negara juga berhak memaksa orang yang kaya untuk mengeluarkan zakat fitrah dan *mal*-nya. Negara Khilafah juga melarang mereka menimbun uang dan barangnya.

Khilafah juga menjamin tidak adanya praktik mafia, kartel, penimbunan, manipulasi,

riba, *money game*, dan sebagainya di pasar dan di tengah masyarakat. Dengan begitu, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengembangkan hartanya. Masing-masing juga bisa memperoleh keuntungan dari hartanya dengan cara yang benar dan sehat.

Untuk memastikan pendistribusian barang dan jasa kepada setiap individu sehingga kesenjangan ekonomi bisa dihilangkan, maka secara teknis Negara Khilafah bisa menempuh beberapa kebijakan:

- (1) Mengambil harta zakat dari orang kaya, kemudian didistribusikan kepada mereka yang tidak mampu.
- (2) Pembagian harta warisan dan nafkah untuk menjamin kebutuhan keluarga.
- (3) Mendistribusikan kekayaan milik umum, seperti hasil pengelolaan minyak, tambang emas, batubara, nikel, dan sebagainya. Hasil pengelolaan kekayaan milik umum ini didistribusikan kepada rakyat, baik dalam bentuk jaminan pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas perumahan, kebutuhan dasar, seperti air, listrik, dan sebagainya.
- (4) Pemberian Negara Khilafah kepada mereka yang membutuhkan dari kekayaan milik negara, seperti tanah pertanian bagi yang mampu bercocok tanam, serta membiayai mereka dari harta *kharaj* maupun *jizyah*.

Dengan penerapan Sistem Ekonomi Islam ini akan terjadi distribusi secara merata kepada seluruh anggota masyarakat, mampu mengatasi kesenjangan serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

#### 4. Penerapan Sistem Sosial Islam.

Secara preventif, Islam telah menyediakan berbagai aturan, yaitu:

5. Melarang perzinahan dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelakunya.
6. Memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangannya.

7. Mewajibkan masyarakat untuk menjaga kesucian diri [*'iffah*].
8. Mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup auratnya secara sempurna.
9. Melarang laki-laki dan perempuan untuk ber-*khalwat* (bersepi-sepi) dan *ikhtilath* (campur baur laki-laki dan perempuan).
10. Melarang para wanita melakukan *tabarruj* (berhias secara berlebihan).
11. Mengharuskan perempuan ketika safar dengan perjalanan sehari semalam wajib didampingi oleh mahramnya.
12. Memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjauhi berbagai aktivitas dan tempat *syubhat* yang berpotensi terjadinya keharaman.

Selanjutnya, secara kuratif, Islam telah menyediakan sanksi yang tegas demi tegaknya kebenaran dan terselamatkannya umat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, misalnya, tidak akan dibenarkan sebuah industri atau perdagangan yang melanggar hukum Allah SWT beroperasi, termasuk perdagangan barang-barang yang bisa membangkitkan syahwat seseorang, walaupun secara ekonomi "sangat menguntungkan".

#### Urgensi Institusi Pemerintahan Islam

Berbagai sistem dan aturan di dalam Islam di atas hanya dapat diterapkan oleh institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islam. Karena itu upaya untuk menerapkan syariah Islam di dalam sistem demokrasi hanya akan berujung pada kesia-siaan juga melanggar syariah Islam.

Alhasil, berbagai permasalahan masyarakat akan dapat diselesaikan jika yang diterapkan syariat Islam secara *kaaffah*. Penerapan syariat Islam secara *kaaffah* hanya dapat dilakukan oleh institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islam.

*Wallaaahu ta'ala a'lam bi ash-shawaab.* []

# KERAPUHAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

Dua raksasa ekonomi dunia, yaitu AS dan Cina, mengalami tekanan yang cukup tinggi tahun ini. IMF meramal ekonomi AS hanya akan tumbuh 2,6 persen tahun ini, lalu melambat menjadi 1,9 pada tahun 2025. Cina hanya tumbuh 5 persen dan diperkirakan merosot menjadi 4,5 persen pada tahun berikutnya. Beberapa persoalan fundamental menghambat pertumbuhan ekonomi kedua negara itu.

Berdasarkan survei Pew Research Center yang digelar Mei 2024,<sup>1</sup> tiga dari lima masalah teratas yang dihadapi Amerika Serikat menurut pandangan masyarakatnya terkait dengan ekonomi. Inflasi menjadi masalah paling mendesak karena terkait dengan kenaikan biaya hidup dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Urutan kedua adalah kemampuan Partai Demokrat dan Republik untuk bekerjasama dianggap sebagai masalah serius. Mahalnya pelayanan kesehatan menduduki posisi ketiga. Kecanduan narkoba berada di urutan keempat. Defisit anggaran federal berada pada peringkat kelima. Utang pemerintah federal terus meningkat dengan mengandalkan penjualan obligasi kepada para investor, baik negara asing maupun swasta, yang sangat sensitif terhadap stabilitas ekonomi negara penguat.

Federal Reserve sendiri telah memulai

pemotongan suku bunga pertamanya dalam empat tahun, mengurangi suku bunga pinjaman utama sebesar 0,5 poin persentase. Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran yang berkelanjutan atas pertumbuhan ekonomi yang tertekan oleh suku bunga tinggi yang diberlakukan untuk meredam inflasi yang masih di atas 2 persen. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat merangsang pengeluaran konsumen yang mengandalkan pembiayaan kredit.

Sementara itu, Cina, yang menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi global dalam dua dekade terakhir, juga menghadapi beberapa masalah ekonomi yang cukup serius. *Pertama:* Perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina telah menjadi perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Dari tingkat pertumbuhan dua digit pada awal 2000-an, ekonomi Cina mengalami penurunan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan PDB Cina hanya di sekitar 5 persen, jauh di bawah rata-rata 9,5 persen yang dicapai antara 1978 hingga 2018. Pertumbuhan rendah ini tidak hanya mengindikasikan turunnya performa ekonomi negara itu, tetapi juga menjadi alarm bagi negara-negara yang mengandalkan Cina sebagai pasar ekspor, termasuk Indonesia.

*Kedua:* Krisis properti di Cina telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara tersebut. Sektor real estate, yang menyumbang sekitar 25-30 persen dari PDB Cina, mengalami guncangan berat, menimbulkan kekhawatiran akan efek domino ke sektor lain dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Rendahnya permintaan properti mendorong Pemerintah Cina pada Juli 2024 untuk menerbitkan sekitar 1 triliun yuan (sekitar \$140 miliar) utang jangka panjang untuk mengatasi krisis tersebut. Namun, inisiatif itu dianggap tidak memadai dibandingkan besarnya gagal bayar yang dialami oleh

sejumlah perusahaan properti di negara itu.<sup>2</sup>

*Ketiga:* Tingginya utang Pemerintah menjadi masalah kronis bagi ekonomi Cina. Pada akhir 2023, total utang Pemerintah—termasuk utang pemerintah pusat, daerah dan LGFV (Local Government Financing Vehicles)—mencapai 116 persen dari PDB, naik 35 persen sejak 2018. Peningkatan ini menambah risiko krisis utang di masa depan. Sebelum krisis properti, sektor tersebut menyumbang 40 persen pendapatan pemerintah daerah, namun merosot tajam setelah krisis melanda. Dua dari tiga lembaga pemeringkat utama, Moody's dan Fitch, telah menempatkan utang Cina dalam *outlook* negatif sejak Desember lalu.<sup>3</sup> Akibatnya, ruang gerak Pemerintah dalam kebijakan fiskal seperti pemberian subsidi dan stimulus semakin terbatas, dan risiko krisis keuangan kian meningkat.

*Keempat:* Penuaan populasi Cina merupakan tantangan demografis yang signifikan. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional Cina, pada akhir 2023, sekitar 20 persen populasi Cina berusia di atas 60 tahun, meningkat dari 13,3 persen pada tahun 2010. Angka kelahiran turun ke level terendah dalam sejarah modern Cina, yaitu 6,39 kelahiran perseribu orang pada 2023.<sup>4</sup> Angka ini jauh lebih rendah dibandingkandengan angka kelahiran di Indonesia yang mencapai 16 perseribu orang.

Perubahan demografis ini—fenomena yang mulai jamak di negara-negara maju—akan mengurangi ketersediaan tenaga kerja produktif dan meningkatkan biaya pensiun serta perawatan kesehatan karena lebih banyak orang yang tidak berada dalam usia kerja. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan lebih rendah, yang pada gilirannya dapat melemahkan daya saing ekonomi negara itu di tingkat global.

*Kelima:* Ketegangan geopolitik, terutama dengan Amerika Serikat, telah berdampak

signifikan pada ekonomi Cina. Perang dagang yang dimulai pada 2018 berlanjut dengan berbagai bentuk. Pemerintahan Biden juga telah menerapkan kontrol ekspor ketat yang bertujuan untuk membatasi akses Cina terhadap teknologi canggih, terutama di sektor semikonduktor. Pemerintah AS telah meningkatkan tarif pada barang-barang Cina. Sebagai contoh, pemberlakuan tarif 100 persen untuk kendaraan listrik dan 50 persen untuk sel surya. Langkah ini bertujuan untuk melindungi bisnis Amerika dari apa yang dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil oleh Cina.<sup>5</sup>

Ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung antara AS dan Cina, terutama terkait dengan Taiwan dan Laut Cina Selatan, semakin merenggangkan hubungan ekonomi kedua negara tersebut.

## Fundamental Domestik Rapuh

Ketidakstabilan ekonomi global akan berdampak serius terhadap ekonomi Indonesia. Tekanan ekonomi yang dihadapi Amerika Serikat dan Cina, serta konflik di antara keduanya, secara langsung berdampak signifikan bagi Indonesia. Permintaan ekspor Indonesia diperkirakan akan menurun, terutama untuk komoditas utama seperti batubara dan minyak kelapa sawit. Selain itu, krisis properti di Cina dan ketidakstabilan kebijakan moneter di AS juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global, yang pada gilirannya akan berdampak pada nilai tukar rupiah dan pasar keuangan Indonesia.

Di dalam negeri, kondisi ekonomi juga semakin tidak solid. Penurunan kelas menengah di Indonesia, hampir 10 juta orang dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024, mencerminkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Tingkat kemiskinan di Indonesia juga masih sangat tinggi. Menurut Bank Dunia, dengan standar kemiskinan US\$3,65 perhari, penduduk miskin Indonesia pada tahun 2023 adalah 18,25 persen atau sekitar 50,65 juta orang. Angka ini

dua kali angka versi Pemerintah yang mencapai 9,40 persen atau sekitar 26 juta orang pada periode yang sama. Jika memasukkan standar yang lebih tinggi, sebesar US\$6,9 penduduk yang hidup miskin menjadi 62 persen.<sup>6</sup>

Indeks Gini yang mencerminkan ketimpangan ekonomi juga semakin akut dari 30,3 pada tahun 2000 menjadi 35 pada tahun 2023. Ini adalah akibat semakin terkonsentrasinya kekayaan di kelompok menengah atas.

Penurunan angka kelas menengah di Indonesia diakibatkan oleh peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Dalam dua tahun terakhir, harga pangan, terutama beras, mengalami kenaikan signifikan. Biaya transportasi juga meningkat akibat lonjakan harga BBM. Biaya listrik tetap tinggi karena sebagian besar bahan bakunya diimpor. Kenaikan biaya hidup ini dapat berlanjut jika Pemerintah memberlakukan pembatasan pada BBM bersubsidi dan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, termasuk pada cukai minuman berpemanis dan rokok.

Pengetatan suku bunga Bank Indonesia telah menyebabkan kenaikan suku bunga kredit dan investasi. Akibatnya, masyarakat yang mengandalkan kredit untuk membiayai konsumsi mereka (seperti rumah dan kendaraan) dan usaha mereka, ikut tertekan. Nasib penduduk yang mengakses pinjol jauh lebih tragis.

Di sisi lain, maraknya PHK, pertumbuhan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup, serta penurunan pendapatan akibat turunnya harga komoditas pertanian dan pertambangan menyebabkan turunnya pendapatan penduduk. Sebagai gambaran, tingkat inflasi rata-rata Februari 2019-Februari 2024 sekitar 3 persen, bahkan makanan mencapai 4 persen. sementara pertumbuhan upah hanya sekitar 1,7 persen. Bahkan banyak pekerja yang upahnya tumbuh hanya sekitar satu persen, seperti transportasi, jasa pendidikan, penyedia makanan dan minuman. Deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi

indikasi turunnya daya beli masyarakat.

Pelaku usaha juga dihadapkan pada kondisi bisnis yang semakin tidak kondusif. Berdasarkan survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Semester I-2024, perizinan, suku bunga, infrastruktur, perpajakan, dan undang-undang/ ketentuan, merupakan masalah terbesar yang dihadapi pengusaha. Dalam hal suku bunga, misalnya, rata-rata suku bunga pinjaman di Indonesia mencapai 8.9 persen, jauh di atas Thailand (4,3 persen), Cina (4.4 persen), dan Malaysia (5,3 persen). Suku bunga menjadi lebih tinggi pada skala usaha mikro dan kecil dibandingkan usaha besar dan menengah.

Produsen domestik juga dihadapkan pada banjir produk impor, terutama dari Cina. Dugaan praktik anti-dumping pada produk-produk impor asal Cina tidak mendapatkan perlawanan sama sekali dari Pemerintah. Bahkan Pemerintah cenderung mempermudah masuknya barang-barang impor. Salah satu bentuknya adalah penghapusan peraturan teknis dari Kementerian Perindustrian atas barang-barang impor.

## Kembali Ke Islam

Dalam perspektif Islam, penyebab berbagai persoalan ekonomi global dan domestik dapat dikembalikan pada beberapa faktor mendasar. *Pertama:* Sistem ekonomi Kapitalisme sering hanya fokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek distribusi. Dalam sistem ini, distribusi dipandang sebagai pelengkap, tanpa adanya kewajiban dari negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Akibatnya, kemiskinan menjadi masalah laten.

*Kedua:* Mekanisme pasar dalam pendistribusian barang modal ekonomi—seperti tanah, uang, pendidikan, dan keterampilan—menyebabkan hanya mereka yang mampu membayar harga barang modal atau memiliki koneksi dengan penguasa yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya, jutaan usaha kecil dan menengah (UKM) atau calon pengusaha kesulitan mendapatkan modal

akibat masalah suku bunga, jaminan, dan prosedur yang rumit. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga yang mengendap di perbankan atau dibelikan surat berharga milik Bank Indonesia (BI) maupun Pemerintah, lebih dari seribu triliun rupiah pada akhir tahun lalu.

*Ketiga.* Masalah struktural lainnya muncul dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bergantung pada pajak dan utang berbasis riba. Akibatnya, alokasi pembayaran utang dan bunga semakin besar dan mengurangi belanja Pemerintah untuk subsidi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.

*Keempat.* Sistem moneter yang berbasis *fiat money* dan sistem keuangan yang mengandalkan riba serta spekulasi menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

*Kelima.* Penguasaan aset-aset publik oleh segelintir korporasi swasta menyebabkan ketimpangan semakin meluas. Kondisi ini sangat kontras dengan aturan yang berlaku di dalam Negara Islam (Khilafah Islam). Distribusi menjadi perhatian utama dalam prinsip ekonomi Islam, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar—seperti makanan, minuman, dan pakaian per individu, serta memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis.

Islam juga telah menetapkan kategori dan batasan kepemilikan barang-barang ekonomi. Barang milik publik, misalnya, seperti air, hutan dan energi tidak dapat dikuasai oleh swasta. Semua itu harus dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Tanah menjadi milik negara didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan dan mampu mengelolanya.

Kuangan negara juga menjadi lebih sehat sebab tak mengandalkan pendapatan utang ribawi. Pendapatan dari pengelolaan harta milik umum seperti tambang batubara, migas dan emas berpotensi meraup pendapatan besar. Apalagi jika nilai tambahnya ditingkatkan dengan mengadopsi teknologi terbaru dan sistem

produksi yang lebih efisien. Mekanisme ini berpotensi menghilangkan atau mereduksi porsi penerimaan negara dari pajak yang *syar'i*, yang hanya berlaku untuk orang yang kaya dan temporer jika kas negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang wajib.

Sistem moneter dalam Islam bersandar pada mata uang emas (dinar) dan perak (dirham). Dengan itu stabilitas nilai mata uang dan pengendalian inflasi lebih terjaga. Sistem keuangan dalam Islam juga menolak transaksi yang zalim seperti riba dan spekulasi (*gharar*). Kerjasama bisnis seperti *syirkah mudhaarabah* (bagi hasil) dan *charity* seperti pemberian pinjaman yang tidak berbunga (*qardh hasanah*), wakaf dan sedekah, didorong untuk tumbuh.

Beberapa aspek dari sistem ekonomi Islam tersebut sangat relevan bagi rakyat dan Pemerintah Indonesia yang mendambakan perbaikan kesejahteraan, kemajuan, kestabilan dan kemandirian ekonomi; serta peningkatan daya saing di tingkat global. Apalagi aturan-aturan Islam merupakan kewajiban yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Yang Mahatahu dan Mahabijaksana.

*Wallahu a'lam bi ash-shawaab.* [Muis].

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Pew Research. "Top problems facing the U.S.". <https://www.pewresearch.org/politics/2024/05/23/top-problems-facing-the-u-s/>. Diakses 3 Oktober 2024.
- <sup>2</sup> Milton Ezrati, "Complexities Dog Beijing's Latest 'Remedy' For China's Property Crisis," *Forbes*, July 9, 2024, <https://www.forbes.com/sites/miltonezrati/2024/07/08/complexities-dog-beijings-latest-remedy-for-chinas-property-crisis/>. Diakses 3 Oktober 2024.
- <sup>3</sup> Chan Ka Sing, "China's Risky Answer to Wall of Debt Is More Debt," *Reuters*, June 18, 2024, <https://www.reuters.com/breakingviews/chinas-risky-answer-wall-debt-is-more-debt-2024-06-17/>. Diakses 3 Oktober 2024.
- <sup>4</sup> Farah Master, "China's population drops for second year, with record low birth rate," *Reuters*, January 17, 2024, <https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-drops-2nd-year-raises-long-term-growth-concerns-2024-01-17/>. Diakses 4 Oktober 2024.
- <sup>5</sup> "US-China Relations in the Biden Era: A Timeline," *China Briefing*, September 18, 2024, <https://www.china-briefing.com/news/us-china-relations-in-the-biden-era-a-timeline/>. Diakses 4 Oktober 2024.
- <sup>6</sup> World Bank. Poverty and Inequality Platform. Indonesia. <https://pip.worldbank.org/#>. Diakses 5 Oktober 2024.



Diasuh oleh:  
KH. Hafidz Abdurrahman  
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

# BAGAIMANA MENGADILI PENGUASA ZALIM?

**KH Hafidz Abdurrahman, MA**

## Soal:

Bagaimana cara mengadili penguasa yang zalim dan jahat? Bagaimana hukuman yang harus dijatuhkan kepada dirinya?

## Jawab:

Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana mentaati penguasa kaum Muslim. Islam juga mengajarkan bagaimana cara menasihati penguasa zalim, bahkan menghentikan kekuasaannya dan mengadili dirinya.

Nas-nas yang mewajibkan ketaatan kepada penguasa kaum Muslim jumlahnya sangat banyak, baik al-Quran, as-Sunnah maupun Ijmak Sahabat. Allah SWT, misalnya, berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir. Yang demikian lebih utama (bagi kalian) dan lebih*

*baik akibatnya (QS an-Nisa' [4]: 59).*

Nabi saw. bersabda:

﴿مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي﴾

*Siapa saja yang mentaati aku, dia benar-benar telah mentaati Allah. Siapa saja yang tidak mentaati aku, dia pun tidak mentaati Allah. Siapa saja yang mentaati pemimpinnya, dia benar-benar telah mentaati aku. Siapa saja yang tidak mentaati pemimpinnya, dia pun tidak mentaati aku (HR Ibn Hibban, dari Abu Hurairah).*

Hanya saja, selain nas-nas syariah yang memerintahkan untuk mentaati penguasa, syariah juga membatasi ketaatan itu dalam perkara ketaatan, bukan mentaati dalam perkara maksiat. Nabi saw. bersabda:

﴿لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ﴾

*Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq (Allah) (Dikeluarkan oleh al-Baghawi dari an-Nawas as-Sam'ani al-Anshari dalam Syarh as-Sunan; Syu'aib al-Arna'uth dalam Takhrij Siyar al-A'lam an-Nubala'. Statusnya shahiih).*

Kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa itu bisa dikategorikan menjadi dua: *Pertama*, menyalahi sesuatu yang *qath'i*, baik yang terkait dengan akidah maupun hukum syariah. *Kedua*, menyalahi kaidah hukum yang dia adopsi sehingga hukum yang diadopsi sebagai

perundang-undangan tidak bisa dianggap sebagai hukum syariah bagi dirinya. Maka, baik dalam konteks yang pertama maupun kedua, dia sama-sama tidak boleh ditaati.

Perundang-undangan yang diadopsi penguasa itu bisa dibagi menjadi dua: *Pertama*, perundang-undangan syariah (*qawaaniin syar'iyah*). Dalam konteks ini penguasa tidak boleh mengadopsi perundang-undangan yang lain, selain perundang-undangan yang bersumber dari syariah, bukan yang lain. *Kedua*, perundang-undangan administrasi (*qawaaniin ijtira'iyah*), seperti peraturan lalu lintas, kependudukan, dan sebagainya. Ini merupakan masalah *usluub* yang bersifat mubah. Dalam konteks ini penguasa bisa mengadopsi sistem dari mana saja, selama mubah. Meski hukum asalnya mubah, mentaati penguasa dalam konteks ini hukumnya wajib.

Lalu, bagaimana jika penguasa tersebut melakukan maksiat, baik dalam konteks yang pertama maupun yang kedua? Jawabannya sebagai berikut:

*Pertama*, jika kemaksiatan itu terkait dengan masalah akidah atau hukum syariah yang *qath'i*, maka kemaksiatan ini bisa mengantarkan dirinya pada kekufuran yang nyata. Ini sebagaimana yang terjadi ketika Kemal Attaturk membubarkan Khilafah Islam di Turki. Dalam konteks ini berlaku hadis berikut:

«دَخَلْنَا عَلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: رَأَيْتَ لَكَ اللَّهُ حَدِيثَ بَحْدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

*Kami pernah menjenguk 'Ubadah bin Shamit ketika beliau sedang sakit. Kami berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah hadis yang Allah jadikan manfaat bagi dirimu, yang pernah engkau dengar dari Nabi saw." Beliau pun berkata: Nabi saw. pernah memanggil kami. Kami pun membaiai beliau. Lalu beliau bersabda mengenai apa yang beliau ambil dari kami: Hendaknya kami membaiai beliau untuk mendengar dan taat, baik dalam kondisi senang maupun tidak, baik dalam kondisi susah maupun lapang. Juga [ketika penguasa] mengutamakan dirinya atas kami. Hendaknya kami tidak merebut urusan itu dari yang berhak [penguasa], kecuali [kata Nabi], "jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, yang kalian mempunyai bukti yang kuat di hadapan Allah." (HR al-Bukhari dari Ubadah bin Shamit).*

Dalam konteks ini, yaitu ketika negara tersebut negara Islam (Khilafah), kemudian penguasanya melakukan revolusi kufur, sebagaimana yang dilakukan Attaturk, yang sudah terbukti kekufurannya berdasarkan nas yang *qath'i*, maka Islam mengajarkan cara untuk menghentikan dirinya, sebagaimana dalam hadis ini:

«خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُوهُمْ وَيَبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ»

*"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci*

dan mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah tidak boleh mengangkat pedang untuk menghentikan mereka?” Nabi menjawab, “Tidak. Selama mereka masih menegakkan shalat di tengah-tengah kalian.” (HR Muslim dari Auf bin Malik al-Asyja’i).

Makna, “*Maa aqamu fiikum as-shalaah*” itu adalah selama mereka masih menegakkan hukum syariah. Ini merupakan bentuk *kinaayah* (kiasan). Jika diartikan dengan konotasi sesungguhnya, berarti, “Selama mereka masih mendirikan shalat.” Jika diartikan kiasan, maka artinya, “Selama mereka masih menegakkan hukum syariah”. Jika tidak, maka mereka boleh dihentikan. Inilah cara yang dinyatakan dalam hadis.

Nas “*Fa in tanaaza’tum fii syay’in fa rudduuhu llaalLaah wa ar-Rasuul*” diikuti dengan redaksi “*In kuntum tu’minuuna billLaahi wa al-Yawmi al-Aakhiri*”. Artinya, dalam kondisi terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyat, wajib dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yakni kembali pada al-Quran dan as-Sunnah. Untuk kembali pada al-Qur’an dan as-Sunnah itu dibutuhkan instrumen, berupa individu atau lembaga *Tahkiim* (yang memutuskan). Karena itu perintah ini sekaligus menuntut adanya individu atau lembaga *Tahkiim*.

Selain cara ini, ada cara yang dinyatakan dalam al-Quran, diambil dari *dalaalah mafhuum* atau *dalaalah iltizaam*. Perhatikan firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

*Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir. Yang demikian lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya (QS an-Nisa’ [4]: 59).*

Nas “*Fa in tanaaza’tum fii syay’in fa rudduuhu llaalLaah wa ar-Rasuul*” diikuti dengan redaksi “*In kuntum tu’minuuna billLaahi wa al-Yawmi al-Aakhiri*”. Artinya, dalam kondisi terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyat, wajib dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yakni kembali pada al-Quran dan as-Sunnah. Untuk kembali pada al-Qur’an dan as-Sunnah itu dibutuhkan instrumen, berupa individu atau lembaga *Tahkiim* (yang memutuskan). Karena itu perintah ini sekaligus menuntut adanya individu atau lembaga *Tahkiim*. Sebab, jika tidak ada, maka perintah ini tidak bisa dieksekusi. Ini namanya *dalaalah iltizaam*. Nah, individu atau lembaga *Tahkiim* inilah yang kemudian disebut Qadhi atau Mahkamah Mazhalim.<sup>1</sup>

Ini dengan catatan, jika Qadhi atau Mahkamah Mazhalim tersebut berfungsi. Jika tidak maka cara yang dinyatakan dalam hadits Muslim dari Auf bin Malik al-Asyja’i itu bisa ditempuh. Itulah yang pernah dilakukan oleh Sayidina ‘Abdullah bin Zubair ra. dan Sayidina Husain bin ‘Ali ra.

Qadhi Mazhalim pada zaman Khilafah Islam biasanya dijabat langsung oleh Khalifah. Hanya saja, Umar bin al-Khatthablah khalifah

pertama yang mengangkat orang khusus untuk melakukan tugas memeriksa aduan dari rakyat yang disampaikan kepada Khalifah. Orang itu adalah Muhammad bin Maslamah.<sup>2</sup> Setelah terbukti maka Umar sendiri yang menjadi eksekutornya. Inilah kata-kata Umar:

أَمَّا عَامِلٌ لِي ظَلَمَ أَحَدًا فَبَلَّغْتَنِي مَظْلَمَتُهُ فَلَمْ أَعْرِضْهَا  
فَأَنَا ظَلَمْتُهُ

*Siapa saja pejabatku yang melakukan kezaliman kepada seseorang, kemudian kezalimannya sampai kepada diriku, tetapi aku tidak mengubahnya, maka sungguh aku telah mezalimi dirinya.*<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dari seluruh level, mulai dari level kepala negara sampai pejabat yang paling bawah, dijelaskan oleh al-Mawardi ada delapan kategori:<sup>4</sup>

- 1- Kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa kepada rakyat secara umum.
- 2- Kezaliman penguasa dalam mengambil harta rakyat melebihi ketentuan yang berlaku.
- 3- Kezaliman penguasa akibat buruknya implementasi terhadap batas-batas kewenangan yang dimiliki.
- 4- Kezaliman penguasa akibat mengambil, merampas atau menggasak harta kepemilikan, baik individu, umum atau negara.
- 5- Kezaliman penguasa mengambil, merampas atau menggasak harta wakaf, baik umum maupun khusus.
- 6- Kezaliman penguasa akibat kelemahannya dalam mengeksekusi keputusan pengadilan, karena harus menghadapi para pihak yang memiliki kekuatan.
- 7- Kezaliman penguasa akibat kelemahannya dalam menindak kemaksiatan yang merajalela, yang tidak bisa dihentikan oleh

Hisbah.

- 8- Perselisihan yang melibatkan dua pihak, yaitu penguasa dan rakyat.

Semua kezaliman ini bisa dihentikan dan pelakunya bisa dihukum. Jika terkait dengan hak anak Adam dan hak Allah, sebagaimana putra 'Amru bin al-Ash yang memukul lawanandingnya, maka 'Umar memerintahkan korbannya untuk membalas pukulannya. Ketika terkait dengan harta maka harta yang diambil penguasa, baik itu melalui korupsi, gratifikasi maupun yang lain, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu juga jika terkait dengan nyawa maka penguasa dan siapa saja yang terlibat dalam menghilangkan nyawa rakyatnya wajib dijatuhi hukuman *qishaash*.

Ini semuanya bisa diterapkan jika ada sistem Islam yang dilaksanakan secara *kaaffah*. Jika tidak ada maka kewajiban pertama adalah menegakkan sistem tersebut (yakni Khilafah Islam). Dengan itu semuanya itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. *WaLaahu a'lam.* □

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 80-83; Ibn Farkhun, *Tabshiratu al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyyah wa Manahij al-Ahkam*, Dar al-Qalam, Damaskus, cet. II, 1442 H/2021 M, Juz I, hal. 149-150; 'Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 253-258; al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. , hal.
- <sup>2</sup> 'Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 256.
- <sup>3</sup> Ibn Sa'ad, *at-Tabaqat al-Kubra*, Juz XV, hal. 220; 'Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 257.
- <sup>4</sup> Lihat, Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 80-83; 'Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 255-258.

# TRANSISI KEKUASAAN DALAM ISLAM

**Agus Suryana, S.S., M.Pd.**

Direktur Lingkar Studi Islam Strategis (LSIS)

**P**entingnya kekuasaan sangat disadari oleh Rasulullah saw. Oleh karena itulah, sejak awal, beliau berdoa kepada Allah SWT agar diberi kekuasaan (*sulthân*). Bukan sembarang kekuasaan. Namun, kekuasaan yang bisa menolong agama-Nya (*sulthân[an] nashîrâ*). Allah SWT berfirman:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar dan berilah aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." (QS al-Isra' [17]: 80).

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir *rahimahullâh*, dengan mengutip Qatadah ra., menyatakan: "Sungguh Nabi Muhammad saw. menyadari bahwa Beliau tidak punya daya/kekuatan untuk menegakkan agama ini (Islam), kecuali dengan kekuasaan. Oleh karena itulah, beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong Kitabullah (al-Quran), melaksanakan hudud Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah (Islam). Sungguh kekuasaan adalah

*rahmat yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Andai bukan karena kekuasaan tersebut, orang-orang bisa saling menyerang (menzalimi) satu sama lain sehingga pihak yang kuat bisa memangsa pihak yang lemah.*" (Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, 5/111).

Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dua fungsi kekuasaan yang utama. *Pertama*: Untuk menegakkan agama Islam. Inilah yang sekaligus menjadi motif utama Rasulullah saw. untuk meminta kekuasaan kepada Allah SWT. Faktanya, ketika pada akhirnya Rasulullah saw., benar-benar menjadi penguasa (kepala negara) Daulah Islam di Madinah, kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

*Kedua*: Untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan masyarakat. Tentu dengan menggunakan syariah Islam. Inilah yang juga dipraktikkan oleh Rasulullah saw. sebagai penguasa (kepala negara). Dengan itu, semua warga negara (Muslim maupun non-Muslim) terurus dan terayomi dengan baik. Tidak ada yang berani saling menzalimi. Tidak ada pihak yang kuat memangsa pihak yang lemah.

Kedua fungsi kekuasaan inilah yang

diwariskan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabat penggantinya (Khalifah) dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai para khalifah pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Transisi kekuasaan dari Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin hingga ke era Kekhilafahan Islam setelahnya relatif berlangsung dengan baik. Semua pihak, baik rakyat maupun penguasa, dalam posisi ikhlas dan ridha ketika memimpin ataupun dipimpin. Semuanya karena semata-mata komitmen pada penegakan agama Islam dan pengurusan berbagai urusan dan kepentingan masyarakat dengan syariah-Nya.

### Jaminan Stabilitas

Sistem Islam membangun paradigma dan pondasi kekuasaan dan pelaksanaan *ri'ayah* (pengurusan) masyarakat dengan sangat sempurna, elegan dan tidak menimbulkan resistensi dan iritasi pada rakyat dan penguasa berikutnya. Hal ini tentu akan menjadikan pelaksanaan roda pemerintahan akan berlangsung stabil. Jaminan stabilitas ini terjadi ketika sistem yang baik (syariah Islam) dikendalikan oleh penguasa yang baik (bertakwa). Dengan itu semua kebijakan penguasa berada dalam kontrol yang sama, yakni hukum syariah yang menjadikan setiap jengkal penyimpangan akan senantiasa diluruskan, dan kebaikan akan semakin kuat dan terjaga.

Dalam sistem apapun, guncangan, konflik, atau perbedaan pendapat pasti ada. Ruang tersebut dimungkinkan muncul karena kita sedang memimpin manusia. Mereka tentu memiliki beragam pendapat, keinginan dan harapan. Mereka juga adalah makhluk yang tidak luput dari dosa dan kesalahan.

Namun demikian, semuanya bisa reda, kemudian kembali stabil karena semua pihak tunduk pada hukum syariah yang menjadi panglima dalam mengatasi berbagai persoalan

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### Prinsip Penting Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam dapat tegak dengan paripurna dengan memegang teguh prinsip-prinsip sbb:

#### 1. *As-Siyaadah li asy-Syar'i.*

*As-Siyaadah* atau kedaulatan dalam Islam adalah di tangan syariah. Bukan di tangan umat. Dengan demikian yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syariah. Bukan individu itu sendiri dengan sesukanya. Berkaitan dengan kedaulatan ini, Allah SWT berfirman (yang artinya): *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, juga ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir (TQS an-Nisa' [4]: 59).*

Makna "*kembalikan ia kepada Allah dan Rasul-Nya*" adalah "*kembalikan pada syariah Islam*".

Dengan demikian yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu, serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu, adalah Syariah Islam.

#### 2. *As-Sulthaan li al-Ummah.*

Syariah telah menjadikan pemilihan dan pengangkatan khalifah adalah kewenangan umat. Dengan itu seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui baiat umat. Dalil bahwa syariah telah menjadikan pemilihan dan pengangkatan khalifah adalah dilakukan oleh umat tegas sekali di dalam hadis-hadis tentang baiat.

#### 3. *Hukum Syariah sebagai Patokan.*

Khalifah dalam sistem Khilafah dibaiat untuk melaksanakan semua hukum syariah

dalam semua aspek kehidupan (pendidikan, ekonomi, hukum, pergaulan, sosial budaya, pemerintahan, keamanan dalam dan luar negeri, dll). Dengan demikian semua kebijakan Khalifah bukan semata kebijakannya *an sich*, melainkan dipandu oleh al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber syariah Islam.

Dengan menjadikan hukum syariah sebagai standar atau patokan dalam pelaksanaan kekuasaan seorang khalifah akan tercegah dari melakukan tindakan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan), berbuat sewenang-wenang, menyelisihi syariah Islam, bahkan berbuat zalim pada rakyat.

Semua pihak bisa mengontrol pelaksanaan pemerintahan oleh khalifah dan jajarannya secara transparan dan terbuka. Jika ditemui penyimpangan akan segera diluruskan dengan mekanisme amar makruf nahi mungkar. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat yang melibatkan penguasa dan rakyat, maka mekanisme baku akan berjalan. Tidak lain dengan mengembalikan perbedaan dan perselisihan tersebut pada hukum syariah. Ini adalah solusi terbaik dan jalan keluar efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang diperselisihkan dan perdebatkan di tengah mereka (Lihat: Qs an-Nisa' [4]: 59).

#### 4. Kekuasaan adalah Amanah untuk Menegakkan Islam.

Kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangku di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi saw. bersabda,

«أَوَّلُ الْإِمَارَةِ مَلَامَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَعَدَلَ»

*Kepemimpinan itu awalnya bisa*

*mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat; kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil (HR Ath-Thabarani).*

Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi saw. mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Beliau bersabda:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

*Tidaklah seorang hamba—yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat—mati pada hari ia mati, sedangkan ia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya surga (HR al-Bukhari).*

Oleh karena itulah, kaum Muslim diperintahkan oleh Allah SWT agar memberikan amanah—terutama amanah kekuasaan—kepada orang yang benar-benar layak. Tentu layak berdasarkan kategori-kategori syariah. Di antara bukti kelayakannya adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariah Islam atas dirinya dan rakyatnya.

#### 5. Ketakwaan Rakyat dan Penguasa.

Rasulullah saw., sebagai kepala Negara Islam, senantiasa memilih dan mengangkat para pejabat yang paling istimewa dalam hal keimanan dan ketakwaannya, selain tentu yang dipandang paling mumpuni dalam hal profesionalitasnya. Contohnya, Abu Bakar ra. dan Umar bin al-Khaththab ra. Kedua Sahabat ini jelas tidak diragukan lagi dalam hal keimanan dan ketakwaannya. Keduanya diangkat oleh Rasulullah saw. sebagai pembantu beliau dalam urusan pemerintahan. Rasulullah saw. bersabda:

«وَزَيْرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجَبْرِئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا  
وَزَيْرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

*Pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail. Adapun pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar (HR at-Tirmidzi).*

Dalam Islam, meski penguasa dan pejabat adalah orang-orang pilihan, mereka tetap perlu senantiasa dibimbing dan diarahkan. Tentu agar mereka tidak melenceng dari syariat Islam. Tidak ada yang meragukan keimanan dan ketakwaan Sahabat Muadz bin Jabal ra., misalnya. Namun demikian, saat Rasulullah saw. memilih dan mengangkat Muadz ra. sebagai gubernur di Yaman, beliau tetap menasihati dirinya.

Pasca-Rasulullah saw. wafat, generasi Muslim awal (yakni generasi para sahabat) lalu memilih dan mengangkat penguasa/pemimpin terbaik di antara mereka. Terutama dalam hal keimanan dan ketakwaannya. Mereka berturut-turut adalah Abu Bakar ra., Umar bin al-Khaththab ra., Utsman bin Affan ra., dan Ali bin Abi Thalib ra. Mereka adalah para khalifah terbaik yang disebut sebagai khulafaurasyidin. Para khalifah ini juga memilih dan mengangkat para pejabat negara di bawahnya dari kalangan orang-orang terbaik dalam hal keimanan dan ketakwaan mereka.

#### 6. *Muhaasabah li al-Hukkaam.*

Dalam Islam, rakyat dan penguasa memiliki kedudukan yang sama di depan syariat. Jika terjadi perselisihan antara mereka, mereka harus tunduk pada hukum Allah SWT (syariah Islam) (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 59)

Kebijakan apa pun yang bertentangan dengan syariah adalah kezaliman, baik itu disukai ataupun dibenci rakyat. Ketika harga-harga melambung, para Sahabat mengusulkan kepada Rasulullah saw. untuk mematok harga

(*tas'ir*). Namun, beliau bersabda, "*Aku sungguh berharap kelak akan berjumpa dengan Allah dan tidak ada seseorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku perbuat kepada dirinya dalam perkara yang berkaitan dengan darah atau harta.*"

Rasulullah saw., telah menjadikan pematokan harga sebagai sebuah kezaliman. Padahal itu diusulkan/disukai masyarakat. Jika terjadi kebijakan zalim seperti itu, Rasul saw. pun telah menjadikan pemeriksaan atas perkara-perkara tersebut sebagai bagian dari kewenangan *Qâdhî Mazhâlim* yang akan menyelesaikan sengketa penguasa dengan rakyat berdasarkan syariah.

#### 7. *Mahkamah Mazhalim: Solusi Sengketa Penguasa-Rakyat*

Sebagai sistem pemerintahan yang paripurna, sistem Khilafah memiliki Mahkamah Mazhalim yang dipimpin oleh seorang Qâdhî Madzâlîm untuk menghilangkan kezaliman negara terhadap orang yang berada di bawah wilayah kekuasaannya, baik rakyat negara khilafah maupun bukan. Kezaliman tersebut dapat dilakukan sendiri oleh khalifah, pejabat negara maupun pegawai yang lain.

Tugas dan fungsi *Qâdhî Mazhalim* adalah menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Jika ini terkait dengan kebijakan, maka *Qâdhî Mazhalim* akan membatalkan kebijakan tersebut, seperti pajak, retribusi tol, dan sebagainya. Jika ini terkait dengan sikap atau tindakan semena-mena, maka *Qâdhî Mazhalim* juga akan menghentikan sikap dan tindakan tersebut. *Qâdhî Mazhalim* berhak memberhentikan pejabat, pegawai negara, bahkan khalifah jika harus diberhentikan, sebagaimana ketentuan hukum syariah. Demikian pula jika pengangkatan khalifah dianggap tidak sah, maka *Qâdhî Mazhalim* bisa menghentikan dirinya.

*WalLaahu a'lam. □*

## SEMANGAT DAKWAH

**K**adang seorang pengemban dakwah mengalami masa-masa *futur* (hilang semangat) dalam dakwah. Tentu banyak penyebabnya. Tentu banyak pula cara membangkitkan kembali semangat dakwah yang melemah, berkurang, bahkan mungkin sempat hilang. Salah satu caranya adalah dengan membaca dan merenungkan kembali kisah-kisah generasi salaf dalam hal semangat mereka mengemban dakwah—juga jihad fi sabillah—yang layak untuk selalu diingat. Berikut beberapa di antaranya:

*Mush'ab bin Umair ra.* Ia adalah salah satu Sahabat Nabi saw. yang memeluk Islam pada masa-masa awal. Ia dikenal sebagai pemuda kaya-raya dan dihormati di Makkah. Namun, setelah memeluk Islam, ia rela meninggalkan segala kemewahannya demi mengikuti ajaran Nabi saw. sekaligus mendakwahkan Islam. Ketika Nabi saw. mengutus dirinya ke Madinah untuk mendakwahkan Islam, ia dengan penuh semangat dan kesabaran mengajarkan Islam kepada penduduk Yatsrib (Madinah). Ia berhasil membawa banyak orang masuk Islam. Termasuk dua pemimpin besar suku Aus dan

Khazraj, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair (*Adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubalaa* (1/153-154).

*Bilal bin Rabah ra.* Ia adalah salah satu Sahabat Nabi saw. yang terkenal karena keimanannya yang kuat. Padahal ia menghadapi penyiksaan berat ketika awal-awal masuk Islam. Sebagai seorang budak, Bilal mengalami siksaan luar biasa dari majikannya, Umayyah bin Khalaf, yang berusaha memaksa dirinya untuk murtad dari Islam dan kembali menyembah berhala. Namun, ia tetap teguh dalam keimanannya meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan dipaksa terlentang di bawah terik matahari di padang pasir (*Adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubalaa*, 1/349-350).

*Sa'ad bin Abi Waqqash ra.* Ia adalah komandan Muslim yang memimpin pasukan dalam Penaklukan Persia, termasuk dalam pertempuran besar di Qadisiyyah. Kemenangan tersebut menjadi pintu gerbang penyebaran Islam di wilayah Persia, salah satu kerajaan terkuat pada masa itu. Keberanian dan kecerdasan Saad bin Abi Waqqash dalam strategi perang serta semangat dakwah yang tidak mengenal lelah membuat banyak penduduk Persia memeluk Islam (*Ath-Thabari, Taariikh ath-Thabari*, 3/211).

*Khalid bin al-Walid ra.* Ia dikenal dengan julukan *Sayfullaah al-Masluul* (Pedang Allah yang Terhunus). Ia adalah salah satu Sahabat Nabi saw. yang sangat berperan dalam kemenangan militer umat Islam. Setelah masuk Islam, Khalid menghabiskan hidupnya dengan berjihad di jalan Allah. Keahliannya dalam strategi perang membuat dirinya tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran, baik melawan Kekaisaran Romawi maupun Persia. Salah satu kisah penting Khalid adalah saat memimpin pertempuran Yarmuk melawan pasukan Romawi. Meski jumlah pasukannya jauh lebih sedikit, Khalid berhasil mengalahkan musuh dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di

wilayah Syam (Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina) (Ibnu A'tsir, *Al-Kaamil fii at-Taariikh*, 2/385).

*Abdullah bin Mas'ud ra.* Ia adalah Sahabat Nabi saw. pertama yang secara berani dan terang-terangan membacakan al-Quran di depan kaum Quraisy di Makkah meskipun hal ini mengundang bahaya besar bagi dirinya. Ia menjadi sosok yang gigih menyampaikan ajaran Islam meski harus menghadapi siksaan dan ancaman dari kaum Quraisy (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalaa'*, 1/463).

*Abu Ayyub al-Anshari ra.* Ia adalah seorang Sahabat yang dikenal karena kecintaannya kepada Rasulullah saw. serta perjuangannya di medan dakwah dan jihad. Meski usianya sudah lanjut, ia tetap mengikuti berbagai pertempuran dan ekspedisi untuk menyebarkan Islam. Pada masa Kekhalifahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub ikut dalam ekspedisi ke Konstantinopel, salah satu kota terkuat di Eropa pada masa itu. Ia meninggal dunia dalam perjalanan tersebut dan dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Kisah ini menunjukkan semangat dakwah dan jihad yang tak pernah padam. Bahkan sampai nafas terakhir (Lihat: Ibnu Katsir, *Al-Bidaayah wa an-Nihaayah*, 7/91).

*Al-Hasan al-Bashri.* Ia adalah salah satu *Taabi'iin* yang dikenal dengan keilmuan, ketakwaan dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa. Ia adalah tokoh yang lantang menyuarakan amar makruf nahi mungkar. Tidak peduli siapa pun yang ada di hadapannya. Salah satu kisah yang menggambarkan semangat dakwah al-Hasan al-Bashri adalah ketika ia menasihati Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang dikenal sangat kejam. Meskipun nyawanya terancam, al-Hasan tidak mundur sedikit pun dalam menyampaikan kebenaran (Abu Nu'aim al-Asbahani, *Hilyah al-Awliyaa'*, 2/131-132).

*Muhammad bin Qasim.* Ia adalah seorang pemimpin militer dari generasi *Taabi'iin* yang berhasil menaklukkan wilayah Sindh (kini Pakistan) pada masa Khilafah Umayyah. Meskipun usianya masih sangat muda, Muhammad bin Qasim memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan wilayah ini dengan strategi yang cemerlang dan semangat dakwah yang besar. Penaklukan Sindh membuka pintu bagi penyebaran Islam di anak benua India. Muhammad bin Qasim tidak hanya menaklukkan wilayah tersebut dengan kekuatan militer, tetapi juga menunjukkan sikap adil kepada penduduk setempat. Ia telah membuat banyak orang tertarik untuk masuk Islam (Al-Baladzuri, *Futuuh al-Buldaan*, hlm. 402).

*Imam Malik bin Anas.* Ia adalah salah satu ulama *Taabi' at-Taabi'iin* yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Imam Malik menyebarkan Islam dan Hadis Nabi saw. kepada ribuan murid dari berbagai penjuru dunia. Karya monumental beliau, *Al-Muwaththa'*, menjadi rujukan penting dalam ilmu fiqih dan hadis. Imam Malik memiliki semangat dakwah yang kuat dalam menyebarkan ilmu meskipun ia harus menghadapi banyak cobaan dari penguasa (Ibnu Abdil Barr, *At-Tamhiid*, 1/49-50).

*Sufyan ats-Tsauri.* Ia adalah seorang *Taabi' at-Taabi'iin* dan salah satu imam besar dalam bidang hadis. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat tegas dalam melawan kezaliman. Ia menolak untuk berkompromi dengan penguasa zalim. Ia lebih memilih menghindari dari penguasa zalim agar tidak diminta memberikan fatwa yang mendukung kezalimannya (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalaa'*, 7/252-256).

Tentu masih terlalu banyak kisah-kisah lainnya. Semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah untuk mengikuti jejak mereka dalam mendakwahkan Islam dengan penuh semangat dan ketulusan. □

*Wa maa tawfiiqii illaa billaah.* [Arief B. Iskandar]

# MENITI JEJAK RASULULLAH SAW SEBAGAI NEGARAWAN

*Irfan Abu Naveed, M.Pd.I*

Rasulullah saw. dikenal pula dengan nama *as-Sulthân*. Sebutan ini diperkenalkan oleh Syaikh 'Abdul Hayy al-Kattani (w. 1382 H) dalam *Nizhâm al-Hukûmah al-Idâriyyah* (1/21), dengan menukil keterangan al-Qadhi 'Iyadh bin Musa (w. 524 H) dalam Kitab *Asy-Syifâ'*. Ini menyiratkan kedudukan agung beliau sebagai seseorang yang me-*ri'âyah* umat dan menjadi perisai akidah bagi mereka. Demikian sebagaimana petunjuk Rasulullah saw. tentang tanggung jawab *al-sulthân* yang menjadi bagian dari aspek keteladanan beliau (lihat: QS al-Ahzab [33]: 21) dalam mengatur kehidupan bernegara, khususnya bagi mereka yang diamanahi jabatan kekuasaan.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam menuntun manusia dalam urusan kepemimpinan dan pengaturan aspek kehidupan bernegara. Islam sekaligus meruntuhkan sekularisme yang memarjinalkan Islam dalam pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Islam adalah Islam sebagaimana diajarkan dan diamalkan Rasulullah saw. Bukan Islam dengan embel-embel liberal dan moderat yang muncul pada akhir zaman tatkala fitnah para pemimpin yang sesat menyesatkan (*al-a'immah al-mudhillîn*) muncul ke permukaan.

Tinta emas sejarah mencatat Rasulullah saw. mengupayakan tegaknya Daulah Islamiyah di Yastrib (Madinah), lalu menegakkan *huduud*, membagikan *ghanîmah*, mewajibkan *jizyah* (bagi kafir *ahl al-dzimmah*), mengirim surat-surat kenegaraan berisi seruan dakwah kepada para penguasa berbagai

negara, mengangkat para wali, *qaadhi*, dan beragam aktivitas kenegaraan lainnya. Semua ini menunjukkan secara terang-benderang, *de jure* dan *de facto*, eksistensi Islam dalam mengatur urusan kekuasaan dan konsep bernegara, dengan wilayah kekuasaan dan perangkat kenegaraan yang paripurna.

Gambaran ini mengejawahtahkan Hadis Nabi saw. dari Hudzaifah ibn al-Yaman r.a.: Kami pernah duduk di masjid, kemudian Abu Tsa'labah al-Khasyani datang. Beliau bertanya, "Wahai Basyir bin Saad, apakah kamu hapal hadis Rasulullah saw. tentang para pemimpin (*al-umarâ'*)? Hudzaifah menjawab, "Aku hapal khutbah Baginda saw." Abu Tsa'labah pun duduk. Hudzaifah berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«تَكُونُ النَّبِيُّهُ فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ

تَمَّ يَرْفَعَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا»

*Akan ada era kenabian di antara kalian. Dengan kehendak Allah ia akan tetap ada. Kemudian Allah mengakhiri era itu ketika Dia menghendaki berakhir masanya (HR Ahmad dan al-Bazzar).*

*Manhaj* Kenabian dalam urusan kepemimpinan ini di antaranya tercakup dalam politik dalam negeri dan luar negeri sebagai berikut:

## 1. Politik dalam Negeri: Menegakkan Syariah Islam Sebagai Konstitusi Negara.

Karakteristik politik *syar'i* ini Allah tunjukkan dalam nas-nas al-Quran. Salah satunya adalah firman-Nya:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

*Demi Tuhanmu. Mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam diri mereka atas putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuh hati (QS al-Nisâ' [4]: 65).*

Maksud (*taqdir*) kata ganti (*dhamîr*) 'ka' dalam ayat ini adalah Rasulullah saw. yang berkedudukan sebagai seorang rasul sekaligus kepala negara yang menegakkan hukum untuk mengatasi perselisihan di antara manusia. Kalimat *fi mâ syajara baynahum*, merupakan bentuk kiasan (*al-isti'ârah*). Di sini Allah menggambarkan perselisihan di antara manusia seperti cabang-cabang pohon (*asy-syajarah*). Fungsi *tahkîm* dalam ayat yang agung ini secara terang-benderang menunjukkan Rasulullah saw. sebagai *al-hâkim* (penguasa), yakni Kepala Negara yang menghukumi manusia dengan wahyu-Nya (QS. Al-Najm [53]: 3-4). Ini diperjelas oleh Hadis Nabi saw. dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. Rasulullah saw. bersabda:

«أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ فَأَلِيمَامُ  
الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ»

*Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang kalian pimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR Muttafaqun 'alayhi).*

Saat menjelaskan hadis ini, Imam al-Baghawi

(w. 516 H) menuturkan: "*Pemeliharaan seorang al-Imam (Khalifah) adalah wilayah urusan-urusan rakyatnya, melindungi mereka, menegakkan sanksi-sanksi had, dan hukum-hukum bagi mereka.*" (Al-Baghawi, *Syarah as-Sunnah*, 10/61).

Kita mendapati riwayat Rasulullah saw. menegakkan sanksi *hudud* atas rakyatnya, juga mengatasi potensi perselisihan di antara masyarakat. Syariah Islam yang menjadi aturan dalam masyarakat mampu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini sejalan dengan prinsip Al-Qadhi Abu al-Baqâ' al-Hanafî (w. 1094 H) "*Politik adalah mewujudkan kemaslahatan bagi makhluk-Nya dengan menunjuki mereka ke jalan keselamatan di dunia dan akhirat.*" (Al-Qadhi Abu al-Baqâ' al-Hanafî, *Al-Kulliyât*, hlm. 510).

Keselamatan dunia dan akhirat adalah wujud hakiki dari kemaslahatan. Ini sejalan dengan kaidah *syar'iyah* dari al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H):

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan Imam (Khalifah) atas rakyat harus senantiasa diorientasikan untuk kemaslahatan mereka (As-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir, hlm. 121).*

Menariknya, al-Imam al-Syafi'i (w. 204 H) menyerupakan pengurusan rakyat dengan pengurusan anak yatim: "*Kedudukan imam atas rakyat adalah seperti kedudukan wali atas anak yatim.*"

Kemaslahatan dunia akhirat tak akan terwujud melainkan dengan menerapkan syaria Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ini sesuai dengan standar maslahat al-Imam Al-Syathibi: "*Berbagai kemaslahatan semata-mata dipahami berdasarkan apa yang Asy-Syari' tetapkan. Bukan berdasarkan apa yang dipahami mukallaf.*" (Asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât* (2/

373).

Maka dari itu, penguasa yang mengatur masyarakat dengan selain hukum syariah Islam adalah penguasa zalim. Dia akan dihisab dengan penghisaban yang berat. Ini ditegaskan Syihabuddin an-Nuwairi dengan menukil sebagian ahli hikmah yang berkata:

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَنَحْنُ رَعِيَّةٌ ۖ وَكُلُّ سَيَلْقَىٰ رَبَّهُ فَيحَاسِبُهُ

*Setiap diri kalian adalah penggembala dan kami adalah gembalaannya/Setiap orang akan berjumpa dengan Tuhannya hingga Dia menghisab dirinya (An-Nuwairi, Nihayat al-'Arab fii Funuun al-Adab, 6/34).*

## 2. Menegakkan Politik Luar Negeri: Dakwah dan Jihad.

Rasulullah saw. pun menegakkan politik

luar negeri (*as-siyâsah al-khârijiyyah*) dengan visi dakwah, menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjara dunia, aktivitas ini dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Kaisar Romawi, Kiswa Persia, Najasyi Habasyah adalah sederet penguasa yang pernah diseru oleh Rasulullah saw. untuk masuk Islam, atau tunduk pada kekuasaan Islam dengan menunaikan *jizyah*. Mereka juga dituntut tidak menghalangi dakwah Islam sampai kepada rakyat mereka. Rasulullah saw. pun tercatat mengukuhkan berbagai perjanjian lintas negara yang bisa dipastikan berorientasi pada kemaslahatan dakwah Islam dan kaum Muslim. Salah satunya Perjanjian Hudaibiyah.

Itu semua menunjukkan kebakuan politik dalam dan luar negeri Negara Islam, sejalan dengan hakikat *syar'i* Khilafah Islam. Ini sebagaimana diungkapkan al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H), digali dari nas-nas *syar'i*, bahwa Khilafah adalah "*Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.*"

Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini al-Syafi'i (w. 478 H) dalam *Chiyâts al-Umam* (1/22) menjelaskan, yakni mengemban dakwah dengan hujjah dan jihad.

Gambaran singkat politik dalam dan luar negeri Rasulullah saw. di atas menunjukkan eksistensi Rasulullah saw. sebagai negarawan unggul. Beliau adalah teladan bagi kaum Muslim, khususnya bagi mereka yang diamanahi jabatan kekuasaan. Jika tidak maka berlaku sabda beliau:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

*Siapa saja yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami maka amal perbuatan itu tertolak (HR Muslim dan Ahmad).*

*Wallâhu a'lam. []*

Maka dari itu, penguasa yang mengatur masyarakat dengan selain hukum syariah Islam adalah penguasa zalim. Dia akan dihisab dengan penghisaban yang berat. Ini ditegaskan Syihabuddin an-Nuwairi dengan menukil sebagian ahli hikmah yang berkata:

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَنَحْنُ رَعِيَّةٌ ۖ وَكُلُّ سَيَلْقَىٰ رَبَّهُ فَيحَاسِبُهُ

*Setiap diri kalian adalah penggembala dan kami adalah gembalaannya/Setiap orang akan berjumpa dengan Tuhannya hingga Dia menghisab dirinya (An-Nuwairi, Nihayat al-'Arab fii Funuun al-Adab, 6/34).*

# SEPUTAR DOA UNTUK KEHANCURAN YAHUDI

## Soal:

Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

*Jika hamba-hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang Aku, jawablah bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepada-Ku. Karena itu hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka mengimani Aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran (QS al-Baqarah [2]: 186).*

Berkaitan dengan ayat di atas, benarkah bahwa Allah menjawab semua doa orang? Adakah doa yang tidak dijawab oleh Allah? Sebagian orang bertanya, kita telah berdoa untuk Israel agar dihancurkan oleh Allah, tetapi mengapa mereka masih kuat dan terus menyerang Gaza?

## Jawab:

Ada sejumlah perkara yang wajib diketahui tentang doa. *Pertama:* Sesungguhnya seorang Mukmin, jika berdoa kepada Allah dengan kalbu yang jujur, juga dengan doa yang di dalamnya tidak ada pemutusan hubungan kekerabatan, maka Allah SWT menjawab doanya dengan satu dari tiga hal. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam di Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya:

Sungguh Allah SWT menjawab doa orang yang berdoa jika dia memohon kepada-Nya.

Allah SWT pun menjawab doa orang yang sedang dalam kesulitan jika dia berdoa kepada-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

*Tuhan kalian berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan dia kalian." (QS Ghafir [40]: 60).*

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

*Jika hamba-hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang Aku, jawablah bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepada-Ku (QS al-Baqarah [2]: 186).*

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

*Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan jika dia berdoa kepada-Nya, juga yang menghilangkan kesusahan (QS an-Naml [27]: 62).*

Hanya saja, jawaban (*al-ijābah*) untuk doa itu memiliki hakikat *syar'iyah* yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.:

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا فَطِيعَةٌ رَحِمَ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. قَالُوا: إِذَا نُكْثِرُ. قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ﴾

“Tidak ada seorang Muslim yang memohon kepada Allah ‘Azza wa Jalla dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan hubungan kekerabatan kecuali Allah memberi dia dengan doa itu satu dari tiga hal: disegerakan untuk dia pengabulan doanya; atau Allah menyimpan pengabulannya untuk dia di akhirat; atau Allah memalingkan dari dirinya keburukan yang semisalnya.” Mereka berkata, “Kalau begitu kita perbanyak (doanya).” Beliau bersabda, “Allah lebih perbanyak lagi (pengabulannya).” (HR Ahmad, 3/18).

Beliau pun bersabda:

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِيْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ  
رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا  
الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَثْوُلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ  
فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ  
الدُّعَاءَ»

“Doa seorang hamba senantiasa dijawab selama dia tidak memohon dengan dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan selama dia tidak terburu-buru”. Ditanyakan, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan terburu-buru itu?” Beliau bersabda, “Dia berkata, ‘Aku telah berdoa. Aku telah berdoa. Namun, aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku.’ Kemudian dia menjadi sedih karenanya dan meninggalkan doa.” (HR Muslim no. 4918).

Jadi kita tetap memohon kepada Allah SWT. Jika kita jujur, mukhlis dan taat, ketika itu kita yakin do akita akan diijabah dengan makna yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. tersebut.

*Kedua:* Doa itu, dalam semua keadaan, bukan metode *syar’i* untuk merealisasi tujuan.

Doa itu *manduub*. Namun, doa bukan metode untuk meraih kemenangan di medan perang, untuk menegakkan negara, dll. Rasul saw. pun tetap menyiapkan pasukan saat Perang Badar. Beliau mengatur para tentara pada tempatnya masing-masing. Beliau pun menyiapkan berbagai persiapan untuk mereka dengan persiapan yang baik untuk berperang. Beliau lalu masuk ke kemah untuk berdoa kepada Allah dan memperbanyak doa itu hingga Abu Bakar berkata kepada beliau, “Sebagian ini telah mencukupimu ya Rasulullah.” (*Sīrah Ibnu Hisyām*, 2/626).

Jadi doa tidak berarti meninggalkan untuk mengambil sebab. Doa itu melekat dengan usaha.

Karena itu siapa saja yang menginginkan Khilafah tegak Kembali, dia tak boleh mencukupkan diri dengan hanya berdoa kepada Allah SWT. Dia pun harus berjuang bersama para pejuang untuk mewujudkan tegaknya Kembali Khilafah. Dia pun berdoa memohon bantuan kepada Allah agar terwujudnya Khilafah disegerakan. Dia keras dalam berdoa dan ikhlas kepada Allah. Dia pun mengambil sebab-sebabnya.

Begitulah dalam semua kondisi. Seseorang mengikhlasakan amal karena Allah SWT. Dia membenarkan Rasulullah saw. Dia pun berdoa dan bersikeras dalam doa itu. Allah Maha Mendengar dan menjawab doa-doa hamba-Nya.

*Ketiga:* Kami telah menjawab pertanyaan semisal ini pada 4 Dzul Qa’dah 1432 H – 1 Oktober 2011. Di situ dinyatakan antara lain:

...Doa yang disertai dengan upaya mengambil sebab-sebabnya memiliki dampak pada hasil. Ini pula yang dulu terjadi dilakukan oleh Rasul saw. dan para Sahabat beliau *radhiyallāh ‘anhum*. Rasul saw. menyiapkan pasukan. Lalu masuk ke kemah

untuk berdoa kepada Allah. Kaum Muslim di dalam Perang al-Qadisiyah juga menyiapkan persiapan untuk menyeberangi sungai. Lalu Saad bin Abi Waqash ra. menghadap kepada Allah SWT sembari berdoa kepada-Nya...Begitulah kaum Mukmin yang benar. Mereka menyiapkan sejumlah persiapan dan bersegera berdoa.

Karena itu orang itu harus berupaya mencari rezeki dengan sungguh-sungguh dan kelelahan sembari berdoa kepada Allah. Seorang pelajar harus belajar dengan bersungguh-sungguh sembari dia juga berdoa kepada Allah SWT agar berhasil. Hal itu akan memiliki dampak dalam hasil-hasilnya, atas izin Allah.

Di dalam Kitab *Mafaahim*, pada akhir halaman 58, dinyatakan: *Hanya saja wajib diketahui bahwa meski aktivitas yang ditunjukkan oleh thariiqah itu merupakan aktivitas fisik yang memiliki hasil-hasil yang dapat diindera, aktivitas itu harus dijalankan sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dari pelaksanaan yang sesuai perintah dan larangan Allah itu harus dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah. Sebagaimana kesadaran hubungan dengan Allah wajib mendominasi seorang Muslim sehingga ia mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan shalat, berdoa, membaca al-Quran dan lainnya. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa kemenangan itu berasal dari sisi Allah. Oleh karena itu ketakwaan harus tertanam kuat di dada untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Dia juga harus berdoa dan mengingat (berzikir) kepada Allah. Dia pun harus terus-menerus menjaga hubungan dengan Allah pada saat melakukan semua aktivitas.*

Dari situ jelas pentingnya mengaitkan doa dengan mengambil sebab pada semua aktivitas seorang Mukmin. Pentingnya hal

itu makin ditambah oleh pengulangan kata “*lâ budda* (harus)” untuk menunjukkan betapa sangat pentingnya mengaitkan seluruh aktivitas dengan doa dan kekontinuan hubungan dengan Allah.

Penggunaan doa disertai mengambil sebab adalah, seperti yang kami katakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul saw. dan para Sahabat beliau *radhiyallâh ‘anhum* dan kaum Mukmin. Doa dan mengambil sebab itu, jika dikaitkan satu sama lain, memiliki dampak dalam hasil-hasil yang diperoleh, atas izin Allah. Penggunaan keduanya bersama-sama tidak menyalahi *thariiqah* Islam. Akan tetapi, yang menyalahi *thariiqah* Islam itu adalah membatasi hanya dengan berdoa saja tanpa mengambil *thariiqah* yang dijelaskan oleh nas-nas untuk menerapkan fikrah Islamiyah...

Oleh karena itu, apa yang ada di dalam pertanyaan di atas, yaitu tentang doa untuk kehancuran entitas Yahudi, jelas tidak cukup hanya dengan berdoa saja, tetapi harus dikaitkan dengan adanya pasukan negara yang memerangi Yahudi bersama dengan doa. Ini sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabat beliau *ridhwanullâh ‘alayhim*.

*Wallâhu Musta’ân. Wallâh a’lam wa ahkam. []*  
*[Dikutip dari Jawab Soal asy-Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasyah tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 H - 07 Oktober 2024 M]*

#### Sumber:

<https://hibz-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/98093.html>

<https://www.facebook.com/AtaAbuAlrashtah.A.HT/posts/122125130186447297>

# Langkah Yang Menyelamatkan Umat Manusia 134 Tahun Lalu: Vaksin Rabies

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/134-yil-once-insanligi-kurtaran-adim-kuduz-asisi>



Secara khusus, penyakit menular yang disebut antraks (antraks), yang terjadi pada sapi dan domba, dapat diatasi dengan teknik vaksin yang dikembangkannya.



Ahli mikrobiologi dan kimia Perancis Louis Pasteur , yang menjadi terkenal karena penemuan vaksin antraks dan rabies, mengubah kehidupan umat manusia. Vaksin rabies yang ditemukan Pasteur pertama kali diberikan kepada manusia. Secara khusus, penyakit menular yang disebut antraks (antraks), yang terjadi pada sapi dan domba, dapat diatasi dengan teknik vaksin yang dikembangkannya.

Setelah Pasteur memperkenalkan vaksin rabies pada tahun 1885, Sultan Abdülhamid Khan II segera mengambil tindakan untuk membuka Rumah Sakit Rabies (Pusat Perawatan Dârü'Kelb ) di Istanbul dan rumah sakit tersebut dibangun dalam waktu 2 tahun.



Hüseyin Remzi Bey (1839-1896) Pada tahun 1886, hanya satu tahun setelah penemuan vaksin rabies, ia dikirim ke Paris bersama Zoiros Pasha dan Dokter Hewan Hüseyin Hulki Bey dan magang di Institut Pasteur.



Sepulang dari sana, mereka bekerja di Rumah Sakit Rabies. Penelitian yang dia lakukan dengan Pasteur segera membuahkan hasil, dan Hüseyin Remzi Bey menulis sebuah buku berjudul Vaksin Rabies pada tahun 1888-89, menjelaskan apa yang dia lihat di Paris dan memberikan informasi ilmiah pertama tentang vaksin di Turki Utsmani.

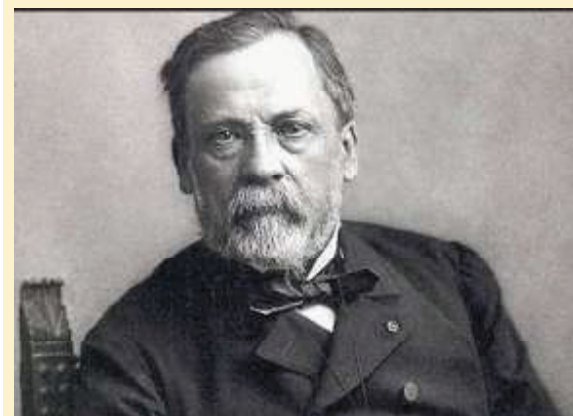


Menurut tulisan Hüseyin Remzi Bey, pada pertemuan pertamanya dengan Pasteur, hadiah 10 ribu franc emas yang dikirim oleh Sultan Abdülhamid Khan atas nama Institut Pasteur

dan Medali Mecidi serta medali yang diberikan kepada Pasteur diberikan kepada ilmuwan terkenal tersebut. Pasteur juga menyambut tamu Ottomannya dengan sangat baik.

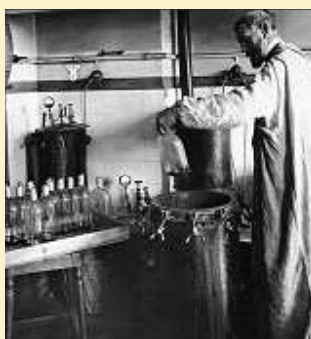


Karya Hüseyin Remzi Bey yang dianggap cukup "awal" ini diterbitkan sebelum buku menantu Pasteur, Rene Vallery-Radot. Menurut informasi yang diberikan oleh Süheyl Ünver, karya tersebut mempunyai judul "studi pertama" tentang Pasteur yang diterbitkan seumur hidupnya.



Keterarikan Sultan Abdulhamid II Khan pada bidang kedokteran tidak terbatas pada Pasteur; Dr. Robert Koch yang menemukan mikroba tuberkulosis dan obat tuberkulin. Di antara orang pertama yang mengetuk pintu Robert Koch adalah para dokter Ottoman yang dikirim oleh Sultan. Kali ini delegasi dikirim ke Berlin ke Koch; Hüseyin Hulki Bey, salah satu guru Fakultas Kedokteran Militer, juga hadir. Dalam bukunya Berlin Memories (1889), Hulki Bey juga menggambarkan percakapannya dengan Koch, perkataan Koch tentang hubungan antara kusta dan tuberkulosis, serta berbagai pusat kesehatan dan dokter yang mereka kunjungi di Berlin.

Metode vaksinasi dikembangkan sebagai hasil kerja sama Pasteur dengan Pierre Paul Émile Roux untuk mencegah penyakit . Pasteur mencoba metode ini pada kelinci. Dia kemudian bereksperimen dengan 11 anjing untuk menyelidiki efek vaksin terhadap rabies. Pada tanggal 6 Juli 1885, ia memberikan vaksin rabies kepada Joseph Meister yang berusia 9 tahun, yang telah digigit anjing gila.



Pasteur tidak hanya melanjutkan kiprahnya di bidang ini. Ini mencegah penyakit sepatu hitam, yang menginfeksi ulat sutera di Perancis

selatan dan membahayakan industri. Ia menemukan mikroba antraks yang menyebabkan kematian hewan seperti domba dan sapi, serta vaksin yang mencegah penyakit tersebut. Kiprahnya dalam mencegah bahaya gangren merupakan salah satu dari sekian banyak prestasinya di bidang kedokteran yang patut dikenang.



# LINTAS DUNIA

## Partai Iran di Libanon Tidak Miliki Mentalitas Berpikir Sehat

Terkait ledakan ribuan perangkat komunikasi nirkabel (*pager*) yang meledak dua hari berturut-turut yang menyebabkan 40 orang tewas dan tiga ribu luka-luka, situs *Hizb-ut-tahrir.info* menyatakan partai Iran di Libanon (Hizbullah) tidak memiliki mentalitas berpikir sehat.

“Yang menarik di sini adalah bahwa partai Iran di Libanon tidak memiliki mentalitas berpikir yang sehat,” tulis situs tersebut, Jumat (20/9/2024).

Menurutnya, jika berperang dengan entitas Yahudi, maka harus berhati-hati dalam segala hal. Jika membeli perangkat tersebut, maka harus memeriksanya dan memastikan bahwa perangkat tersebut aman dan bebas dari risiko apa pun.

Namun, itu tidak dilakukan sehingga terjadi ledakan pertama. Namun, ketika terjadi ledakan pertama anehnya malah tidak menginstruksikan anggotanya untuk segera meninggalkan perangkat tersebut, serta menempatkannya jauh dari mereka dan tempat-tempat mereka berada.

“Namun dia bersikap keras terhadap rakyat Suriah yang tidak bersalah dengan cara yang sederhana, karena dia ikut serta dalam

pembunuhan ratusan ribu orang, bersama dengan Iran, rezim Suriah, dan juga Rusia,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebanyak lima ribu *pager* berjenis AP924 produksi perusahaan Taiwan Gold Apollo yang digunakan sebagai alat komunikasi kelompok Hizbullah meledak dua hari berturut-turut pada 17 dan 18 September 2024 di Libanon dan Suriah yang menyebabkan lebih dari 40 orang tewas dan lebih dari 3 ribu orang luka-luka.

Puluhan rumah terbakar akibat ledakan alat-alat yang ada di dalamnya. Ledakan juga terjadi pada mobil dan sepeda motor yang pemiliknya membawa alat tersebut. Dikatakan bahwa alat komunikasi tersebut berisi bahan peledak, yang dibeli oleh partai Iran Libanon 5 bulan sebelumnya.

Namun, Gold Apollo, yang berbasis di Taiwan, menyatakan tidak memproduksi perangkat yang digunakan dalam serangan tersebut, dan BAC Consulting perusahaan yang berbasis di Budapest, Hongaria, memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagangnya.

Entitas Yahudi tidak secara resmi mengaku bertanggung jawab atas pemboman ini. Namun, sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa mereka akan melakukan perang jenis lain di utara. Menteri Pertahanan entitas Yahudi Yoav Galant mengatakan, pada tanggal 18 September 2024, “Israel sedang mengalami awal fase baru perang,” dan menunjukkan bahwa “Pusat gravitasi bergeser ke utara melalui pemindahan sumber daya dan kekuatan.” []

## Maher al-Jazi Digelari Singa dari Yordania

Syahidnya sopir truk Maher al-Jazi (insya Allah) setelah berhasil membunuh tiga petugas penjaga berbatasan Yahudi di Penyebrangan Allenby (Jembatan Raja Hussein) perbatasan Yordania-Palestina yang diduduki Zionis, menuai pujian dari berbagai pihak pro Palestina, tidak terkecuali dari situs *Pal-tahrir.info* dengan memuji

dia sebagai Singa dari Yordania.

“Hari ini, singa dari Yordania telah pergi. Senjatanya adalah lidahnya yang dia gunakan untuk berbicara. Pelurunya adalah suaranya yang dia gunakan untuk berteriak. Pada setiap tembakan mengatakan bahwa rakyat Yordania sedang menderita oleh segala sesuatu yang menimpa rakyat Palestina, baik itu di Gaza yang terluka, atau Tepi Barat yang berdarah, sebab rakyat Palestina dan rakyat Yordania adalah bagian dari daging yang sama, bernama umat Islam,” tulis situs tersebut *Pal-tahrir.info*, Ahad (8/9/2024).

Situs tersebut menyatakan, sungguh sedih rasanya melihat seorang anak menangis di pangkuan saudaranya, yang terus menangis memanggil nama ibunya, air matanya berjatuh-bagaikan api di hati putra-putra umat hingga darah mendidih di urat nadi orang-orang Yordania, Syam, Irak, dan Mesir.

“Ini adalah umat yang sedang mendidih. Situasinya diungkapkan oleh sang syahid Maher al-Jazi, yang menerobos penghalang yang menghalanginya untuk menolong saudaranya dan menolong Masjidil Aqsha,” jelasnya.

Media lokal bergegas memverifikasi identitas, asal-usul dan asal-usul martir Yordania tersebut. Data menunjukkan bahwa nama pelaku adalah Maher Dhiyab Hussein al-Jazi al-Huwaitat yang berusia (39 tahun).

Setelah memeriksa akun tidak resmi, ia digambarkan sebagai seorang pensiunan atau perwira yang diberhentikan dari Kepolisian Kerajaan Yordania. Dia tinggal bersama ibunya di daerah Al-Hussainiya di dekat kota Ma’an di selatan negara itu. Sebelum melakukan jihad, Al-Jazi menulis: *“Kepada Ibu dan Ayah tercinta, maafkan dan ridhailah saya, karena saya, insya Allah, menjadi syahid. Alhamdulillah.” Saya tidak ingin kalian mengingat saya, tetapi ingatlah tindakan saya. Semoga ini menjadi kenangan abadi dan dorongan bagi putra-putri bangsa Arab dan khususnya putra-putri Yordania untuk mengambil sikap melawan penjajah Zionis yang*

*telah melakukan pembantaian mengerikan terhadap saudara-saudara, anak-anak, dan perempuan kita di Gaza dan Palestina. Saudara-saudaraku, jika kalian tidak memiliki agama, maka setidaknya milikilah rasa malu dan harga diri... Saudaramu, Maher Diab al-Jazi.”* []

## Konferensi Madrid II, Cerminan Ketidakberdayaan?

Konferensi Madrid II yang menyerukan solusi dua negara di tengah gencarnya genosida di Gaza seolah menunjukkan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab tidak berdaya di hadapan entitas penjajah Zionis Yahudi.

“Entitas Yahudi tidak memperhatikan mereka, bahkan tidak peduli sama sekali dengan konferensi mereka, karena mereka tampak seperti bangsa yang tidak berdaya atau seolah-olah sedang memohon kepada musuh, padahal sebenarnya mereka mampu menghalanginya,” tulis *Alraiah.net*, 18/9/2024.

*Alraiah.net* optimis, sebenarnya negara-negara yang ada di negeri-negeri kaum Muslim memiliki kekuatan yang mampu menghentikan genosida, serta mengusir dan mengalahkan musuh, bahkan mencabutnya hingga ke akar-akarnya.

“Namun rezim-rezim ini secara terbuka dan jelas terlibat dalam kejahatan ini. Mereka adalah mitra musuh dalam genosida ini, dan mereka menyerukan perdamaian dengannya,” ungkapnya.

Ironisnya, sebut situs tersebut, mereka menegaskan perampasan Palestina oleh entitas Yahudi. Namun, mereka menyerukan solusi dua negara. Padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah solusi yang telah berakhir dan dikuburkan oleh entitas Yahudi di pasir Gaza, yang secara resmi diumumkan di parlemennya, Knesset, bahwa entitas Yahudi menolak dengan tegas terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina. []

# MENANAMKAN KEBANGGAAN SEBAGAI MUSLIM PADA ANAK

Arini Retnaningsih

**E**uforia menyambut kedatangan Paus di Indonesia beberapa waktu lalu dirasakan juga oleh anak-anak dan remaja kita. Apalagi memang momen ini ditayangkan di semua media massa dan menjadi trending di media sosial. Masalahnya, opini yang lantas tersebar adalah betapa santun dan sederhananya Sang Paus. Betapa juga beberapa tokoh Muslim begitu memuliakan dia. Gambaran yang tampak begitu harmonis.

Boleh jadi hal ini akan menyihir anak-anak kita, lantas menjungkirbalikan akidah yang sudah kita tanam selama ini. Padahal, permasalahan yang ada tidak bisa dilihat secara hitam putih sebagaimana yang ditampilkan dan diopinikan.

Anak-anak dan remaja, dengan keterbatasan maklumat yang mereka miliki, cenderung akan lebih mudah menelan informasi apa saja yang mereka lihat dan mereka dengar. Tanpa filter yang cukup. Ini sangat berbahaya sehingga orangtua harus meluruskannya. Namun, bagaimana jika yang tampil mempropagandakan kesalahan justru tokoh-tokoh muslim yang dianggap ulama?

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, setelah kedatangan Paus, dalam Seminar Nasional yang mengusung tema “Agama dan Kemanusiaan, Lintas Keyakinan Menuju

Persaudaraan Sejati” di Kampus Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Rabu (28/8/2024) mengatakan, “Sudah waktunya kita membangun kebersamaan yang hakiki, (karena) kita semua sama.” (*Istiqlal.or.id*, 28/08/2024).

Benarkah semua agama sama? Tentu tidak. Namun menyampaikan hal itu kepada anak di tengah gencarnya arus moderasi bukan perkara mudah bagi ayah dan bunda. Apalagi moderasi beragama sudah resmi masuk dalam kurikulum pendidikan agama, dari TK sampai perguruan tinggi.

Dari TK? Benar. Saat ini anak-anak TK sudah dikenalkan dengan berbagai agama, tempat ibadah dan hari raya mereka. Bahkan ada TK yang melabeli diri dengan TK Islam, mengajak para siswa untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah agama lain (<https://www.youtube.com/shorts/nSi4-1YV6iw>). Kalau kita *browsing*, agenda semacam ini ternyata banyak dilakukan sekolah-sekolah lain; dari SD, SMP dan SMA, bahkan mahasiswa di perguruan tinggi. Yang memprihatinkan, ternyata ada juga orangtua yang setuju, bahkan mendukung acara seperti ini.

Inilah ajaran moderasi beragama, yang menganggap bahwa semua agama adalah sama. Tidak boleh ada yang mengklaim kebenaran. Bahkan antar umat beragama harus saling toleransi dengan saling membantu

perayaan hari besar agama lain, juga saling bekerjasama dan saling berkasih sayang.

Jika jiwa moderasi ini terbentuk pada anak-anak kita, mereka tidak akan berpegang teguh lagi pada Islam. Murtad dan menikah dengan pemeluk agama lain menjadi hal yang tidak dianggap salah. Kalaupun bertahan dengan keislamannya, anak akan meninggalkan banyak ajaran Islam yang dia anggap terlalu ekstrem dan radikal.

Lantas apa yang bisa ayah dan bunda lakukan? Tips di bawah ini semoga bisa membantu.

### 1. Membangun Kepercayaan Anak pada Orangtua.

Berhadapan dengan pengajaran yang disampaikan guru, tentu bukan hal yang mudah bagi ayah bunda untuk mendapat kepercayaan anak. Biasanya, anak lebih percaya kepada guru daripada orangtua. Maka dari itu, kunci menanamkan pemahaman yang lurus pada anak adalah membangun rasa percaya anak pada orangtuanya.

Orangtua, dari awal kehidupan anak, harus membangun kepercayaan ini. Jangan pernah sekali-kali berbohong kepada anak atau menjawab pertanyaan anak secara asal-asalan. Benar. Anak-anak suka menanyakan hal-hal yang sulit dan kadang di luar nalar. Rasa ingin tahu mereka begitu besar. Dalam menghadapi anak-anak seperti ini, orangtua perlu banyak membaca dan mencari tahu agar tidak menjawab salah. Bila memang belum tahu, jangan segan mengakuinya.

“Maaf sayang, pertanyaanmu luar biasa. Ayah-Bunda tidak terpikir ke sana. Ayo kita cari bersama ya jawabannya.”

Sikap seperti ini akan membuat anak tahu, ayah-bundanya selalu berusaha menjawab dengan benar. Beda halnya kalau kita jawab asal. Suatu saat anak akan tahu kesalahan jawaban kita, dan itu membuat mereka tidak

percaya. Apalagi kalau mereka tahu orangtuanya suka berbohong dalam menjawab.

Bila kepercayaan ini telah terbentuk, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengajak mereka bicara memberi masukan dan pemahaman.

### 2. Ajak anak Berpikir sesuai Tingkat Umur dan Akalnya.

Dari awal kita harus sering mengajak anak berdiskusi. Ayah-Bunda bisa menunjukkan langsung ayat dan hadis untuk memperkuat argumen kita sehingga anak tahu persis bahwa standar kebenaran adalah al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Semakin anak bertambah umur, tunjukkan buku-buku referensi yang bisa ia baca.

Terkait dengan pendapat semua agama sama, Ayah-Bunda bisa menjelaskan konsep ketuhanan Islam yang hanya mengenal Allah sebagai satu-satunya tuhan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak sama wujud-Nya dengan manusia. Bahkan manusia tidak mampu melihat wujud-Nya. Manusia hanya bisa melihat tanda-tanda kebesaran-Nya.

Coba kita bandingkan dengan agama Nasrani yang menganut trinitas. Tuhan mereka beranak Yesus. Yesus adalah tuhan yang dilahirkan oleh perawan Maria. Bagaimana bisa tuhan kita dianggap sama dengan tuhan mereka yang melahirkan dan dilahirkan?

Anak yang telah mampu berpikir bisa kita ajak juga untuk menelaah kitab Sirah Rasulullah saw. Bagaimana Rasulullah saw. berkomitmen melindungi agama-agama lain, namun beliau tidak mengakui kebenarannya. Beliau berdialog dengan mereka dalam rangka mengajak mereka masuk Islam tanpa memaksa mereka dan tidak berkompromi dengan keyakinan mereka. Rasulullah saw. juga mengirim surat kepada para penguasa di sekitar

Arab, mengajak mereka masuk Islam. Bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah saw. sama sekali tidak mengajarkan semua agama sama, lantas membebaskan mereka memeluk agama apa saja.

### 3. Selalu menjalin komunikasi dengan anak dan membilas pemahamannya.

Bila anak sudah percaya dengan Ayah-Bunda, anak kita biasakan untuk menceritakan pelajaran-pelajaran yang didapatnya di sekolah. Mana yang harus kita luruskan dan mana yang harus kita bilas. Anak juga selalu kita ajak untuk berdiskusi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti kunjungan Paus ke Indonesia dan dampaknya terhadap umat.

Hal ini akan terasa lebih berat bagi Ayah-Bunda yang anak-anaknya belajar di sekolah negeri atau madrasah dan sekolah Islam, tetapi mengambil kurikulum dari Kemendikbud dan Kemenag. Namun, inilah perjuangan orangtua untuk menjaga kelurusan aqidah anak agar tidak rusak oleh moderasi. Allah SWT telah membebaskan kelurusan aqidah anak ini pada orangtua dengan firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (QS at Tahrim [66]: 6).*

### 4. Sampaikan konsep toleransi yang benar dalam Islam.

Islam menerapkan batasan-batasan toleransi dalam kehidupan sebagai berikut:

*Pertama*, seorang Muslim wajib menyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, sedangkan di luar Islam salah (kufur). Tidak ada toleransi, kompromi dan pengakuan atas klaim kebenaran agama selain Islam (Lihat: QS

Ali Imran [3]: 85).

*Kedua*, dalam urusan ibadah, pernikahan, makanan, minuman dan pakaian, orang kafir dibiarkan melakukan semua itu sesuai agama mereka. Mereka tidak dipaksa meninggalkan peribadahan, tatacara pernikahan dan urusan-urusan privat mereka. Sebagaimana saat menaklukkan Mesir, para Sahabat menyaksikan dan membiarkan kaum kafir minum khamr dan beribadah menurut agama mereka.

Hanya saja, seorang Muslim dilarang melibatkan diri dalam peribadahan orang kafir dengan alasan toleransi. Imam Ahmad menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar ra., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

*Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka (HR Ahmad).*

Dari 'Atha' bin Dinar bahwa Umar ra. pernah berkata, "*Janganlah kalian masuk ke gereja-gereja orang-orang musyrik pada hari raya mereka. Sungguh murka Allah SWT turun kepada mereka pada hari itu.*" (HR al-Baihaqi).

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Kaum Muslim haram merayakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum Muslim juga haram memasuki gereja dan tempat-tempat ibadah mereka." (*Iqtidhâ' ash-Shirâth al-Mustaqîm*, hlm. 201).

Adapun dalam muamalah, seorang Muslim boleh bermuamalah dengan orang kafir, asalkan sejalan dengan syariah Islam. Seorang Muslim juga tidak dilarang menjalin hubungan baik, berteman, berjual beli atau melakukan interaksi-interaksi sosial positif dengan orang kafir.

Kita perlu juga mengajak anak melihat penerapan Islam dalam sejarah. Bagaimana Islam benar-benar membuktikan bahwa berbagai agama bisa menyatu di bawah Negara Islam. Hal ini diakui juga oleh para sejarawan

Barat non-Muslim. Max I. Dimon, telah melukiskan kerukunan hidup antarumat beragama di Spanyol selama 500 tahun di bawah naungan Negara Islam. Bahkan Maria Rosa Menocal (2006), seorang intelektual Barat, menyebut Andalusia sebagai sepotong surga karena tiga agama besar: Islam, Nasrani dan Yahudi bisa hidup berdampingan secara damai.

5. *Penyampaian kepada anak menggunakan bahasa yang mudah dipahami.*

Dalam berdiskusi dengan anak, kita harus memperhatikan teknik komunikasi dan bahasa yang sesuai tingkat pemikiran anak. Orangtua sebaiknya menghindari diri dari sikap seolah paling tahu, tidak mau dibantah atau sikap-sikap buruk lainnya. Bila anak terlihat menolak yang kita sampaikan, kita bisa ajak anak untuk melihat referensi langsung dari al-Quran, al-Hadis atau kitab-kitab ulama yang terpercaya.

6. *Ajarkan anak untuk istiqamah dalam keyakinan.*

Boleh jadi anak akan berhadapan dengan sistem pendidikan yang bertentangan dengan nuraninya. Maka dari itu kita perlu mengenalkan pada anak sampai batas mana ia boleh mengikuti pendapat gurunya dan mana yang tidak boleh. Misal anak diajak mengikuti kunjungan ke tempat ibadah agama lain. Anak kita, kita ajari untuk menolak menggunakan argumentasi yang kuat dari dalil-dalil syariah.

7. *Senantiasa mengajarkan Islam kaaffah pada anak*

Sebenarnya merupakan tugas dari seluruh pihak yang terkait dengan anak, baik orangtua, guru, berbagai lembaga dan media massa, untuk mengajarkan pada anak tentang Islam kaaffah. Minimal orangtua harus mengupayakan. Menanamkan aqidah yang

lurus dan membentuk kepribadian Islam. Mengajarkan bahwa makna toleransi adalah “*lakum diinukum waliya ad-diin*”. Mengajarkan untuk menerima pluralitas, tetapi menolak pluralisme. Mengajarkan untuk menerima Islam secara keseluruhan dan memperjuangkannya, bukan menerima sebagian dan menolak sebagiannya.

Anak-anak yang dididik dengan Islam kaaffah seperti ini akan menjadi anak-anak yang shalih dan memiliki keimanan yang lurus.

Tak perlu takut anak-anak menjadi radikal dengan menjalankan Islam secara kaaffah. Justru inilah yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran (QS Ali Imran [3]: 110).

8. *Terakhir, sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah saw.:*

«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»

*Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya (HR ad-Daruquthni).*

Kebanggaan sebagai seorang Muslim harus kita tanamkan pada anak. Sebabnya, Islamlah satu-satunya agama yang benar dari Allah. Karena itu tidak selayaknya seorang Muslim merendahkan diri di hadapan non-Muslim atau memuliakan orang non-Muslim sedemikian rupa seolah ia layak menjadi teladan bagi umat Muslim. Sungguh terbalik. Inilah yang diinginkan non-Muslim dengan program moderasi beragama yang mereka cangkokkan ke tubuh umat.

Ini tugas berat, namun akan menentukan masa depan Islam dan membuktikan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*

H. M. Ismail Yusanto:

# PENTING MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN ISLAM



## Pengantar:

Rezim Jokowi sudah berakhir. Penggantinya, rezim baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Setiap muncul rezim baru, biasanya juga muncul harapan baru. Termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertanyaannya: Mungkinkah rezim baru membawa harapan baru? Apakah rezim baru mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Bagaimana dengan sejumlah persoalan berat dan kompleks yang diwariskan oleh rezim lama kepada rezim baru ini? Apakah semuanya bisa diatasi? Ataukah justru rezim baru bakal gagal sebagaimana rezim lama? Jika demikian, apa sesungguhnya akar persoalan bangsa ini? Bagaimana pula solusi fundamental dan tepat untuk mengatasi ragam persoalan yang berat dan kompleks yang dihadapi bangsa ini?

Itulah di antara sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh *Redaksi* kepada **Ustadz H.M. Ismail Yusanto** dalam rubrik *Hiwar* kali ini. Berikut wawancara lengkapnya:

## Ustadz, pemerintahan baru sudah dilantik. Banyak yang “menggantung” harapan. Apakah akan terjadi perbaikan di tengah warisan beban rezim sebelumnya?

Wajar publik menaruh harapan besar kepada rezim yang baru. Pasalnya, selama 10 tahun mereka hidup di bawah rezim yang banyak sekali melahirkan kebijakan yang sangat kontroversial. Di bidang politik berupa

kekacauan etika politik. Di bidang ekonomi dan hukum seperti lahirnya UU Minerba 2020, UU Ciptakerja, UU KPK yang secara total memperlemah institusi yang semula sangat diharap bisa memberantas korupsi. Demikian pula di bidang sosial-budaya dan pendidikan. Apakah harapan besar itu akan benar terpenuhi? Waktulah yang akan menentukan.

## Pertumbuhan ekonomi terbaca

**menurun. Daya beli Masyarakat juga menurun. Apakah dengan planning “paket ekonomi” yang diluncurkan oleh rezim baru akan mendongkrak itu semua?**

Bisa iya, bisa tidak. Soalnya, ekonomi domestik negeri kita ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang tidak kunjung membaik. Menyusul Perang Rusia – Ukraina. Apalagi ditambah perang di Timur Tengah yang sekarang makin membara. Semua itu, membuat kinerja ekspor khususnya barang manufaktur merosot tajam. Apalagi dengan serbuan barang murah dari Cina. Ini makin membuat industri dalam negeri sempoyongan. Jika situasi ini terus berlanjut, keadaan ekonomi bukan membaik, tetapi malah bisa makin memburuk.

**Rezim lama mengagungkan pendapatan negara dari sektor pajak sukses mencapai target. Bahkan ada yang melampaui target. Apakah sikon ini baik untuk ekonomi ataukah justru sebaliknya?**

Dalam perspektif ekonomi liberal, naiknya pendapatan pajak adalah sebuah kebaikan. Hal itu berarti akan meningkatkan pendapatan negara. Ini amat diperlukan dalam pembiayaan pembangunan. Namun, banyaknya pungutan pajak, utamanya bagi masyarakat menengah bawah, tentu akan menjadi beban, juga akan makin menurunkan daya beli. Hal itu tentu bukan hal yang baik. Apalagi dalam perspektif Islam, pajak adalah pungutan paksa yang bisa mengarah pada kezaliman. Alih-alih ditolong, rakyat yang sudah susah malah dibikin tambah susah.

Makin besarnya pungutan pajak di negeri ini sebenarnya sebuah kebijakan yang ganjil. Mengapa? Lihatlah, satu sisi negara begitu getol mengumpulkan uang receh dari rakyatnya melalui berbagai bentuk pajak seperti Ppn, Pph dan lainnya. Namun, di sisi lain sumber-sumber penghasilan besar seperti tambang

batubara malah dilepas. Saat ini ada 370.775 ribu hektar ladang Batubara yang dikuasai oleh 7 (tujuh) kontraktor PKP2B. Menurut keterangan Dirjen Minerba, sumberdaya dan cadangan batubara di wilayah itu mencapai 20,7 miliar ton dan 3,17 miliar ton. Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata adalah 4.000 kkal/kg GAR, nilai HBA US\$75/ton dan nilai tukar US\$/Rp=Rp14.000, maka nilai aset itu adalah Rp 13.730 triliun. Nyatanya, harga batubara sekarang jauh di atas angka asumsi tadi. Itu artinya, nilai cadangannya juga sangat besar. Bukankah dengan potensi sebesar itu, bila dikelola oleh negara, hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Mengapa malah diserahkan kepada perusahaan swasta?

**Ekonomi populis yang dijalankan oleh rezim lama sepertinya bakal “ditiru” oleh rezim baru. Tentu membutuhkan dana besar. Apakah ada korelasi positif bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat?**

Ekonomi populis, yang terwujud dalam bentuk kebijakan seperti pemberian BLT dan Bansos serta berbagai subsidi, secara teoritik dibenarkan. Utamanya ketika terjadi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat, yang tak lagi bisa diselesaikan melalui mekanisme ekonomi biasa. Namun, dalam perkembangannya, karena lebih bermuatan politis, ia acap mengabaikan pertimbangan ekonomi, sehingga malah menimbulkan komplikasi ekonomi, berupa makin beratnya beban negara. Celakanya, hal itu kemudian dikompensasikan pada kenaikan pungutan pajak. Walhasil, negara seperti berwajah ganda. Di satu sisi tampak baik kepada sebagian rakyatnya. Di sisi lain sangat jahat kepada rakyat lainnya. Meski begitu, besar kemungkinan kebijakan ini akan tetap diteruskan oleh rezim baru. Pasalnya, cara ini memang cukup efektif untuk menyelesaikan problem distribusi dan secara politis efektif

meredam potensi gejolak sosial.

## Utang warisan dari rezim lama begitu menggunung. Bagaimana konsekwensinya? Apakah rezim baru akan semakin terjerat utang?

Utang rezim lalu pasti akan membebani rezim baru. Cicilan utang dan bunga yang harus dibayar tiap tahun disebut-sebut lebih dari Rp 800 triliun. Itu artinya, rezim baru nanti harus mengalokasikan lebih dari 25% dari rencana pendapatan tahun 2025 yang diperkirakan tak sampai Rp 3000 triliun untuk membayar kewajiban itu. Keadaan ini tentu akan membuat ruang fiskal untuk berbagai kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, termasuk untuk pembiayaan proyek mercusuar IKN, akan semakin sempit. Untuk mengatasi itu, lazimnya rezim akan menempuh dua jalan. *Pertama*, dengan menambah utang baru. *Kedua*, meningkatkan pungutan pajak. Kedua-duanya bukan pilihan enak karena pasti pada akhirnya akan makin membebani ekonomi rakyat. Utang baru akan menambah beban cicilan utang dan bunganya. Pajak makin memberatkan pengeluaran rakyat. Selama perspektif yang digunakan adalah sistem ekonomi kapitalis, cara-cara seperti itu akan selalu dilakukan.

## Banyaknya pabrik-pabrik yang tutup dan kelas menengah yang tergerus ekonominya menunjukkan fenomena apakah?

*Pertama*: Itu menunjukkan gempuran hebat di sektor manufaktur dalam negeri akibat kerasnya persaingan, utamanya dari Cina, serta menurunnya permintaan barang manufaktur secara global menyusul Perang Rusia – Ukraina dan krisis Timur Tengah. *Kedua*: Makin derasnya masuk komoditas manufaktur murah seperti tekstil, baju, alas kaki, alat pertukangan dan lainnya dari Cina membuat produksi manufaktur dalam negeri tersisih. Omset menurun. Jika hal itu terus terjadi, ujungnya

produksi harus dihentikan, dan pabrik ditutup. Tutupnya pabrik tentu akan meningkatkan pengangguran. Ini dibuktikan dari jumlah PHK yang terjadi pada bulan Agustus – September 2024 saja disebut mencapai lebih dari 40 ribu. Keadaan ini akhirnya memukul sektor UMKM lainnya, karena kehilangan pembeli yang mayoritasnya berasal dari kalangan menengah bawah ini. Keadaan ini memaksa para penjual menurunkan harga. Itulah mengapa terjadi deflasi (penurunan harga-harga) yang terjadi terus menerus selama 5 bulan terakhir.

## Di sisi lain, apakah penegakan hukum sudah berkeadilan? Ataukah justru hukum “mengabdikan” pada kepentingan rezim dan oligarki?

Ini akan menjadi bagian paling sulit yang bakal dihadapi oleh rezim baru nanti. Semua orang tahu, di sepanjang kepemimpinan rezim lalu, penegakan hukum acap dilakukan bukan demi mewujudkan keadilan, melainkan untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, banyak koruptor yang tidak diproses karena mereka mau tunduk pada kepentingan kekuasaan. Contoh paling hangat adalah kasus Erlangga Hartarto. Semua orang tahu, ia dipaksa mundur dari kursi Ketua Umum Golkar oleh penguasa di bawah ancaman 11 kasus. Jika benar ia terlibat di sekian banyak korupsi, mengapa tidak diproses? Mengapa pula kasusnya justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa? Celakanya lagi, alih-alih semua kasus itu diproses, yang bersangkutan malah dianugerahi Bintang Mahaputera. Pertanyaan sederhananya, bisakah setelah budaya kotor seperti itu berlangsung sekian lama, rezim baru nanti menciptakan budaya hukum baru yang lebih baik? Jawabannya, mestinya bisa. Semua tentu bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo nanti. Ini karena langkah ini pasti nanti akan memakan banyak orang. Sangat mungkin di antaranya berasal dari

kalangan pendukungnya sendiri atau bahkan dari kalangan sendiri.

**Tak bisa dipungkiri bahwa dominasi oligarki pada pemerintahan rezim Jokowi begitu kentara. Apakah rezim baru nanti terbebas dari oligarki atau sebaliknya? Bagaimana konsekwensinya?**

Betul. Rezim lalu sangat ditopang oleh oligarki pemilik modal. Begitu pun dengan rezim sekarang. Ini karena oligarki pendukung rezim lalu adalah juga pendukung rezim ini. Sebut siapa pengusaha pendukung rezim lalu, pastilah ia juga pendukung rezim sekarang. Mengapa itu bisa terjadi? Karena bagi oligarki, yang paling penting adalah keberlanjutan kepentingan bisnis dan ekonomi mereka. Mereka melihat, rezim inilah yang paling potensial menang dan paling bisa mengamankan semua kepentingan bisnis dan ekonomi mereka. Mereka banyak belajar dari rezim lalu, dengan memberi puluhan triliun rupiah mereka bisa mendapat ratusan triliun rupiah. Belum pernah rasanya dalam sejarah di republik ini, pengusaha begitu bisa mendapat ruang berbisnis yang amat sangat empuk lebih dari pada masa sekarang.

**Bagi-bagi kursi menteri dan direksi BUMN menjadi kritik pedas politik transaksional rezim Jokowi. Apakah rezim baru benar-benar melaksanakan *zaken cabinet* ataupun serupa dengan rezim sebelumnya? Bagaimana dampaknya?**

Bakal serupa dengan sebelumnya. Hebatnya, itu semua nanti akan berlangsung secara legal. Bukankah UU Kementerian sudah diubah dengan memberikan kewenangan kepada Presiden baru nanti untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan. Artinya, politik transaksional bakal akan tetap

terjadi. Kabarnya bakal ada 40 kementerian dengan sekitar 60 jabatan menteri dan setingkat menteri berikut wakilnya. Angka itu sangat cukup untuk dibagi rata pada semua partai pendukung rezim. Mungkin bedanya, ke depan katanya menteri akan diambil dari orang yang betul-betul ahli, tidak seperti rezim lalu yang sangat terkesan asal comot.

**Bisakah rezim baru menyelesaikan semua permasalahan di atas?**

Bisa iya, bisa tidak. Bergantung pada sejumlah faktor. *Pertama*: Integritas presiden. Apakah betul-betul ia bisa bekerja berdasar nilai-nilai utama atautkah akan seperti yang lalu berdasar prinsip machiavelistik, yang membuat persoalan bukan terurai tapi malah makin ruwet. *Kedua*: Partai-partai politik dan Parlemen. Apakah bisa memerankan diri secara semestinya sebagai alat kontrol atau sekadar sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan kue ekonomi. *Ketiga*: Masyarakat dengan para tokohnya. Apakah tetap kritis atau justru malah tunduk kepada kekuasaan seperti yang lalu terjadi. Keempat: Sistem yang berlaku. Apakah bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah atau malah justru malah menimbulkan masalah.

**Apa akar masalahnya sehingga permasalahan bangsa begitu menggurita dan susah diselesaikan?**

Ada dua: *Pertama*, pemimpin yang culas dan sistem yang buruk. Pemimpin yang culas. Dia bukan bekerja demi kebaikan bangsa dan negara, tetapi malah justru demi diri dan keluarga serta kelompoknya. *Kedua*, sistem sekuler kapitalistik, yang memang sudah cacat sejak dari lahirnya. Kombinasi dua faktor inilah yang membuat negeri kita ini hari terjerembab pada kubangan persoalan yang makin banyak dan makin berat.

**Dengan apa agar permasalahan bangsa tersebut bisa diselesaikan**

## dengan tuntas?

Tentu dengan menata dua faktor utama tadi. Harus ada sistem yang baik. Tentu yang berasal dari Tuhan Yang Mahabaik, Allah SWT. Itulah syariah Islam. Juga harus ada pemimpin yang baik, yang amanah, yang mau tunduk pada sistem yang baik itu.

## Akankah dalam upaya penyelesaian masalah bangsa tersebut dengan hanya perubahan parsial saja? Ataukah diperlukan perubahan fundamental? Seperti apakah Perubahan fundamental itu?

Ketika sebuah bangunan bobrok akibat pondasinya yang rapuh, perbaikannya tak cukup dengan sekadar menutup lobang tembok atau mengganti genteng. Harus ada perbaikan secara total pondasi yang rapuh itu. Begitulah pula perbaikan negeri ini, yang telah lama rusak akibat sistem yang rusak yang lahir dari sistem sekuler, kapitalistik, liberalistik. Ia memerlukan perubahan fundamental, sejak dari akarnya demi tegaknya kehidupan yang Islami, yang di dalamnya diterapkan syariah secara *kaaffah* dengan kepemimpinan yang amanah.

## Apakah penting adanya pemerintahan islami untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini?

Penting sekali. Bahkan harus. Pemerintahan islami adalah pemerintahan yang digerakkan oleh pemimpin yang islami, yang bekerja berdasar sistem Islam. Seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang amanah, yang sadar betul bahwa kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT kelak di Akhirat. Karena itu ia harus memimpin dengan sebaik-baiknya jika tidak ingin mendapat azab nanti. Dengan syariah, masyarakat dalam setiap aspeknya akan diatur. Dengan syariah

pula setiap masalah akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

## Bagaimana seharusnya pemerintahan baru bersikap terhadap gerakan Islam dan perjuangan penegakan syariah Islam?

Pemerintahan baru harus memandang bahwa Islam dan umat Islam adalah modal dasar terpenting dari bangsa ini. Negeri ini merdeka di atas tetesan darah para syuhada dan diakui atas berkat rahmat Allah. Oleh karena itu, tak layak Pemerintah memusuhi Islam dan umat Islam, termasuk gerakan Islam. Jika pemerintah memusuhi gerakan Islam, itu sama artinya memusuhi rakyatnya sendiri. Sejarah mencatat, tak ada rezim yang selamat ketika dalam kekuasaannya dipenuhi kebencian terhadap Islam. Lihatlah apa yang terjadi pada rezim Orde Lama, Orde baru juga Orde Jokowi. Mereka semua berakhir, bahkan tumbang, sementara dakwah Islam terus melaju makin kencang.

Islam harus dipandang sebagai sistem yang akan mengatur masyarakat dan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Jika Sosialisme telah runtuh, Kapitalisme makin loyo, ke mana lagi akan berlabuh jika tidak pada Islam?

## Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam dan rakyat guna mendukung perubahan besar ini

Umat harus terus meningkatkan pemahaman Islamnya. Mereka harus menguatkan iman dan takwanya agar semakin tunduk pada segenap perintah dan larangan Allah. Sedemikian sehingga bisa melihat bahwa negeri ini sungguh memerlukan perubahan besar bagi kebaikan negeri ini. Perubahan itu tak lain adalah perubahan ke arah Islam. Karena itu usaha ini harus didukung dengan sekuat-kuatnya. []



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

# PEMIMPIN VISIONER

**“Kalian memerangi Jazirah Arab lalu Allah menaklukkannya, kemudian kalian memerangi Rum lalu Allah menaklukkannya.” (HR Muslim).**

+ + + +

**S**alah satu kapabilitas yang amat penting diperlukan dari seorang pemimpin adalah kemampuannya dalam merumuskan visi bersama. Visi itu akan menjadi panduan ke mana langkah akan diayun. Ibarat bahtera, visi akan menentukan arah ke mana kapal itu berlayar berikut tahapan-tahapan perjalanan yang harus ditempuh. Tanpa visi, perjalanan akan berlangsung tanpa arah.

Bukan hanya memberi arah, visi yang gamblang juga memasok energi besar yang sangat diperlukan dalam menggalang usaha bersama. Perjalanan yang berat tentu akan semakin membosankan bila tidak jelas ke mana sebenarnya arah yang hendak dituju. Sebaliknya, penderitaan dalam perjalanan akan dirasa sedikit berkurang bila semua mengerti ke mana akan menuju. Apalagi juga dipahami betapa pentingnya perjalanan itu harus ditempuh. Di sinilah letak pentingnya pemimpin yang visioner. Dia akan menjadi

lokomotif yang menghela perjalanan gerbong idealisme bersama. Di tangan pemimpin dengan visi yang kuatlah tercetak peristiwa-peristiwa besar dunia.

Maka dari itu, bukan isapan jempol ketika Michael Hart dalam buku *100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia* meletakkan Rasulullah Muhammad saw. dalam urutan nomer satu. Itu artinya, Hart memandang bahwa Muhammad adalah figur yang paling luas sekaligus paling fundamental pengaruhnya dalam bentangan sejarah kehidupan manusia.

Hart benar. Memang Rasulullah saw. adalah pribadi yang langkah-langkahnya telah mengubah dunia. Bermula dari langkah kecil yang dilakukan di Makkah selama 13 tahun bersama sejumlah para Sahabat, kemudian dilanjutkan dengan 10 tahun di Madinah, berkembang menjadi sebuah gelombang dahsyat perubahan di Jazirah Arab yang menandai akan tegaknya peradaban baru dunia. Para sejarawan menyebut 700 tahun sebagai *the golden age*. Sepanjang waktu itu peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw. menjadi arus utama peradaban dunia, justru di saat belahan lain termasuk kawasan Eropa apalagi Amerika tengah bergelimang dalam kegelapan. Bagaimana

semua itu bisa terjadi?

Rasulullah saw. adalah pangkal utamanya. Di bawah bimbingan wahyu, beliau menjelaskan dengan sangat gamblang visi kehidupan umat berlandaskan pada prinsip-prinsip tauhid. Intinya adalah seperti yang tertuang dalam ayat 77 dari Surah al-Qashash.

Dari ayat di atas, ada empat visi yang disampaikan Rasulullah kepada umat Islam. *Pertama*: Orientasi utama hidup seorang Muslim adalah bagaimana meraih kebahagiaan hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Benar. Semua manusia pasti akan melalui satu fase kehidupannya di dunia. Dengan kesadaran bahwa hidup yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat, maka kehidupan dunia adalah sebagai *mazra'ah al-akhirat* (sawah-ladang akhirat); tempat menanam kebaikan untuk dituai hasilnya nanti di akhirat. Jadi, jelas sekali ada *linkage* yang sangat erat antara bagaimana cara kita menjalani hidup di dunia saat ini dengan corak kehidupan kita di akhirat nanti. Pertanyaannya kemudian adalah cara hidup di dunia seperti apakah yang bisa menjamin kebaikan hidup di akhirat kelak? Tentu saja cara hidup sesuai yang telah digariskan oleh Sang Pencipta alam semesta, kehidupan dan manusia ini. Tegasnya, cara hidup sesuai dengan Syariah Islam. Dengan demikian bagi seorang Muslim, syariah memiliki posisi yang sangat sentral. Ia menjadi panduan dalam berbuat serta tolok ukur dalam menilai baik dan buruk. Dengan pandangan seperti ini, tentu tak layak seorang Muslim – juga manusia lain – menjalani kehidupan di dunia secara serampangan atau mereguk kenikmatan tanpa mengindahkan aturan. Ini tentu merupakan tindakan yang amat bodoh. Ini sama saja mengorbankan yang kekal untuk mencari yang sementara, meninggalkan yang hakiki untuk meraih yang semu, atau membuang yang sangat besar untuk mendapatkan yang sangat kecil.

*Kedua*: Kendati hidup yang sesungguhnya

adalah di akhirat nanti, hidup di dunia sekarang ini tak boleh dilupakan. Kehidupan dunia tetap harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Dengan segala daya dan upaya, umat Islam didorong untuk meningkatkan kualitas kepribadian, pengetahuan dan keahlian SDM secara terus-menerus guna meraih keberhasilan-keberhasilan di segala bidang. Keberadaan risalah Islam yang diturunkan Allah justru memang untuk mengatur hidup manusia di dunia, bukan di akhirat. Keagungan risalah Islam akan tampak dari tegaknya peradaban unggul yang dibangun oleh manusia-manusia Muslim dengan landasan ajaran Islam itu. Jadi salah besar bila ada seorang Muslim yang menjauhi dunia, *uzlah, withdrawl* (menarik diri) atau apapun istilahnya dengan alasan untuk meraih akhirat. Sikap eskapis (melarikan diri) seperti itu sama sekali tidak dibenarkan. Itu hanya dalih saja untuk menutupi semacam kepengecutan jiwa yang tidak mau atau gagal dalam menghadapi tantangan kehidupan dunia. Secara faktual sikap seperti ini juga sangat berbahaya. Ini kontra produktif dengan semangat untuk mewujudkan keunggulan Islam di semua segi. Tanpa disadari, sikap-sikap seperti itu turut memberi andil dalam kemunduran peradaban Islam. Dalam iklim kompetisi, sikap seperti itu juga tidak mendorong semangat meraih keunggulan. Akibatnya, umat Islam akan terus terpinggirkan di semua lapangan kehidupan dan tertindas kelompok lain, seperti yang saat ini terjadi.

*Ketiga*: Dalam kehidupan di dunia manusia tidak mungkin melepaskan diri dari interaksi dengan orang lain. Interaksi ini diperlukan sebagai upaya rasional untuk meraih kemaslahatan bersama. Sikap seperti apa yang dibangun dalam pergaulan antar manusia akan menentukan kualitas interaksi di antara mereka. Ini tentu pada akhirnya akan menentukan pula apakah kemaslahatan bersama yang diinginkan itu bisa dicapai atau tidak. Menyangkut hal ini,

Allah mengingatkan kita untuk membangun interaksi dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Semestinya begitulah interaksi diantara manusia dibangun, yakni dengan semangat *akhlaqu al-karimah*.

Persaingan atau kompetisi dan benturan kepentingan di antara manusia adalah sesuatu yang wajar. Adanya iklim kompetisi justru akan mendorong semangat bekerja atau berbuat yang terbaik. Syariah akan mengatur berbagai kepentingan itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak saling berbenturan yang mendorong orang untuk berbuat dzalim terhadap orang lain.

*Keempat*. Peringatan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kehidupan di dunia dan interaksi sesama manusia akan berjalan dengan sebaik-baiknya bila didasarkan pada tatanan yang benar dan dilakukan oleh manusia-manusia yang berakhlak mulia. Peringatan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi menandakan pentingnya menjaga terus-menerus agar tatanan yang benar, yakni syariah Islam, yang menjadi dasar seluruh interaksi di antara manusia, tetap tegak berjalan. Bila tegaknya syariah menjamin perwujudan kebaikan, berarti pengingkaran terhadap syariah akan berujung pada kerusakan. Ini harus dicegah. Jadi peringatan untuk tidak berbuat kerusakan sama saja peringatan untuk tidak meninggalkan syariah atau menggunakan aturan selain Islam dalam menata semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian menjaga syariah secara imani memang merupakan kemutlakan yang tidak bisa ditawar, dan secara faktual berarti menjaga agar tidak timbul malapetaka di tengah masyarakat. Dengan kesadaran seperti ini, setiap komponen masyarakat bersama dengan pemerintah dalam Islam akan terdorong untuk menjaga syariah sekuat tenaga. Peralunya, syariahlah yang akan menentukan mulia tidaknya peradaban yang

akan dibangun di tengah masyarakat, sekaligus dari sana bisa dinilai sejauh mana keridhaan Allah bisa diharapkan. Makin erat kita memegang syariah, semakin besar keridhaan Allah didapat. Sebaliknya, semakin banyak syariah terabaikan, keridhaan Allah tentu akan semakin jauh meninggalkan kita.

Bukan hanya visi global, Rasulullah saw. juga merumuskan visi antara. Dengan itu umat menjadi tahu apa yang harus dicapai secara kongkrit dalam kerangka pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sebagai dijelaskan oleh Rasul saw. dalam visi besarnya. Misalnya, menyangkut upaya perluasan wilayah Islam, Rasulullah saw. berkata tentang penaklukan wilayah Jazirah Arab, lalu Rum. Di lain waktu Rasulullah saw. juga berbicara tentang penaklukan ibukota Romawi Timur, Konstantinopel.

Mendengar semua ungkapan-ungkapan Rasulullah itu, umat—yang meski ketika itu tengah menghadapi tekanan besar dari pasukan Ahzab dalam Perang Khandak—menjadi makin bersemangat untuk menghadap lawan dan mencapai prestasi sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam visi antaranya itu. Hasilnya, akhirnya semua daerah yang disebut Rasul saw. itu pun di kemudian hari memang benar-benar berhasil ditaklukan. Jazirah Arab dikuasai Islam malah semasa Rasul masih hidup. Romawi Timur juga berhasil ditaklukan meski baru setelah 825 tahun kemudian!

++++

Luar biasa memang pengaruh visi dalam memandu orang untuk berbuat. Sejarah besar tercetak dari visi yang besar, yang digerakkan seorang pemimpin yang visioner. Sosok seperti inilah yang sangat kita rindukan. Bukan pemimpin pendusta, khianat, yang bekerja demi keuntungan diri, keluarga dan kelompok pendukungnya. []

# PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI BAWAH REZIM BARU

*Fatma Sunardi*

Dalam sepuluh tahun terakhir, salah satu fokus Pemerintah adalah bagaimana menyelesaikan masalah perlindungan perempuan. Untuk melindungi perempuan dari kerentanannya terhadap kekerasan, Pemerintah telah membangun jaminan kepastian hukum melalui Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004, serta Undang-undang Tindak Pencegahan Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022. Nyatanya kasus kekerasan pada perempuan masih terus terjadi.

Menurut catatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, kasus KDRT yang tercatat selama 20 tahun terakhir sebanyak 515.466 kasus. Sebanyak 94 persen di antaranya adalah kekerasan terhadap istri, yang notabene adalah perempuan. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah Salampessy, mengungkapkan data tersebut dalam perbincangannya di Jakarta, Rabu (28/08/2024).

Fakta lain, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran (eksploitasi seksual), tetapi juga eksploitasi lainnya seperti kerja paksa dan praktik perbudakan (serupa).

Data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 22 September 2023

menyebutkan 856 kasus TPPO yang ditangani Polri mulai Januari hingga 22 September 2023. Jumlah laporan yang paling banyak terkait kasus TPPO yaitu pada Juni 2023, sebanyak 470 kasus.[1]

Perempuan juga menjadi korban kekerasan pada kasus konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 207 konflik agraria di 32 provinsi sepanjang 2021. Perempuan mengalami beban terberat ketika ada konflik agraria. Saat konflik agraria terjadi, perempuan tak hanya turun langsung berjuang, tetapi harus menjadi kuat untuk keluarga mereka.[2]

## Hasil Politik Pembangunan

Pendekatan pembangunan untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat kapitalistik dianggap populer dan menjadi patron yang diambil setiap negara. Pemerintah Indonesia juga mengambil kebijakan ini dan memberi nama Transformasi Indonesia menjadi negara maju tahun 2045 dengan rancangan Indonesia Emas. Narasi Indonesia Emas 2045 akan membawa seluruh warga negara termasuk perempuan dalam rancangan-rancangan yang ditetapkan negara.

Dalam cetak biru RPJMN 2015-2019, dilanjutkan dengan RIJMN 2020-2024, perempuan sebagaimana laki-laki adalah Sumber

Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan. Jika Indonesia ingin meraih target pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi sebagaimana doktrin Kapitalisme, maka SDM pembangunan harus diposisikan sebagai tenaga kerja yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Karena itu perempuan dan laki-laki harus menjadi SDM unggul yang mampu bersaing, tidak hanya dengan sesama warga negara Indonesia, tetapi juga dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Dari sini maka perempuan harus didorong berkontribusi dalam pembangunan. Mereka harus mengisi setiap sektor yang dibutuhkan demi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) harus mendorong kebijakan yang memastikan perempuan berkiprah di ranah publik atas nama 'pemberdayaan perempuan'.

Pemberdayaan perempuan telah berhasil membangun kepercayaan diri perempuan untuk keluar rumah dengan meninggalkan tugas mulianya menjadi ibu dan pengatur rumah tangga suaminya. Mereka berkiprah demi kontribusi ekonomi secara langsung dengan bekerja maupun tidak langsung—berkiprah di ranah politik—untuk memunculkan kebijakan pembangunan yang kapitalistik.

Dalam praktiknya, kebijakan KemenPPA akan menjadi acuan bagaimana perempuan itu harus berkiprah-berkontribusi dalam pembangunan dan juga dihargai. Terlihat korelasi yang dekat sekali dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan dengan desain negara pada perempuan dalam pembangunan. Di titik inilah kita mesti membahas cara pandang struktural, yaitu pandangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dan mekanisme negara memengaruhi persoalan yang dihadapi oleh warga negara.

Kekerasan yang dialami perempuan dalam relasinya dengan suami atau pasangan, menjadi korban perdagangan orang, menjadi korban

perampasan lahan dan ruang hidup bukanlah nasib buruk yang diterima begitu saja. Hampir semua pengalaman kita sebagai warga negara, yang berkaitan dengan hak-hak dasar kita, dipengaruhi oleh negara melalui kebijakannya.

Misalnya, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin sering akhir-akhir ini, terutama di daerah dekat konsesi tambang dan perkebunan seperti Kalimantan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bisa saja membuat kebijakan yang membuat hutan tetap terjaga, seperti kebijakan larangan konsesi di lahan gambut. Karhutla juga sebenarnya bisa dicegah jika pemerintah secara konsisten memperhatikan kebijakan perizinan pembukaan lahan perkebunan, tambang galian, dan lain sebagainya.

Realitas kekerasan yang menimpa perempuan bukan karena negara tidak memiliki program perlindungan. Masalahnya, politik pembangunan yang mendudukkan perempuan sebagai SDM yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi telah meletakkan perempuan dalam kondisi rentan. Kerentanan ini karena masyarakat sekuler kapitalisme telah dibangun di atas aturan-aturan yang cacat yang tidak menghargai kehormatan perempuan, yang hanya menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja yang dieksploitasi dan juga pemuas hasrat seksual.

Masyarakat sekuler kapitalis adalah habitat (tempat hidup) terburuk bagi manusia, khususnya perempuan, dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Pemberdayaan perempuan telah menyeret perempuan dari benteng amannya, yakni rumah, ke dalam habitat masyarakat yang predatoris. Tak heran kasus kekerasan pada perempuan tidak akan berakhir.

## Kesetaraan Gender

Berbicara tentang pemberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari paradigma feminis-

kesetaraan gender. Kalangan feminis Barat (liberal) telah memperoleh lompatan keberhasilan dalam memasukkan kesetaraan gender dalam forum-forum global. Puncaknya, ia menjadi konvensi PBB, yakni CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*); Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

CEDAW sering disebut sebagai piagam hak asasi perempuan, karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memajukan hak-hak perempuan di seluruh dunia. CEDAW juga menjadi landasan penyelesaian masalah perempuan melalui platform pembangunan global SDGs, tujuan ke 5. Tujuan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Saat ini kesetaraan gender baik dalam konteks konvensi CEDAW maupun SDGs telah diadopsi oleh Indonesia. Posisi kesetaraan gender semakin kokoh dengan dijadikan sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMN negara.

Lalu apa artinya bagi perempuan? Penancapan kesetaraan gender akan berkorelasi pada pemberdayaan perempuan. Gender akan menggantikan paradigma perempuan yang awal, yakni yang berasal dari agama, adat dan tradisinya. Bagi perempuan Indonesia yang mayoritas Muslim, kesetaraan gender akan menggantikan paradigma kemuliaan perempuan.

Islam mengajarkan kemuliaan bagi perempuan jika perempuan menjadi hamba bertakwa, yakni melaksanakan semua kewajiban, termasuk kewajiban sebagai ibu dan pengtaur rumah tangga suaminya. Sebaliknya, kesetaraan gender mengajarkan bahwa kemuliaan perempuan adalah manakala bisa berkiprah-berperan sama dengan laki-laki.

Pengarusan kesetaraan gender melalui pendekatan pembangunan akan melestarikan

bahkan mengokohkan perempuan dalam desain pembangunan kapitalistik. Sudah pasti perempuan tidak pernah keluar dari kerentanan sebagai target kekerasan. Pembangunan negara telah menciptakan persoalan di ranah hulu, yakni menjadikan masyarakat lebih kapitalistik. Artinya, lebih dekat dengan karakter predator yang siap memangsa perempuan. Di sisi lain, program perlindungan negara berputar-putar di ranah hilir, memperkuat pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan. Jelas ini tidak akan menyelesaikan masalah perlindungan terhadap perempuan.

### Khatimah

Komitmen rezim terpilih untuk melanjutkan rancangan pembangunan rezim sebelumnya adalah alarm bahaya bagi perlindungan perempuan. Tidak ada harapan bagi perempuan untuk mendapat perlindungan dari kebijakan negara, selama semua kebijakan perlindungan masih dalam kerangka pembangunan mengejar pertumbuhan. Lalu apakah perempuan harus pasrah menerima nasib buruknya? Tentu saja tidak.

Islam selalu megajarkan kebaikan. Termasuk kebaikan Islam adalah adaya kewajiban *amar makruf nahi mungkar*. Ini adalah jalan menuju pembebasan perempuan dari nasib buruknya akibat penerapan kapitalisme. Berani menyuarakan kebenaran adalah langkah membangun harapan untuk kembali pada kehidupan Islam yang memuliakan perempuan.

Hanya kehidupan Islam yang mampu menciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan. Perempuan akan terlindungi dengan penerapan syariah oleh Khalifah. Istiqmah berjuang.

*Wallaaahu a'lam bi ash-shawaab. []*

### Catatan kaki:

- [1] [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/ratusan\\_kasus\\_tppo\\_ditindak\\_sejak\\_awal\\_tahun](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_kasus_tppo_ditindak_sejak_awal_tahun)
- [2] <https://www.mongabay.co.id/2022/04/21/dewi-kartika-konflik-agraria-perempuan-paling-terdampak/>



Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



# MALAIKAT PENCATAT AMAL MANUSIA

(QS Qaf [50]: 17-18)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya). Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat) (QS Qaf [50]: 17 - 18).

Dalam ayat sebelumnya diterangkan tentang kekuasaan Allah Swt dalam penciptaan manusia. Juga kekuasaan dalam pengetahuan terhadap makhluk ciptaan-Nya. Bahwa Dia mengetahui persis te mengetahui semua yang dibisikkan manusia dalam hatinya. Ayat ini masih melanjutkan kandungan ayat sebelumnya.

## Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾

(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya.

Kata « الْمُتَلَقِّيَانِ » adalah bentuk *tatsniyah* dari kata « التَّلَقَّى », yang merupakan *ism fâ'il* (kata pelaku) dari kata « تَلَقَّى » (menerima, menemui).

Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan *al-mutallaqiyâni* adalah dua malaikat.<sup>1</sup> Ibnu Katsir berkata, "Mereka adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk mencatat amal perbuatan manusia."<sup>2</sup>

Secara bahasa, kata « التَّلَقَّى » berarti « الأخذ، والتلقن بالحفظ والكتابة » (mengambil dan memahami dengan cara mengingat dan mencatat).<sup>3</sup>

Menurut Ibnu 'Asyur, kata tersebut bermakna « أَخَذَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِ مُعْطِيهِ » (mengambil sesuatu dari tangan pemberi). Dalam hal ini digunakan sebagai *isti'ârah* yang berarti mencatat perkataan dan perbuatan manusia ketika hal terjadi.<sup>4</sup>

Diperkirakan kalimat lengkapnya: "Ketika dua penerima (malaikat) itu menerima segala sesuatu yang beasal dari seseorang, lalu menuliskannya."<sup>5</sup>

Dalam ayat ini, kata tersebut tidak disebutkan *maf'ul* atau objeknya. Maknanya ditunjukkan firman Allah pada ayat berikutnya:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

*Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat) (Qaf [50]: 18).*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki dua malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Salah satunya berada di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri.<sup>6</sup>

Ayat ini diawali dengan kata « إِذْ » (ketika) yang merupakan *zharf al-zamân al-mâdhî* (keterangan waktu yang telah lalu). Kata tersebut berkaitan dengan kata « أَقْرَبُ » (lebih dekat) pada ayat sebelumnya.<sup>7</sup> Dengan demikian makna ayat ini adalah: “Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya ketika dua orang malaikat menerima amal perbuatannya, lalu mencatatnya.”<sup>8</sup>

Jika Allah SWT lebih dekat kepada manusia daripada malaikat yang mencatat perbuatan mereka, lalu untuk apa menugaskan malaikat? Menurut asy-Syaukani, ayat ini memberikan makna bahwa Allah SWT lebih mengetahui keadaan manusia dan tidak memerlukan dua malaikat pengawas tersebut. Meskipun demikian, Dia menugaskan malaikat itu untuk menetapkan *hujjah* dan menegaskan perkaranya.<sup>9</sup>

Al-Qurthubi juga berkata, “Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya ketika dua malaikat mencatat amalnya. Artinya, Kami lebih mengetahui tentang keadaan manusia itu sehingga tidak memerlukan malaikat yang mengabarkannya. Akan tetapi, keduanya ditugaskan kepada dirinya untuk menegakkan *hujjah* dan mengukuhkan perkara tersebut.”<sup>10</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾

*Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri*

Frasa « عَنِ الْيَمِينِ » (dari sebelah kanan) berkaitan dengan *khbar muqaddam* bagi kata « قَعِيدٌ » yang berkedudukan sebagai *mubtada'* *muakhhhar*. Adapun « عَنِ الشِّمَالِ » *ma'thuf* bagi kata sebelumnya *'an al-yamîn*.<sup>11</sup>

Dengan demikian maknanya: « عَنِ الْيَمِينِ قَعِيدٌ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مِنَ الْمُتَلَقِّينَ » (malaikat pencatat amal itu duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri). Salah satunya dihapus untuk menunjukkan yang lainnya.<sup>12</sup>

Kata « قَعِيدٌ » merupakan *shifah musyabbahah* dari kata « قَعَدَ » (duduk). Bentuk « قَعِيلٌ » di sini bermakna « فَاعِلٌ ». <sup>13</sup>

Dengan demikian makna « قَعِيدٌ » adalah « قَاعِدٌ » (yang duduk). Pemaknaan tersebut seperti halnya pada kata « السَّمِيعُ » (yang mendengar), « الْعَلِيمُ » (yang mengetahui), « الْقَدِيرُ » (yang berkuasa) dan « الشَّهِيدُ » (yang menyaksikan).<sup>14</sup>

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, mereka tidak hanya duduk, tetapi menjalankan tugasnya, yakni mengawasi dan memonitor perbuatan manusia. Dengan demikian, sebagaimana menurut penjelasan Ibnu Katsir, makna « قَعِيدٌ » di sini adalah « مُرَاصِدٌ » (mengintai, mengawasi).<sup>15</sup>

Mujahid juga memaknai kata tersebut dengan « رَصَدٌ » (mengawasi).<sup>16</sup>

Al-Hasan, Mujahid dan Qatadah berkata, « الْمُتَلَقِّينَ » adalah dua malaikat yang mencatat almamu. Yang satu berada di sebelah kananmu yang mencatat kebaikanmu. Satunya lagi di sebelah kirimu mencatat keburukanmu.”<sup>17</sup>

Mujahid juga berkata, “Allah SWT kepada manusia—meskipun Dia mengetahui keadaannya—mengutus dua malaikat pada malam hari dan dua malaikat pada siang hari mengawasi amalnya dan mencatat

tinggalannya sebagai *hujjah*. Yang satunya di sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan. Satunya lagi sebelah kiri mencatat keburukan-keburukan. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾

*Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.*<sup>18</sup>

Saat menjelaskan surat ini mulai dari ayat 17 hingga 19, Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT menjadikan atas anak Adam dua pengawas pada malam hari dan dua pengawas pada siang hari. Keduanya mengawasi amalnya dan mencatat pengaruh yang ditinggalkannya."<sup>19</sup>

Sufyan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan, ketika seorang hamba berdosa; dia berkata, "Jangan lekas-lekas ditulis. Barangkali dia meminta ampunan kepada Allah SWT."<sup>20</sup>

Ini sebagaimana diberitakan dalam hadis dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتِّ سَاعَاتٍ عَنِ

الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوْ الْمُسِيءِ، فَإِنْ نَدِمَ

وَاسْتَعْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً﴾

*Sungguh malaikat yang berada di sebelah kiri mengangkat pena (tidak mencatat) selama enam sa'ah ketika seorang hamba Muslim melakukan dosa. Jika ia menyesali perbuatannya dan meminta ampunan Allah, maka dilepaslah pena itu. Namun, jika tidak demikian maka akan dicatat satu dosa (HR ath-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir).*

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa malaikat itu « قَعِيدٌ » (duduk) di samping kiri dan kanan manusia.

Kemudian Allah SWT berfirman:

Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT menjadikan atas anak Adam dua pengawas pada malam hari dan dua pengawas pada siang hari. Keduanya mengawasi amalnya dan mencatat pengaruh yang ditinggalkannya."

﴿مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

*Tidak suatu ucapan pun yang dia ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.*

Kata « اللفظ » adalah pengucapan suatu kata yang menunjukkan suatu makna, meskipun merupakan bagian dari makna. Ini berbeda dengan kata « القول » adalah *al-kalām* yang mengandung makna.<sup>21</sup>

Ayat ini memberikan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya. Karena telah diutus dua malaikat yang mencatat semua perbuatan dan perkataan manusia, maka tak ada satu pun perbuatan dan perkataan yang terlepas dan tidak diawasi oleh kedua malaikat tersebut.

Menurut Al-Qurthubi, tidak ada satu pun perkataan manusia kecuali dicatat oleh

malaikat tersebut.<sup>22</sup>

Asy-Syaukani berkata, “Tidak ada satu pun perkataan yang diucapkan dari mulutnya kecuali di sisinya ada *raqib*, yakni malaikat yang mengawasi dan mencatat ucapannya.”<sup>23</sup>

Ibnu Katsir juga menuturkan bahwa ayat ini memberikan pengertian bahwa tiada suatu kalimat pun yang manusia katakan, melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dirinya dan mencatat amalnya. Tiada suatu kalimat pun yang tertinggal dan tiada suatu gerakan pun yang tidak tercatat oleh malaikat tersebut. Ini semakna dengan firman-Nya dalam ayat lain (QS al-Infithar [82]: 10-12).<sup>24</sup>

Menurut Abu Bakar al-Jazairi, kedua malaikat itu tidak berpisah dari orang yang mereka tunggu selama hidupnya. Hanya saja, mereka bergantian. Dua malaikat pada siang hari dan dua malaikat pada malam hari. Mereka bertemu pada waktu shalat Subuh dan shalat Ashar.<sup>25</sup>

Ketika manusia meninggal, catatan amal itu dilipat dan akan dibuka kembali pada Hari Kiamat. Kemudian manusia diperintahkan membaca sendiri buku yang berisi catatan amalnya. Menurut al-Hasan al-Bashri, kitab itulah yang diberitakan Allah SWT dalam QS al-Isra' [17] ayat 13-14.<sup>26</sup>

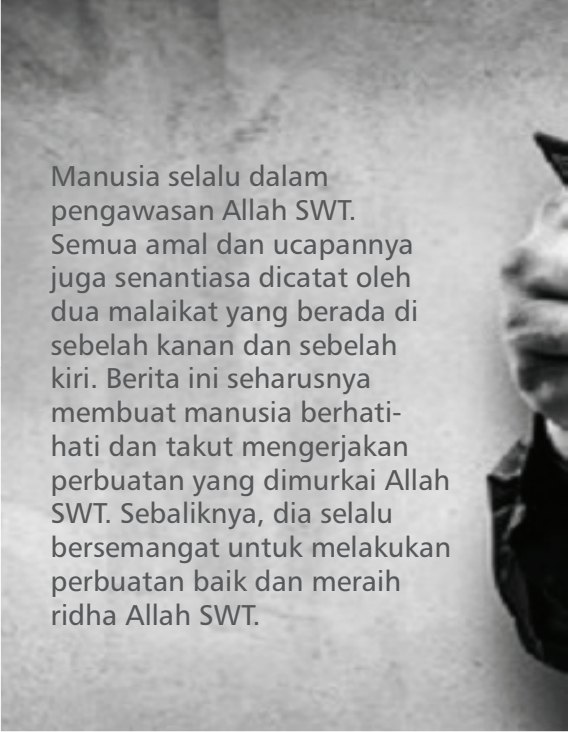
Ayat ini juga menerangkan bahwa yang mengawasi dan mencatat ucapan manusia itu adalah « رَقِيبٌ عَيْنِدُ » (pengawas yang selalu hadir). Menurut al-Imam al-Qurthubi, kata « الرَّقِيبُ » dalam ayat ini memengandung tiga makna. *Pertama*, bermakna « الْمُنْتَبِعُ لِلْأُمُورِ » (yang memonitor segala sesuatu). *Kedua*, bermakna « الْحَافِظُ » (penjaga, pengawas), sebagaimana dikatakan as-Suddi. *Ketiga*, bermakna « الشَّاهِدُ » (saksi, yang menyaksikan).<sup>27</sup>

Asy-Syaukani menggabungkan beberapa makna itu. Menurut Asy-Syaukani, « الرَّقِيبُ » adalah « الْحَافِظُ الْمُنْتَبِعُ لِلْأُمُورِ الْإِنْسَانِ » (pengawas yang memonitor urusan-urusan manusia) yang mencatat apa perkataannya yang baik maupun

yang buruk. Pencatat kebaikan adalah malaikat sebelah kanan dan pencatat keburukan adalah malaikat sebelah kiri.<sup>28</sup>

Adapun kata « الْعَتِيدُ » mengandung dua makna. *Pertama*, « الْحَاضِرُ الَّذِي لَا يَغِيبُ » (yang hadir yang tidak absen). *Kedua*, « الْحَافِظُ الْمَعَدُّ » (pegawai yang selalu siap), bisa untuk menjaga dan kesaksian.<sup>29</sup>

Tak jauh berbeda, « الْعَتِيدُ » menurut asy-Syaukani adalah « الْحَاضِرُ الْمُهَيَّأُ » (yang hadir dan selalu siap). *Al-Atid* yang dimaksud ayat ini



Manusia selalu dalam pengawasan Allah SWT. Semua amal dan ucapannya juga senantiasa dicatat oleh dua malaikat yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Berita ini seharusnya membuat manusia berhati-hati dan takut mengerjakan perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Sebaliknya, dia selalu bersemangat untuk melakukan perbuatan baik dan meraih ridha Allah SWT.

adalah « مُعَدُّ لِكِتَابَةِ مَهَيَّأٌ لَهَا » (disiapkan dan disediakan) untuk mencatat.<sup>30</sup>

Penjelasan senada juga dinyatakan oleh Abu Bakar al-Jazairi: Firman Allah SWT «إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» bermakna: kecuali di sisinya ada malaikat *raqib* yang menjaga dan *atid* yang hadir dan siap untuk mencatat.<sup>31</sup>

Hanya saja, terdapat perbedaan di kalangan

ulama mengenai perkataan yang dicatat: Apakah semua perkataan manusia itu dicatat oleh malaikat? Menurut al-Hasan dan Qatadah, semuanya dicatat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dicatat itu hanyalah hal-hal yang di dalamnya terdapat pahala dan dosa. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas.<sup>32</sup> Ikrimah berkata, “Sesungguhnya yang mereka catat hanya dalam kebaikan dan keburukan.”<sup>33</sup>

Ibnu Katsir lebih memilih pendapat yang pertama: Lahiriah ayat ini lebih menunjuk pada

sebelah kiri. Berita ini seharusnya membuat manusia berhati-hati dan takut mengerjakan perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Sebaliknya, dia selalu bersemangat untuk melakukan perbuatan baik dan meraih ridha Allah SWT.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 9
- <sup>2</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 397
- <sup>3</sup> Ismaili Haqqî, *Rûh al-Bayân*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 115; Muhammad al-Amin al-Harari, *Tafsîr Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 439
- <sup>4</sup> Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol 26 (Tunisa: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 302
- <sup>5</sup> Sayyid Thanthawi, *Tafsîr al-Wasîth*, vol. 13 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 342
- <sup>6</sup> Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol 26, 302
- <sup>7</sup> Mahmud Shafî, *al-Jadwâl fi l'râb al-Qur'an*, vol. 26 (Beirut: Dar al-Rasyid, 1998), 308
- <sup>8</sup> al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 143
- <sup>9</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 88-89
- <sup>10</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 9
- <sup>11</sup> Lihat Mahmud Shafî, *al-Jadwâl fi l'râb al-Qur'an*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 308; al-Da'as, *l'râb al-Qur'an*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 258
- <sup>12</sup> Ibnu Juz'iy al-Kalbi, *al-Tas-hîl li 'Ullû al-Tanzîl*, vol. 2 (, 302
- <sup>13</sup> Lihat Mahmud Shafî, *al-Jadwâl fi l'râb al-Qur'an*, vol. 26, 308
- <sup>14</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 10. Lihat juga al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 187; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 144
- <sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 398
- <sup>16</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 22, 342
- <sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 39. Lihat juga dalam al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 22, 344
- <sup>18</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 9. Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 187
- <sup>19</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 22, 344
- <sup>20</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 9-10
- <sup>21</sup> Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol 26, 303
- <sup>22</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 11
- <sup>23</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 89
- <sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 398
- <sup>25</sup> al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 144
- <sup>26</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 397
- <sup>27</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 11
- <sup>28</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 89
- <sup>29</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 17, 11
- <sup>30</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 89
- <sup>31</sup> al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 143
- <sup>32</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 398
- <sup>33</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 22, 345
- <sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, vol. 7, 398

penafsiran pertama karena keumuman firman-Nya.<sup>34</sup>

### Khatimah

Demikianlah. Manusia selalu dalam pengawasan Allah SWT. Semua amal dan ucapannya juga senantiasa dicatat oleh dua malaikat yang berada di sebelah kanan dan





# PENTINGNYA KESADARAN POLITIK UMAT

**Mustajab Abu Faris**

Analisis Politik

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas negeri ini seharusnya memahami bahwa realitas politik yang terpampang di depan mata tidaklah mutlak merupakan wajah asli politik itu sendiri. Ia bisa saja merupakan kamouflase dari berbagai kepentingan yang tersembunyi di belakangnya. Di balik wajah pemimpin *ndeso* tidak berarti kebijakan politiknya pro *wong cilik*. Di balik gaya 'gemoy' tidak berarti kebijakannya akan selalu ramah terhadap kepentingan rakyat. Di balik sosok-sosok politisi yang wara-wiri blusukan kesana-kemari, menampilkan mimik pro rakyat, ada pihak yang menyiapkan skenario lakon politiknya.

Relasi antara pernyataan politik di ruang-ruang publik dengan kebijakan publik yang lahir dari kursi dan meja mereka sering bertolak belakang. Bahkan muncul guyonan bahwa pernyataan Presiden Jokowi mesti dimaknai terbalik. Slogan swasembada pangan pada awal kepemimpinan Jokowi periode pertama yang diiringi blusukan ke sawah-sawah justru menghasilkan kebijakan impor pangan (utamanya beras) jutaan ton pertahun. Slogannya ekonomi hijau. Namun, Pemerintah malah memberikan konsesi lahan kepada investor di bidang pertanian dan pertambangan yang justru merusak kawasan hutan jutaan hektar. Slogan kemandirian ekonomi berbarengan dengan kebijakan penarikan utang

rata-rata Rp 500 triliun pertahun selama 10 tahun terakhir ini. Di tengah kucuran bantuan sosial mengalir kepada masyarakat, penarikan pajak pun kian beragam dan meningkat. Salah satunya adalah naiknya PPN dari 10% menjadi 11%. Termasuk berbagai kebijakan iuran yang dikenakan kepada rakyat seperti BPJS, Tapera, dan yang lainnya.

Kepada investor (pengusaha), berbagai keringanan pajak dan kemudahan birokrasi diberikan. Ada pemberian Tax Holiday, Tax Allowance, Accelerated Depreciation, Tax Rate Reduction, Kawasan Ekonomi Khusus, Pengurangan PPh Badan untuk Industri Pionir dan Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ada Rilis Daftar Prioritas Investasi, Pendirian Lembaga Pengelola Investasi, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya yang serupa. Semuanya merupakan bentuk keberpihakan kepada para investor, konglomerat dan negara-negara kapitalis untuk menancapkan dan mengokohkan kepentingan bisnis dan ekonominya di negeri ini.

Desain kebijakan pembangunan Pemerintah juga tak lepas dari pengaruh lembaga internasional. Di antaranya melalui partisipasi 'kerjasama' Pemerintah dengan lembaga internasional, baik dalam bidang pembiayaan seperti World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), maupun bidang penguatan kelembagaan, kebijakan dan

pembangunan seperti UNDP (United Nation Development Program). Badan PBB ini bekerja ‘membantu’ negara-negara dalam mengembangkan kebijakan (perundang-undangan), kemitraan (kerjasama) dan kemampuan kelembagaan (tata pemerintahan) untuk mencapai tujuan yang mereka sebut sebagai pembangunan berkelanjutan (lihat situs: *Undp.org*).

Secara realitas politik tersebut bisa dipahami dengan baik jika aktivitas politik para politisi yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dilihat secara komprehensif. Bukan hanya dalam konteks pernyataan dan perilakunya di hadapan public, tetapi juga kebijakan yang keluar dari meja mereka. Bukan saja kepada siapa yang tampil di depan mata publik, tetapi juga siapa yang ada di belakang layar. Kepada siapa para politisi dan pejabat publik itu bertemu dalam konteks berkonsultasi. Juga siapa saja yang diuntungkan dari kebijakan mereka. Dengan demikian kesadaran politik akan terbangun sehingga tidak mudah terkecoh oleh lakon politik yang tampil di permukaan.

### Hakikat Kesadaran Politik

Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam Pemikiran Politik Islam (*Alfaar Siyaasiyah*) menjelaskan bahwa kesadaran politik tidak hanya berarti kesadaran terhadap politik dan situasi global yang melingkupinya. Tidak pula hanya mengikuti politik internasional dan aktivitas politik yang menyertainya. Akan tetapi, kesafadarn politik adalah bagaimana mengamati dunia dari sudut pandang tertentu (Zallum: 2004, hlm.87).

Artinya, kesadaran politik hanya akan terbangun jika ada pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa politik nasional dan global dan situasi yang melingkupinya, disertai dengan adanya pemahaman terhadap konsepsi politik yang khas yang menjadi basis dan patron dalam melakukan pengamatan/penilaian politik.

### Perlunya Kesadaran Politik

Secara teoritik, kekuasaan bersumber dari rakyat. Artinya, tidak ada kekuasaan yang terbentuk dan bertahan tanpa restu dan dukungan rakyat, dalam sistem politik apapun. Sejarah menggambarkan bahwa kekuasaan itu terbentuk, bertahan, jatuh dan bangun dengan keterlibatan rakyat di dalamnya. Loyalitas, pengabaian (apatisme) dan penentangan (pembangkangan) massal rakyat mewarnai sejarah bangsa-bangsa dari masa ke masa. Begitu pentingnya posisi rakyat dalam kekuasaan sehingga menjadi objek perburuan bagi siapapun yang menginginkan kursi kekuasaan untuk menarik hati mereka, dengan berbagai cara.

Eksistensi suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik rakyatnya. Langgengnya suatu kekuasaan sangat ditentukan oleh loyalitas rakyatnya. Baik loyalitas itu lahir dari kesadaran politik ataupun akibat dari manipulasi politik. Presiden Sukarno bisa bertahan 20 tahun, Presiden Suharto bertahan 30 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun dan Presiden Joko Widodo 10 tahun. Semuanya itu karena ada dukungan dan loyalitas dari mayoritas rakyat sekalipun lahir dari manipulasi politik yang bernama pencitraan.

Kekuasaan yang terbangun dengan manipulasi politik (pencitraan) hanya akan efektif dalam situasi pendidikan politik rakyat rendah. Situasi politik seperti itu cenderung disukai dan dipertahankan oleh para petualang politik yang pragmatis. Mereka menyadari bahwa situasi masyarakat yang rendah pendidikan politik dan minim kesadaran politiknya memungkinkan mereka membangun pencitraan dan manipulasi demi meraih dan menjaga kepentingan mereka. Inilah yang terjadi di negeri ini dan negeri-negeri islam lainnya serta negara-negara terbelakang dan berkembang secara umum.

Kesadaran politik publik yang rendah memungkinkan para politisi melakukan manuver secara aman tanpa terdeteksi oleh publik. Ini berarti mereka aman menjalankan aksinya melakukan kebohongan publik; janji politik yang

tak terpenuhi, mengkhianati amanat rakyat, mengutamakan kepentingan investor daripada kepentingan masyarakat luas, mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya daripada kepentingan rakyat, dan lainnya. Intinya situasi itu menguntungkan para pialang politik yang dalam istilah lainnya disebut sebagai 'demagog'.

Kesadaran politik ini perlu terbangun di tengah-tengah masyarakat. Tentu agar mereka tidak mudah diiming-imingi oleh janji manis, tidak terkecoh pencitraan dan tidak tergoda oleh materi. Kesadaran politik akan menciptakan mawas diri rakyat. Selanjutnya mereka akan membangun loyalitas politik mereka berdasarkan pemahaman dan sudut pandang yang khas (ideologis). Jika ini terbentuk maka kecil kemungkinan penguasa '*ruwaybidhah*' duduk di kursi kekuasaan, bertahan dan melanggengkan kekuasaannya. Kesadaran politik akan menjadi katalisator perubahan yang bersifat sistemik, bukan hanya dalam tataran pergantian penguasa/pemimpin. Pada titik inilah kesadaran politik umat Islam mutlak dibutuhkan.

## Rendahnya Kesadaran Politik

Salah satu problem serius yang dialami umat Islam di negeri ini—dan negeri-negeri Islam lainnya—adalah masih rendahnya kesadaran politiknya, khususnya kesadaran politik Islam. Masih bercokolnya para penguasa khianat dan '*ruwaybidhah*' di negeri-negeri Islam adalah salah satu indikasi lemahnya kesadaran politik Islam kaum Muslim. Indikasi lainnya adalah umat Islam masih asyik-masyuk berpartisipasi dalam pesta-pesta demokrasi. Pada Pemilu 2024 lalu, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden mencapai 81. Persentase yang sama pada Pemilu tahun 2019. Pemilu 2014 partisipasinya 68% untuk Pileg dan 75% untuk Pilpres. Pemilu 2009 partisipasinya 71% untuk Pileg dan Pilpres. Sejak Pemilu digelar, tingkat partisipasi pemilih terendah pada tahun 2014 dengan angka partisipasi 68% (*Kpu.go.id*). Ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih

secara umum yang sangat tinggi.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu yang tinggi tersebut tidak serta merta menunjukkan tingginya tingkat kesadaran politik publik. Ia hanya menunjukkan loyalitas buta atas realitas politik yang ada. Hal itu ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi publik dalam kegiatan politik lainnya seperti dalam kontrol dan koreksi kebijakan. Padahal aktivitas politik ini wajib bagi rakyat secara personal ataupun berkelompok. Era kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun justru menunjukkan kecenderungan melemahnya kontrol publik terhadap pemerintahannya. Kondisi ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, narasi kritik sering dimaknai sebagai ujaran kebencian yang berujung pada persekusi ataupun pelaporan oleh pihak pendukung Pemerintah kepada Kepolisian. Pada era ini juga para pendengung (*buzzer*) Pemerintah mendapatkan angin segar untuk mencitrapositifkan kebijakan Pemerintah sekaligus mendiskreditkan suara-suara kritik.

Tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu lebih disebabkan oleh kemampuan mobilisasi massa partai politik dan politisi, baik melalui pencitraan dan/atau politik uang. Perilaku politik ini efektif dalam masyarakat yang rendah pendidikan dan kesadaran politiknya.

Kesadaran politik Islam juga masih sangat rendah. Hal itu ditandai dengan dominannya partai politik sekuler dan tingginya raihan suara mereka dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu terakhir (2024), tersisa 3 partai politik yang berasaskan Islam, yaitu PPP, PKS dan Partai Umat. Partai politik berasas Islam yang lolos ke Senayan (DPR) hanyalah PKS dengan perolehan suara 8,4% atau 53 kursi dari total 580 kursi, menempati posisi 6 dari 8 partai politik yang lolos ke Senayan (*Kpu.or.id*). Suaranya pun nyaris tak terdengar di mimbar Parlemen dalam menyuarakan aspirasi Islam untuk menjadi hukum positif.

Partisipasi politik organisasi masyarakat (ormas) Islam pun masih rendah, khususnya dalam konteks *muhaasabah* (kontrol) terhadap

kekuasaan dan perjuangan kebijakan publik yang berbasis syariah Islam. Alih-alih menyuarakan penerapan syariah Islam, justru terjebak dalam permainan politik penguasa. Salah satunya melalui pemberian izin konsesi lahan tambang.

Praktis dalam politik kekuasaan saat ini, Islam tetap terpinggirkan. Umat Islam pun masih berada dalam kubangan politik sekuler. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir upaya menjauhkan umat dari politik Islam kian gencar. Propaganda ‘politik identitas’ massif dilakukan oleh Pemerintah, partai politik, politisi, akademisi dan para aktivis politik sekuler dengan menempatkan politik Islam sebagai politik identitas dalam makna negatif. Gagasan politik Islam, penerapan Syariah Islam dan penegakan institusi politik Islam (Khilafah) diposisikan sebagai politik identitas yang wajib dilawan dan dilarang. Propaganda ini berjalan massif sejalan dengan program deradikalisasi dan moderasi beragama yang dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga negara.

## Jalan Politik Islam

Nabi Muhammad saw. mengingatkan, “Seorang Mukmin tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali.” (*Shahih Muslim*, No. 5317).

Lalu bagaimana dengan umat Islam yang dalam satu abad terakhir ini terjerebab dalam kesalahan politik yang berulang-ulang? Umat Islam tentu harus keluar dari kubangan politik sekuler tersebut. Jalan keluarnya adalah satu: membangun kesadaran politik Islam pada dirinya.

Umat Islam harus melek politik; melek terhadap realitas dan peristiwa politik; melek tentang konsepsi politik Islam, dan melek tentang metode perjuangan politik yang bisa mengantarkan Islam pada kekuasaan.

Terkait dengan realitas dan peristiwa politik, umat Islam perlu memahami bahwa hakikat realitas dan peristiwa politik bukanlah pada tampilan depannya, tetapi sesuatu yang berada

di baliknya. Hal itu hanya memungkinkan diketahui melalui penelaahan berbagai peristiwa politik yang melingkupinya, termasuk yang bersifat global. Misalnya kekuasaan Joko Widodo selama dua periode (10 tahun) sesungguhnya tidaklah terletak dan bertumpu pada dirinya, melainkan pada pihak-pihak yang berada di balik kursinya. Demikian pula terhadap kekuasaan Prabowo ke depannya. Mereka hanyalah halaman depan dari wajah politik yang dikendalikan oleh para kapitalis nasional dan global. Mereka dipekerjakan untuk melayani kepentingan para kapitalis tersebut.

Pemahaman terhadap konsepsi politik Islam meniscayakan respon terhadap setiap realitas dan peristiwa politik berjalan dalam koridor Syariah Islam. Respon politik baik berupa tindakan maupun pernyataan bertumpu pada pemikiran politik yang berbasis pada syariah Islam. Misalnya tentang Pemilu. Umat Islam tidak sekedar berpikir tentang bagaimana umat Islam menduduki kursi kekuasaan. Namun, lebih penting dari itu adalah bagaimana Islam bisa sampai pada kekuasaan. Dalam makna Islam menjadi basis dan norma politik. Jika Pemilu tidak menawarkan dan memberikan ruang bagi Islam untuk berkuasa, maka pilihan bagi seorang muslim adalah abstain dari partisipasi Pemilu.

Abstainnya seorang muslim dari Pemilu bukan berarti apolitik atau abai dari politik, melainkan ia harus memilih menjalankan aktivitas politik yang lebih elegan, yaitu berpolitik dalam bingkai tuntunan syariah Islam. Hal ini meniscayakan pentingnya pemahaman terhadap metode perubahan politik yang *syar’i*. Dengan begitu umat Islam tidak ikut arus dan terjebak dalam permainan politik yang tidak islami (sekuler/liberal), yang dibungkus dengan slogan-slogan menarik dan terkesan islami, tetapi sesungguhnya justru semakin menjauhkan umat Islam dari tujuan mulia perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai sistem politik Islam (Khilafah).

*Wallahu a'lam bi ash-shawaab. []*

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA KHILAFAH

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustuur* Pasal 170)

**K**ebijakan pendidikan Negara Khilafah adalah politik yang mendasari pendidikan Negara Khilafah yang mencakup asas dan penyelenggaraan pendidikan secara praktis. Di dalam Pasal 170 dinyatakan:

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ مِنْهُجِ  
التَّعْلِيمِ هُوَ الْعَقِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، فَتَوْضَعُ مَوَادِّ  
الدِّرَاسَةِ وَطُرُقَ التَّدْرِيسِ جَمِيعَهَا عَلَى الْوَجْهِ  
الَّذِي لَا يَحْدُثُ أَيُّ خُرُوجٍ فِي التَّعْلِيمِ عَنْ هَذَا  
الْأَسَاسِ.

*Asas yang melandasi kurikulum pendidikan harus Aqidah Islam. Seluruh mata pelajaran dan metode pengajaran dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pendidikan tidak terjadi penyimpangan sedikitpun dari asas tersebut.*

Dikatakan dalam bahasa Arab: *'Alima ar-rajulu 'ilm[an] hashalat lahu haqiqatu al-'ilmi* (Seseorang mengetahui ilmu artinya telah sampai kepada dia hakikat ilmu).

Imam Fairuz Abadiy di dalam Kitab *Al-*

*Qamus al-Muhiith* mengatakan: *'Alimahu* seperti *sami'ahu*, *'ilm[an]* (dengan kasrah) maknanya 'arafahu (mengetahuinya). *Alima huwa fii nafsihi* (Dia mengetahui apa yang ada di dalam jiwanya). Laki-laki itu *'aalim (isim faa'ii)* dan *'aliim (isim fa'ii)*. Jamaknya, *'ulamaa` wa 'ullaam*. Makna bahasa ini merupakan makna asal dari kata (*'alima*) dan semua *musytaaqa*-nya. Oleh karena itu, makna kata *'alima* dan semua *musytaaqa* dari katanya *'alima* harus dibawa pada makna tersebut jika tidak ada *qariinah* (indikasi) yang memalingkannya ke arah makna istilah.

Ketika dikatakan *manhaj al-ta'liim* (kurikulum pendidikan), yang dimaksud adalah makna bahasanya, yakni semua pengetahuan (*kullu ma'rifah*). Kurikulum pendidikan adalah ungkapan yang menggambarkan tentang asas-asas yang membangun maklumat-maklumat yang hendak diajarkan, dan tentang topik-topik yang dicakup oleh maklumat-maklumat tersebut dari satu sisi, dan metode yang digunakan untuk memberikan maklumat-maklumat tersebut dari sisi yang lain. Kurikulum pendidikan mencakup dua hal: (1) mata



pelajaran-mata pelajaran; (2) metode-metode pengajaran. Ketika Aqidah Islam adalah asas kehidupan seorang Muslim, asas Negara Islam dan asas interaksi-interaksi antara kaum Muslim, yakni asas masyarakat, maka semua pengetahuan yang didapatkan seorang Muslim dengan cara *talaqqiyasnya* juga harus Aqidah Islam. Sama saja apakah pengetahuan-pengetahuan tersebut berhubungan dengan kehidupannya, yakni hubungannya dengan orang lain, atau berhubungan dengan peran politiknya di negara, atau berhubungan dengan segala sesuatu di kehidupan ini, dan semua yang berhubungan sebelum dan sesudah kehidupan.

Dulu Rasulullah saw. berjalan dengan masyarakat dengan mengajak mereka pada Islam terlebih dulu, yakni mengajak mereka untuk menyakini Aqidah Islam. Jika mereka telah masuk Islam, beliau mulai mengajarkan mereka hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, Aqidah Islam adalah asas yang mendasari keberlangsungan pengajaran Rasulullah saw. kepada kaum Muslim. Ketika terjadi gerhana matahari saat putra beliau, Ibrahim wafat, masyarakat mengatakan bahwa gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim. Beliau saw. mengatakan kepada mereka:

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ»

*Sungguh matahari dan rembulan merupakan dua ayat dari ayat-ayat Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian maupun kehidupan seseorang (HR al-Bukhari dan Muslim).*

Ini menunjukkan bahwa Rasul saw. menjadikan Aqidah Islam sebagai asas untuk menyampaikan informasi-informasi tentang gerhana matahari dan bulan. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan Abu Said al-Khudri, bahwa ia berkata:

حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْرَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْتُمَا النَّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعُزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعُزِلَ، وَقُلْنَا نَعُزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "مَا عَلَبَكُمَا أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

*Kami keluar bersama Rasulullah saw dalam Perang Bani Musthaliq. Kemudian kami berhasil menawan sabyi (tawanan wanita dan anak-anak) dari sabaya Arab. Hingga kami berhasrat kepada para wanitanya, sedangkan selibat menyulitkan kami, dan kami lebih suka melakukan 'azl. Ketika kami hendak melakukan 'azl, kami berkata, "Bagaimana kita hendak melakukan 'azl, sedangkan Rasulullah saw ada di tengah-tengah kita, sebelum kita bertanya kepada beliau?" Lalu kami bertanya kepada beliau tentang hal itu ('azl). Rasulullah saw menjawab, "Hendaknya kalian tidak melakukan itu. Sebabnya, tidak ada satupun jiwa yang telah Allah tetapkan tercipta hingga Hari Kiamat, kecuali ia pasti akan tercipta."*

Di dalam riwayat lain dituturkan bahwa mereka bertanya kepada Nabi saw. tentang 'azl. Beliau menjawab:

مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*Hendaknya kalian tidak melakukan. Sungguh Allah telah menetapkan siapa yang Dia ciptakan hingga Hari Kiamat.*

Imam Muslim juga mengeluarkan riwayat yang semisal. Rasulullah saw. menjawab pertanyaan mereka tentang 'azl dari aspek



keberadaan 'azl yang bisa mencegah kehamilan. Beliau menjadikan asas jawaban beliau dengan keimanan pada Ilmu Allah, yakni dengan Aqidah Islam.

Banyak hadis yang menunjukkan hal seperti itu. Semua itu menunjukkan bahwa menjadikan Aqidah Islam sebagai asas bagi program pendidikan merupakan kewajiban atas negara. Hal ini tidak boleh dilalaikan oleh Negara secara mutlak.

Namun, menjadikan Aqidah Islam sebagai asas bagi program pendidikan tidak berarti semua pengetahuan harus terpancar dari Aqidah Islam. Sebabnya, hal ini tidak diperintahkan oleh syara'. Hal ini juga bertentangan dengan fakta. Aqidah Islam tidak memancarkan semua pengetahuan. Sebabnya, Aqidah Islam khusus (hanya berhubungan) dengan aqidah dan hukum-hukum. Tidak berhubungan dengan selain keduanya. Makna menjadikan Aqidah Islam sebagai asas bagi program pendidikan adalah bahwa pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan dan hukum-hukum wajib terpancar dari Aqidah Islam. Sebabnya, Aqidah Islam datang untuk menjelaskan keduanya. Adapun pengetahuan-pengetahuan selain aqidah-aqidah dan hukum-hukum, maka makna menjadikan Aqidah Islam sebagai asas baginya adalah bahwa pengetahuan-pengetahuan dan hukum-hukum tersebut diadopsi berdasarkan Aqidah Islam. Artinya, Aqidah Islam dijadikan sebagai standar. Semua yang bertentangan dengan Aqidah Islam tidak boleh diambil dan diyakini. Sebaliknya, semua yang tidak bertentangan dengan Aqidah Islam boleh diambil.

Oleh karena itu, Aqidah Islam merupakan tolok ukur dalam hal mengambil dan menyakini pengetahuan-pengetahuan selain aqidah-aqidah dan hukum-hukum. Adapun dari sisi mengetahui dan mempelajari, maka tidak ada dalil yang melarang dari mempelajari ilmu.

Dalil-dalil datang untuk mendorong mencari ilmu. Rasulullah saw. bersabda:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

*Mencari ilmu adalah fardhu atas setiap Muslim.*

Imam Zarkasyi berkata di dalam Kitab *At-Tadzkirah*: Al-Hafidh Jamaluddin al-Maziy berkata, "Hadis ini diriwayatkan dari jalan-jalan yang mencapai derajat *hasan*."

Kata 'ilm termasuk umum berlaku pada semua ilmu yang bermanfaat. Imam Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi di dalam Kitab *Syu'ab al-Imaan* mengeluarkan riwayat dari Katsir bin Qais, sabda Nabi saw.:

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ

طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ»

*Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan bagi dirinya salah satu jalan di antara jalan-jalan ke surga.*

Kata 'ilm[an]' di sini bersifat mutlak berlaku pada semua ilmu yang bermanfaat.

Disebutkan di dalam al-Quran, pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam, seperti:

﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾

*Tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa (QS al-Jatsiyah [45]: 24).*

Juga ayat-ayat lain yang menunjukkan kebolehan mempelajari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Aqidah Islam.

Dari sini dapat dipahami bahwa mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang bertentangan dengan Aqidah Islam, tanpa mengadopsi dan tanpa meyakininya, adalah boleh. Yang dilarang adalah meyakini dan mengadopsi pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Aqidah



Islam. Misalnya pandangan Darwin yang menyatakan bahwa manusia berevolusi dari kera. Padahal, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

*Sungguh penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada dirinya, "Jadilah" (seorang manusia)! Lalu jadilah dia (QS Ali Imran [3]: 59).*

Seorang Muslim juga tidak boleh mengadopsi dan menyakini pandangan evolusi materi kaum sosialis yang menyatakan bahwa materi berevolusi dari materi itu sendiri dengan evolusi yang bersifat pasti dan tidak ada sesuatu lain (di luar materi) yang mengubahnya. Karena itu, kata mereka, tidak ada Tuhan sang Pencipta. Padahal Allah SWT telah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tetapkan beriman kepada Allah (QS an-Nisaa' [4]: 136).*

Artinya, tetapkan mengimani eksistensi atau wujud-Nya. Allah SWT juga berfirman:

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾

*(Dialah) Yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada antara keduanya (QS al-Furqan [25]: 59).*

Seorang Muslim juga dilarang mengadopsi dan menyakini apa yang disebutkan dalam Kitab *Al-Adab al-Jahiliyy* yang menyatakan bahwa kisah Nabi Ibrahim as. dusta dan tidak ada asalnya, dan dibuat-buat oleh para perawi. Padahal kisah Nabi Ibrahim as. disebutkan di dalam al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa kisah itu benar-benar terjadi dalam kenyataan.

Alhasil, Aqidah Islam harus dijadikan sebagai asas kurikulum pendidikan, juga dijadikan tolok ukur untuk mengadopsi pengetahuan, apakah pengetahuan itu boleh diadopsi dan diyakini, atau hanya sebagai pengetahuan belaka.

Oleh karena itu, mengingkari kisahnya merupakan pendustaan terhadap al-Quran.

Pengetahuan-pengetahuan seperti ini dan yang semisal tidak akan dicantumkan di dalam kurikulum pendidikan, jika menyebabkan orang akan menadopsi dan menyakininya. Oleh karena itu, pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak dicantumkan di dalam kurikulum pendidikan dasar. Sebabnya, mempelajarinya diduga kuat akan berakibat siswa akan menyakini dan mengadopsinya. Jika dicantumkan harus disertakan pula penjelasan kekeliruan dan kesesatannya.

Alhasil, Aqidah Islam harus dijadikan sebagai asas kurikulum pendidikan, juga dijadikan tolok ukur untuk mengadopsi pengetahuan, apakah pengetahuan itu boleh diadopsi dan diyakini, atau hanya sebagai pengetahuan belaka.

*Wallahu a'lam. [Gus Syams]*

## AL-MUTHLAQ DAN AL-MUQAYYAD

### الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ

**A**l-Muthlaq maknanya adalah *mâ uthliqa*. Secara bahasa, seperti disampaikan oleh Ibnu Faris di dalam *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, maknanya adalah *infikâku 'an jam'i al-quyûd* (terlepas atau bebas dari semua belenggu/batasan).

Sebaliknya, *al-muqayyad* maknanya adalah *mâ quyyida* (sesuatu yang dibatasi), atau *mâ ashâbahu at-taqyid* (sesuatu yang dikenai pembatasan).

Secara istilah ushul fikih, seperti dinyatakan oleh Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Ibnu al-Hajib (w. 646 H) di dalam *Mukhtashar Ibni al-Hâjib*, juga Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakshiyah al-Islâmiyyah* Jilid 3, *al-muthlaq* adalah lafal yang menunjukkan pada *madlûl* yang tersebar di dalam jenisnya (*al-lafzhu ad-dâlu 'alâ madlûl syâi' [in] fi jinsih*). Definisi ini dijelaskan oleh Syaikh 'Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-*

*Wushûl ilâ al-Ushûl*. Disebutkan bahwa “*syâi' [un] fi jinsih*” agar keluar dari definisi ini, *isim al-'alam* dan *isim makrifat* baik dengan *alif lâm li al-'ahdi*, *li al-istighrâq* dan *li al-jinsi* serta *isim jamak makrifat*. Hal itu karena makna yang tersebar dalam jenisnya (*syâi' [un] fi jinsih*) bahwa itu mungkin dimutlakan terhadap semua individu atau unit jenis tersebut tanpa penentuan. Jika dikatakan *muslim [un]* maka sah ditujukan pada semua individu Muslim. Dengan demikian kita katakan: *Hadzâ Muslim [un] wa dzâka Muslim [un]*.... (Ini Muslim dan itu Muslim...). Itu tidak mungkin dikatakan pada *isim al-'alam* semisal Muhammad, Ali, dst. Sebabnya, itu tidak tersebar dalam jenis tersebut seluruhnya melainkan disebutkan atas individu tertentu. Demikian juga *isim makrifat* dengan *alif lâm al-'ahdi* seperti *al-muslim* yang dimaksudkan adalah Muslim tertentu. Demikian juga *alif lâm istighrâq al-jinsi* dan jamak makrifat. Sebabnya,



itu tidak tersebar dalam jenis tersebut, melainkan semua individu jenis tersebut terderivasi di bawahnya atau tercakup olehnya. Jika dikatakan *al-Muslimu yu' minu* maka semua Muslim terderivasi di bawahnya atau tercakup oleh lafal *al-muslim* itu.

Namun, jika dikatakan *muslim[un]* maka lafal ini hanya mencakup satu orang, tetapi tidak tertentu, yakni dia tersebar dalam jenisnya. Karena itu lafal *al-muslimu* dengan *alif lām al-jinsi* disebut lafal umum sebab semua individunya terderivasi di bawahnya. Adapun lafal *muslim[un]* disebut lafal *al-muthlaqu*. Sebabnya, itu menunjuk pada seorang Muslim yang tidak tertentu, tetapi tersebar dalam jenisnya.

Hal itu tidak hanya berlaku pada satu atau tunggal, melainkan juga berlaku atas lebih dari satu (*isim mutsanna* dan *jamak*). Misalnya, *rajulāni* atau *rijâl[un]*, maka itu menunjuk pada dua pria atau sejumlah pria yang tidak tertentu, tetapi tersebar dalam jenisnya, yakni tersebar pada jenisnya yakni pria. Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di dalam *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmî* bahwa lafal *al-muthlaqu* itu menunjuk pada satu individu (*fard[un]*) atau banyak individu (*af'râd[un]*) secara penyebaran (*'âlâ sabîli asy-syuyû*) dan tidak dibatasi dengan sifat. Misal, *rajul[un]* dan *rijâl[un]*, *kitaab[un]* dan *kutub[un]*, *thâ'ir[un]* dan *thuyûr*, *thâlib* dan *thulâb*. Itu menunjuk pada satu unit atau banyak unit yang tidak tertentu dan tersebar pada jenisnya.

Penunjukan lafal mutlak terhadap sesuatu itu adalah terhadap esensinya. Di situlah Imam Fakhru al-Islam al-Bazdawi (w. 482 H) di dalam *Ushûl al-Bazdawî* mendefinisikan *al-muthlaqu* adalah lafal yang melihat zat tanpa sifat-sifat baik dengan penafian maupun penetapan. Ini sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam *Al-*

*Maḥshûl*, juga oleh Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) di dalam *Baḥru al-Muḥîṭh fî Ushûl al-Fiqh*, bahwa *al-muthlaqu* itu merupakan lafal yang menunjuk pada esensi sesuatu (*al-mâhiyah*) dari sisi dirinya sendiri tanpa batasan. Dengan kata lain, dikatakan *al-muthlaqu* adalah lafal yang tidak disifati dengan sifat sama sekali. Imam al-Qarafi (w. 684 H) di dalam *Syarḥu Tanqîḥ al-Fushûl* menjelaskan bahwa lafal *al-muthlaqu* itu adalah setiap hakikat yang dinilai dari sisi dirinya sendiri, yakni bahwa lafal itu menunjuk pada esensi zat (*al-mâhiyah*) tanpa batasan. Dengan kata lain, dalam penjelasan Taqiyyuddin as-Subki (w. 756 H) di dalam *Al-Ibhâj Syarḥu Minhâj al-Wushûl*, bahwa *al-muthlaqu* secara mutlak adalah yang lepas dari semua batasan, yang menunjukkan atas esensi sesuatu tanpa menunjuk pada sesuatu dari keadaan-keadaan dan sifat-sifatnya.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, bahwa itu merupakan lafal-lafal yang menunjuk pada individu atau banyak individu yang tidak tertentu tanpa memperhatikan *al-'umûm* atau *al-istighrâq*, melainkan yang dimaksud adalah esensi atau hakikat menurut kehadirannya di benak yang terlepas dari sifat-sifat. Jadilah *al-muthlaqu* itu setara dengan *nakirah* selama tidak dimasuki oleh keumuman.

Lafal *al-muthlaqu* seperti yang dijelaskan itu, setara atau sama dengan *isim nakirah* yang bukan lafal umum. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) di dalam *Rawḍah an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir* menjelaskan, *al-muthlaqu* adalah *nakirah* dalam konteks perintah. Adapun menurut Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm*, *al-muthlaqu* itu adalah *nakirah* dalam konteks penetapan (*an-nakirah fî siyâq al-itsbât*). Hanya saja, yang dimaksudkan *nakirah* di sini



adalah *nakirah* hakiki (*nakirah haqiqiyah*). Dengan demikian *al-muthlaqu* adalah *nakirah* hakiki dalam konteks penetapan (*nakirah haqiqiyah fi siyâqi al-itsbâth*).

Penjelasannya, dikatakan *nakirah* karena *al-muthlaqu* itu lafal yang tidak tertentu yang tersebar dalam jenisnya. Dengan demikian, dengan penyebutan *nakirah* itu mengeluarkan isim makrifat dan yang penunjukannya tertentu atau umum *istighrâq*. Dikatakan “dalam konteks penetapan (*fi siyâqi al-itsbâth*)” untuk mengeluarkan *nakirah* dalam konteks penafian atau mirip penafian. Sebabnya, itu termasuk redaksi umum dan bukan mutlak. Jadi dia mencakup semua unit dalam jenisnya dan bukan tersebar dalam jenisnya (*laysa syâ`i`[an] fi jinsihâ*). Dalam konteks penetapan mencakup pada konteks perintah (*fi siyaq al-amr*). Dikatakan *nakirah* hakiki (*nakirah haqiqiyah*) untuk mengeluarkan *nakirah* yang tidak hakiki, yakni secara lafal *nakirah*, tetapi secara makna makrifat. Contohnya: “*Ra`aytu rajul[an]* (saya melihat seorang pria).” Kata rajulan ini secara lafal adalah *nakirah*, tetapi sudah tertentu secara makna disebabkan pandangan itu hanya tertuju pada pria tertentu. Jadi ia bukan seorang pria yang tersebar dalam jenisnya, melainkan pria tertentu, sehingga bukan lafal *al-muthlaqu*.

*Nakirah* hakiki dalam konteks penetapan ini mungkin ada dalam tiga bentuk: *Pertama*: Perintah menggunakan *mashtar*. Contohnya dalam firman Allah SWT tentang *kafarah* sumpah:

﴿...أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾

...atau memerdekakan seorang budak. Siapa saja yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafarah-nya ada:ah puasa selama tiga hari (QS al-Maidah [5]: 89).

Contoh lain adalah firman Allah SWT tentang *kafarah* bagi orang yang ihram, yang bercukur sebelum waktunya karena sebab sakit di kepala (hukum ini juga mencakup memakai pakaian atau parfum):

﴿...فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atas dirinya ber-fidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban (QS al-Baqarah [2]: 196).

*Kedua*, dalam bentuk perintah berupa *fi`il*. Contohnya, sabda Rasul saw. kepada Kaab bin ‘Ujrah ketika di Hudaibiyah dan sakit di kepala karena kutu:

﴿فَاخْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمِ فَرْقًا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ-

وَالْفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْحٍ-أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَنْسُكٌ

نَسِيكَةً﴾

Cukurlah kepalamu dan beri makan faraq di antara enam orang miskin (faraq adalah tiga sha’), atau berpuasalah tiga hari, atau sembelihlah seekor kambing (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi – redaksi Muslim).

*Ketiga*, dalam bentuk informasi masa depan. Misalnya, kalau orang berkata “*Sa-ashûmu yawm[an]* (Aku akan berpuasa sehari).” Termasuk dalam hal ini sabda Rasul saw.:

﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ﴾

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Hibban).

Lafal *waliy[in]* dalam bentuk *nakirah* penetapan dalam konteks berita. Ini



merupakan lafal *al-muthlaqu*.

## Al-Muqayyad

*Al-Muqayyad* secara bahasa adalah sesuatu yang dibatasi. Secara istilah, Ibnu al-Hajib (w. 646 H) menyatakan di dalam *Mukhtashar Ibni al-Hâjib* bahwa *al-muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan tidak pada sesuatu yang tersebar dalam jenisnya. Dalam penjelasan Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, *al-muqayyadu* adalah lafal mutlak yang dihilangkan ketersebarannya dalam jenisnya secara total atau parsial.

Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, juga Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* jilid 3, menjelaskan bahwa *al-muqayyad* itu: *Pertama*, lafal yang menunjukkan atas *madluul* tertentu semisal *Zayd[un]*, *Amru*, dsb. *Kedua*, lafal yang menunjukkan atas sifat yang *madluul*-nya mutlak dengan sifat tambahan, semisal *raqabat[in] mu'minat[in]*. Meski ini menyebar pada hamba sahaya Mukmin dan itu mutlak sehingga mencakup setiap hamba sahaya Mukmin, ia dinisbatkan pada hamba sahaya secara mutlak. Dengan demikian *raqabat[in] mu'minat[in]* itu bersifat *muqayyad*. Jadi *raqabat[in] mu'minat[in]* itu bersifat *muthlaq* dari satu sisi dan dari sisi lain bersifat *muqayyad*.

Contoh lafal *al-muqayyad* adalah firman Allah SWT berikut:

﴿... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْهُنَّ مَسْلَمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ...﴾

﴿فَدِيَّةٌ مِّنْهُنَّ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْهُنَّ فَمَنْ

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ...﴾

...*(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...maka*

*Al-Muqayyad* secara bahasa adalah sesuatu yang dibatasi. Secara istilah, Ibnu al-Hajib (w. 646 H) menyatakan di dalam *Mukhtashar Ibni al-Hâjib* bahwa *al-muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan tidak pada sesuatu yang tersebar dalam jenisnya. Dalam penjelasan Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, *al-muqayyadu* adalah lafal mutlak yang dihilangkan ketersebarannya dalam jenisnya secara total atau parsial.

*(hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa saja yang tidak memperoleh (untuk membayar diyatnya), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut (QS an-Nisa' [4]: 92).*

Di sini *raqabah* dibatasi dengan iman, *diyyat* dengan *musallamah ilâ ahlihi* (diserahkan kepada keluarga korban) dan puasa dua bulan dengan berturut-turut (*mutatâbi'atin*).

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

# PENIMBUNAN YANG HARAM

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْتَكَرَ الطَّعَامُ»

Rasulullah saw. telah melarang makanan untuk ditimbun. (HR Ibnu Abiy Syaibah, ar-Ruyani, ath-Thabarani, Abu Thahir al-Mukhallish, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Abdi al-Barr).

Hadis ini dikeluarkan dari penuturan Abu Umamah al-Bahili oleh Ibnu Abiy Syaibah (w. 235 H) di *Mushannaf Ibnu Abiy Syaibah* no. 20387, Abu Bakar ar-Ruyani (w. 307 H) di *Musnad ar-Rûyânî* no. 1199, ath-Thabarani (w. 360 H) di *Mu'jam al-Kabîr* no. 7776, Abu Thahir al-Mukhallish (w. 393 H) di *al-Mukhallishiyât* no. 2240, al-Hakim (w. 405 H) di *al-Mustadrak 'alâ ash-Shahihayn* no. 2163, al-Baihaqi (w. 458 H) di *Sunan al-Kubra* no. 11148 dan *Syu'ab al-îmân* no. 10699, Ibnu Abdi al-Barr (w. 463 H) di *al-Istidzâr* no. 1311.

Umar bin al-Khatthab ra. menuturkan bahwa Rasul saw bersabda:

«مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ»

Siapa saja yang menimbun makanan (sehingga terhalang) dari kaum Muslim, niscaya Allah menimpakan pada dirinya penyakit kusta/lepra dan kebangkrutan (HR Ibnu Majah no. 2155, al-Baihaqi di *Syu'ab al-îmân* no. 10705).

Said bin al-Musayyab menuturkan dari Ma'mar bin Abdullah al-'Adawi, Rasul saw. bersabda:

«لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ»

Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang bermaksiat (HR Muslim no. 1605, Ahmad no. 15758-, 15759, 16760, 16761, Ibnu Majah no. 2154, Abu Dawud no. 3447,

at-Tirmidzi no. 1267, Ibnu Hibban no. 4936, al-Hakim no. 2163, al-Baihaqi di *Sunan al-Kubra* no. 11148).

Menurut para ulama, hadis-hadis ini menjadi dalil keharaman *al-iẖtikâr*. *Al-iẖtikâr* adalah *maṣḥar* dari *ḥakara-yaẖkiru-ḥakr[an] wa ḥakar[an]*. Di dalam Kamus *Al-Munawir*, secara bahasa artinya *zhalama* (bertindak zalim) dan *istabadda* (bertindak sewenang-wenang). Menurut Abul Abbas al-Fayumi di dalam *Mishbâḥ al-Munîr* dan Ibnu Manzhur di dalam *Lisân al-'Arab*, *al-iẖtikâr* secara bahasa adalah menahan makanan karena ingin harganya mahal. Bentuk isimnya *al-ḥukrah*.

Dalam hal ini, Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* menjelaskan, *al-muḥtakir* (orang yang menimbun), yakni orang yang mengumpulkan barang menunggu harganya mahal sehingga dia jual dengan harga mahal. Akibatnya, penduduk negeri kesulitan untuk membeli barang tersebut.

Kenyataan *al-muḥtakir* adalah orang yang mengumpulkan barang menunggu harganya mahal hal itu karena kata *ḥakara* secara bahasa artinya *istabadda* (bertindak sewenang-wenang). Di antaranya kesewenang-wenangan dengan menahan barang supaya dia jual dengan harga mahal. *Ihtakara asy-syay' a* secara bahasa adalah mengumpulkan dan menahannya menunggu harganya mahal sehingga bisa dijual dengan harga tinggi. Adapun keberadaan syarat berlakunya *al-*

*ih tikâr* adalah mencapai batas menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang yang ditimbun. Hal itu karena fakta *al-ih tikâr* tidak terjadi kecuali pada kondisi ini. Andai tidak menyulitkan orang untuk membeli barang, tentu tidak terjadi pengumpulan barang dan tidak ada kesewenang-wenangan dengan dijual dengan harga tinggi. Berdasarkan ini, bukan syarat dalam *al-ih tikâr* membeli barang. Namun, semata-mata mengumpulkan barang menunggu harganya mahal sehingga dapat dijual dengan harga tinggi, itulah yang dinilai sebagai *ih tikâr*.

Jadi semata mengumpulkan barang dan menahannya, dan mengatur volume penjualannya, tidak otomatis menjadi penimbunan yang diharamkan. Namun, hal itu harus sampai tingkat menyulitkan atau memadaratkan masyarakat. Itulah penimbunan yang diharamkan seperti yang dipahami oleh Sa'id bin al-Musayyab, perawi hadis *al-ih tikâr*.

Imam al-Baihaqi di *Sunan ash-Shughrâ* hadis no. 2023 menuturkan, dalam apa yang diriwayatkan Abu az-Zinad, ia berkata: Aku katakan kepada Sa'id bin al-Musayyab: Sampai padaku bahwa engkau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "*Lâ yahtakiru bi al-madînati illâ khâthi`un* (Tidaklah menimbun di Madinah kecuali orang yang bermaksiat)," sementara engkau menimbun. Ia berkata, "Ini bukan yang disabdakan Rasulullah saw., melainkan dia adalah orang mendatangkan barang ketika harganya mahal dan dia mahalkan lagi. Adapun dia mendatangkan sesuatu dan harganya murah lalu dia beli dan dia simpan, lalu jika orang-orang memerlukan, dia keluarkan, maka itu adalah baik."

As-Subki seperti dikutip oleh asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awthâr* mengatakan, "Walhasil, *'illat*-nya adalah jika itu mendatangkan dharar terhadap kaum Muslim. *Al-Ih tikâr* tidak diharamkan kecuali pada bentuk yang memadaratkan masyarakat. Sama saja dalam hal itu antara makanan dan yang lainnya sebab mereka menyulitkan (memadaratkan) semua orang."

Adapun mengenai cakupan penimbunan, penyebutan makanan (*ath-tha'âm*) di hadis-hadis tidak memberi faedah pembatasan atau pengkhususan penimbunan pada makanan saja. Imam asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awthâr* menyatakan, "Pernyataan dengan lafal *ath-tha'âm* di beberapa riwayat tidak layak untuk membatasi riwayat lainnya yang mutlak, tetapi itu termasuk pernyataan atas satu item yang dicakup oleh kemutlakan. Hal itu karena penafian hukum dari selain makanan tidak lain karena *mafhûm al-laqab* dan itu tidak diamalkan menurut jumhur. Selama demikian maka tidak layak untuk membatasi menurut apa yang telah ditetapkan dalam ushul."

Hadis yang menyatakan makanan (*ath-tha'âm*) juga tidak dapat mengkhususkan hadis-hadis *al-ih tikâr*. Al-'Allamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, "Lafal *ath-tha'âm* itu tidak layak untuk mengkhususkan riwayat-riwayat yang umum. Itu adalah pernyataan atas salah satu item yang dicakup oleh keumuman. Adapun mengapa hadis-hadis *ath-tha'âm* tidak layak untuk mengkhususkan, hal itu karena *al-mukhashshish* harus berupa bagian dari lafal umum. Artinya, *ath-tha'âm* harus merupakan bagian dari keumuman hadis-hadis *al-ih tikâr*.

Namun, dengan memperhatikan hadis-hadis *al-ih tikâr*, jelas memberi faedah umum pada semua orang yang menimbun, yakni *al-muhtakirîn*. Hadis riwayat Imam Muslim "*lâ yahtakiru*", adalah *fi'l[un]* yang dinafikan sehingga memberi faedah umum pada semua *muhtakir* (orang yang menimbun). Adapun kata *ath-tha'âm* yang merupakan obyek yang ditimbun tidak mengkhususkan keumuman *al-muhtakirîn* sebab *ath-tha'âm* bukan bagian dari *al-muhtakirîn*."

Dengan demikian penimbunan apapun diharamkan selama memenuhi kriteria penimbunan di atas. Juga diharamkan monopoli apapun yang mengakibatkan mahalnya harga yang membuat masyarakat kesulitan.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yahya Abdurrahman]



# DI BALIK PEMBUNUHAN HASSAN NASRALLAH

Pukul enam sore Hari Jumat, 27 September 2024, waktu Beirut dan Madinah, terjadi peristiwa penting. Sepuluh ledakan yang sangat dahsyat terdengar di pinggiran selatan Beirut, kubu Partai Iran. Ini tak lama setelah berakhirnya pidato Netanyahu yang lancang dan menantang di depan aula yang hampir kosong dari delegasi resmi dan politisi. Setelah itu peserta yang hadir (yang sengaja dibawa) memberi dia tepuk tangan. Lalu tiba-tiba dia meninggalkan konferensi pers, setelah sekretaris militernya berbisik di telinganya! Tak lama kemudian, foto-foto Netanyahu tersebar. Dikatakan bahwa dia sedang memberikan perintah untuk melakukan operasi besar.

Segera setelah itu, foto-foto Menteri Pertahanan entitas Yahudi, Yoav Galant, Kepala Staf dan Kepala Angkatan Udara dipublikasikan. Dikatakan bahwa mereka tengah melanjutkan operasi memburu “tangkapan berharga”. Ini sebagai bagian persaingan yang menjijikkan untuk menumpahkan darah umat Islam, dengan menjatuhkan berton-ton bom penghancur

bunker. Tak peduli itu berarti menghancurkan kompleks perumahan yang terdiri dari beberapa bangunan dengan penduduknya hingga rata dengan tanah. Alasannya adalah untuk mencapai sasaran emas, seperti yang dijelaskan oleh orang-orang Yahudi. Pasalnya, di sana ada Sekretaris Jenderal Partai Iran Lebanon, Hassan Nasrallah, dan sejumlah besar pemimpin.

Pada Sabtu pagi, orang-orang Yahudi mengkonfirmasi pembunuhan Nasrallah, sementara pernyataan dari Partai Iran Lebanon ditunda hingga sore hari di hari yang sama. Iran juga mengumumkan pembunuhan para pemimpin senior yang berada di lokasi kejadian. Tidak diragukan ini merupakan langkah besar dalam kancah politik Lebanon dan Kawasan. Terutama sejak hierarki kepemimpinan militer partai tersebut dibersihkan dalam serangan ini. Apalagi sebelumnya, terjadi serangan terhadap pimpinan Unit Radwan yang berkumpul pada Hari Jumat, 20/9/2024. Adapun para pemimpin lainnya dihabisi melalui pembunuhan orang-perorang.

Sejak Operasi Badai Al-Aqsa (10/7/2023) Partai Iran memasuki garis yang mereka

gambaran sebagai front (Dukungan dan Pengalihan) pada 10/8/2023 dan terus berlanjut hingga sekarang. Mereka mengandalkan pegeboman rudal dan *drone* terhadap sasaran militer entitas Yahudi, menghindari sasaran sipil, agar tidak melampaui apa yang mereka sebut aturan pertempuran. Sebaliknya, entitas Yahudi menginjak-injak semua aturan ini hingga membunuh Nasrallah, para pemimpin senior dari partai dan Iran. Mereka membunuh ratusan korban sipil untuk mencapai tujuan ini.

Penting diperhatikan, sebagaimana diungkap dalam Majalah *Al-Wa'ie*, Edisi 217, Maret 2005: "Operasi pembunuhan terhadap tokoh politik terkemuka tidak dilakukan berdasarkan keputusan lokal. Namun, semua itu harus mendapat perlindungan internasional dari satu atau lebih negara besar, yaitu apa yang disebut "pencabutan perlindungan politik" dari tokoh yang menjadi sasaran. Keputusan menghabisi secara fisik dapat berasal dari luar negeri kepada pihak lokal, atau sebaliknya, yaitu pihak lokal meminta izin untuk menghabisi, dan persetujuan datang dari luar negeri, apabila pihak luar yakin akan keabsahan pendapat agen lokal tersebut..."

Pembunuhan pemimpin Hizbullah ini menimbulkan beragam pertanyaan penting. Di antaranya:

1. Apakah itu menunjukkan pencabutan perlindungan politik (terhadap Hizbullah)?!
2. Apakah itu bagian formulasi baru untuk kawasan, khususnya di Palestina dan Lebanon, sehingga Amerika memasang jebakan bagi angkatan bersenjata utama di kawasan, untuk melenyapkan sayap militer mereka, sebagai persiapan penyelesaian?!
3. Apakah negara-negara antek atau negara-negara satelit menjual para pengikut dan loyalisnya demi mendapatkan hasil dari pelayanan mereka kepada tuannya, atau kepada negara di mana mereka berada dalam planetnya, selama bertahun-

tahun?!

4. Apakah kekuatan bersenjata ini dimaksudkan untuk mundur ke aktivitas politik, seperti yang terjadi ketika para pemimpin militer Organisasi Pembebasan Palestina dibersihkan dan para pemimpin politik dipertahankan. Apakah mereka masih melanjutkan upaya pembersihan para pemimpin militer faksi-faksi besar lainnya, agar langkah-langkah yang diambil kembali ke arah aktivitas politik, yang tercermin pada meja-meja perundingan yang diwarnai dengan darah dan potongan-potongan bagian tubuh?!
5. Apakah yang disebut sebagai poros perlawanan, yang dipimpin oleh Iran, tetap diam. Cukup dengan belasungkawa dan hiburan. Wajarkah hal yang seperti ini dilakukan oleh negara yang punya tekad, ketika seseorang mencoba untuk memotong kekuatannya?!
6. Apakah berkuasanya seorang presiden (reformis) di Iran, dan di sampingnya ada antek Amerika, Mohammad Javad Zarif, sebagai penasihat urusan strategisnya, sebagai sesuatu yang biasa dan hanya kebetulan saja?!

Hari-hari mendatang yang penuh dengan perkembangan dan perubahan, niscaya yang akan menjawab semua itu.

### Kesempatan Emas

Pembebasan dari ikatan ketergantungan dan hubungan dengan para antek dan boneka, ketika entitas Yahudi diguncang oleh serangan kelompok pejuang yang beriman, merupakan kesempatan yang baik bagi faksi-faksi yang bertikai untuk mengambil keputusan dan menyerang dengan kemampuan apa pun yang mereka miliki. Ini adalah kesempatan paling penting bagi tentara untuk memberontak melawan para penguasanya, serta bergerak

untuk menolong Palestina dan Lebanon.

Jika Allah SWT melihat tentara-tentara kaum Muslim telah mengambil langkah pertama, yakni dengan penuh keyakinan mereka bersegera berperang untuk memenuhi perintah-Nya, dalam QS at-Taubah ayat 14 (yang artinya): “*Perangilah mereka!*” Lalu dengan izin Allah, apa yang dijanjikan Allah SWT akan terwujud. “*Perangilah mereka! Niscaya Allah akan mengazab mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian, menghinakan mereka, dan memenangkan kalian atas mereka, serta melegakan hati kaum Mukmin, dan menghilangkan kemarahan (dari) hati mereka (kaum Mukmin). Allah menerima tobat siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (TQS at-

Semua rahasia mereka akan tersingkap. Allah Mahatahu atas apa saja yang mereka kerjakan. Jadi, siapa saja yang menjadikan selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, teman setia, dan kepercayaannya, padahal mereka telah dilarang untuk itu, maka tidak ada satu pun dari apa yang mereka lakukan, yang tersembunyi dari-Nya, dan Allah SWT akan membalas semuanya. Jika baik maka dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Jika buruk maka dibalas dengan keburukan yang setimpal.

Taubah [9] : 14-15).

Sebaliknya, jika kesempatan itu tidak mereka ambil, maka akibat buruk akan mereka rasakan, yaitu apa yang terdapat pada ayat berikutnya, pada ayat 16 surat yang sama. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan saja (tanpa diuji). Padahal Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang Mukmin sebagai teman setia. Allah Mahatahu atas apa saja yang kalian kerjakan* (TQS at-Taubah [9]: 16).

Maksud dari perangilah mereka, yakni Allah SWT menyeru kaum Muslim agar berjihad melawan mereka. Kemudian Allah akan mengazab mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian? Atau apakah kalian mengira, wahai orang-orang yang beriman, bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa cobaan dan ujian untuk menguji kalian, sehingga dengan itu diketahui siapa di antara kalian yang jujur dan dusta terkait komitmen beragama, juga dengan itu diketahui siapa di antara kalian yang berjihad di jalan-Nya, serta siapa yang menyia-nyiakan dan mengabaikan perintah-Nya, termasuk siapa saja yang tidak menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai teman setia dan kepercayaan?

Semua rahasia mereka akan tersingkap. Allah Mahatahu atas apa saja yang mereka kerjakan. Jadi, siapa saja yang menjadikan selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, teman setia, dan kepercayaannya, padahal mereka telah dilarang untuk itu, maka tidak ada satu pun dari apa yang mereka lakukan, yang tersembunyi dari-Nya, dan Allah SWT akan membalas semuanya. Jika baik maka dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Jika buruk maka dibalas dengan keburukan yang setimpal. [Ir. Majdi Ali Sumber: *alraiah.net*, 2/10/2024].

# PEMBUKAAN DAYEUH PAKUAN UNTUK ISLAM

(Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680) (Bagian Kesepuluh)

**Nicko Pandawa**

**K**epada masyarakat Pakuan Pajajaran yang diwakili Ki Jong Jo, mualaf Sunda yang mengepalai pasukan Banten dari kaum ajar, Maulânâ Yûsuf memperlakukan mereka dengan sangat baik: Berkata Jong Jo, “Iya, ini rakyat hamba Tuan. (Ini) kami semua.”

Lalu Kanjeng Panembahan berkata pada waktu itu, “Ya, merdekalah (kamu), beserta semua rakyatmu. (Jika) sudah beres tidak ada yang dibicarakan, saya akan pulang. Semua punggawa di Pakuan itu, baik-baiklah menjalankan agama Islam, saya akan ke Pakuwati.” (*Mangka katur pun Jong Jo inggih punika, rayat kawula gusti, kawula sadaya, mangka Jeng Panembahan, ngandika ing mangsya iki, iya mardika, sarayatira sami / lan wus rapih orang kang wiwicara, lan isun arep mulih, sakehing ponggawa, ing Pakuan punika, den becik padha den netepi, agama Islam, isun ming Pakuwati*).<sup>1</sup>

Ada juga sebagian warga dan prajurit Pakuan yang menolak memeluk Islam. Sebagian kalangan percaya bahwa mereka menjadi nenek moyang (karuhun) kaum Baduy di Banten Selatan. Meski begitu, orang-orang Baduy menolak bahwa mereka keturunan Padjadjaran. Seorang kokolot Baduy yang diwawancara tahun 1988 mengungkapkan, “Baduy bukan orang Padjadjaran. Tidak juga dekat. Pu’un (tetua orang Baduy) bermusuhan dengan mereka. Karena itu ia menolaknya.” (*Baduy lain urang Pajajaran,*

*deukeut mah henteu, Puun mah ngamusuhan, kusabab kitu boga panolakna*).

Floklor Sunda pada umumnya juga menyatakan bahwa orang Padjadjaran *ngahyang* (menghilang, jadi *hyang*) atau menjadi *pramunggu* (makhluk halus).<sup>2</sup>

Entah pendapat mana yang benar. Namun, kita sama-sama tahu kalau orang Baduy juga menolak Islam dan berpegang pada kepercayaan Sunda Wiwitan. Meski begitu, mereka tetap digolongkan sebagai warga Kesultanan Banten. Sebagai perlindungan Islam kepada orang kafir yang berada dalam naungan negara (*kâfir dzimmî*), mereka dikenai kewajiban membayar *jizyah* atau *kharâj*.

Menilik kepada tradisi yang dijalankan masyarakat Baduy, salah satu tradisi populer mereka adalah *seba*, yaitu tradisi menyerahkan hasil bumi mereka kepada Pemerintah. Tradisi *seba* sudah dijalankan orang Baduy dari masa Kesultanan Banten hingga era Republik saat ini.

Sekarang *seba* diartikan sebagai bentuk silaturahmi antara warga Baduy dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk saling menjaga alam *an sich*.<sup>3</sup> Namun, saya menduga kuat, pada awalnya *seba* adalah bentuk dari *jizyah* atau *kharâj* yang dikenakan oleh Kesultanan Banten kepada warga Padjadjaran yang menolak Islam (entah Baduy keturunan Padjadjaran atau bukan). Syariah ini dijalankan Kesultanan Banten, sebagaimana terlihat dari pertanyaan Sultan ‘Abû’l Mafâkhir ‘Abdul Qâdir atas perkara harta negara kepada seorang mufti Makkah, Syaikh Muhammad ‘Alî ibn ‘Allân ash-Shiddîqî pada tahun 1630-an. Syaikh Ibn ‘Allân menjawab pertanyaan Sultan dalam kitab *Al-Mawâhib ar-Rabbâniyyah ‘ani’l-As’ilah al-Jâwiyyah*, dan menulis:

*Jika seorang penguasa mengambil apa yang dibolehkan Asy-Syâri’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk dirinya; seperti harta zakat, harta fai’ (harta rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran), harta ghanîmah (harta rampasan perang yang diperoleh melalui*

## Tarikh

*pertempuran), harta yang ditelantarkan, harta kharâj; dan dia meminta pertolongan atas itu dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menolong dirinya.*<sup>4</sup>

Banyak yang memandang Kesultanan Banten serupa dengan model negara-kota (*citystate*) yang terbatas administrasinya di kawasan Banten Lama hingga Serang belaka. Padahal ini keliru. Wilayah otoritas Banten terbentang dari Tangerang sampai Tulang Bawang (Lampung) dan dari Pelabuhan Ratu (Sukabumi) sampai Selebar (Bengkulu).<sup>90</sup>

Tentu Pakuan atau Bogor (melingkupi wilayah Kota dan Kabupaten) termasuk di dalam otoritasnya. Hal ini terlihat jelas ketika suatu hari Sultan Abû'l-Mafâkhir mengadakan majelis rutin dengan para pejabatnya untuk membahas tata kelola pemerintahan. Sultan bertanya, "Ki Mas, bagaimana kuatnya negara kita?" Dijawab oleh salah satu Punggawanya, "Semua berjalan baik. Demikian laporan hamba. Mulai dari batas desa Tuan, itu adalah pasukan kita, sampai ke laut selatan semuanya, yang ada di sebelah baratnya, yang di buangan itu, sebelah barat Caringin (Kabupaten Bogor), sampai dengan gunung di sebelah utara."<sup>5</sup>

Pengaturan administratif rakyat Kesultanan Banten dibagi menjadi beberapa golongan:

- Orang Surosowan, rakyat yang tinggal di dalam benteng ibukota Kesultanan.
- Orang tepis wiring, rakyat yang tinggal di luar benteng ibukota Kesultanan.
- Orang pasisir, mereka yang tinggal di area pantai pasisir Utara (kulon) pulau Jawa dalam area Kesultanan.
- Orang desa pesawahan, mereka yang tinggal di area penghasil beras.
- Orang pedukuhan, rakyat kecil yang tinggal di dusun.
- Orang pegunungan, mereka yang tinggal di area pegunungan.<sup>6</sup>

Dari penggolongan di atas, jelas warga Kesultanan Banten yang tinggal di Bogor

digolongkan sebagai orang pegunungan. Mereka dipimpin oleh wakil sultan yang bergelar punggawa atau tumenggung. Tahun 1634, utusan penguasa Banten ke-4, Pangeran Ratu 'Abdul Qâdir, dikirim ke Makkah menemui Sarip Jahed (Syarif Zayd bin Muhsin al-Hâsyimî) selaku gubernur Khilafah 'Utsmaniyah guna meminta gelar "Sultan" kepada Pangeran Ratu, juga untuk meminta jawaban dari beberapa pertanyaan seputar syariah dan tasawuf. Utusan tersebut pulang kembali ke Banten tahun 1638, dan Pangeran Ratu 'Abdul Qadir dianugerahi gelar "Sultan Abû'l-Mafâkhir" berkat otorisasi Khilafah 'Utsmaniyah melalui Syarif Makkah.<sup>7</sup> Salah satu pemimpin orang pegunungan di Bogor, Pangeran Tumenggung Parung, ikut mewakili rakyatnya dalam menyambut penganugerahan tersebut.<sup>8</sup> [Bersambung]

## Catatan Kaki:

- Ibid, Pupuh Durma (no. XXI) bait 16-17, 115. Ibid, 286.
- Judistra Garna, "Kaitan Pajajaran dengan Orang Baduy di Kanekes: Suatu Tinjauan Sosial-Kultural", dalam Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran, 161-162.
- Nandang Rusnandar, "Seba: Puncak Ritual Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten", Patanjala, Vol. 5 No. 1 (Maret, 2013), 92-93.
- Muhammad 'Ali ibn 'Allân ash-Shiddiqî al-Makkî, al-Mawâhib ar-Rabbâniyyah 'ani'l-As'ilah al-Jâwiyyah, ed. Ahmad Ginanjar Sya'ban, (Jakarta: Maktabah at-Turmusiy li't-Turots, 2022), 58-59. <sup>90</sup> Claude Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X – XVII, 155.
- Sajarah Banten, Pupuh Asmaradana (no. XLV) bait 38-39, 217. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 371.
- "Yang Dipertuan di negara Banten ashlah-Allahu mulkahu, yang sudah ditetapkan selama-lamanya dari dulu hingga sekarang, yang sudah umum bagi seluruh Punggawa Lampung Tulang Bawang besar kecil, dan seluruh rakyat kecil, apalagi orang tepis wiring, pasisir, desa pesawahan, pedukuhan, pegunungan, dan lain-lain, itu harus menaati perintah Kanjeng Sultan yang sudah disebutkan dalam Undhang-Undhang." Naskah Undhang Undhang Banten, Cod. LOR 5598, 79. Dikutip dari Dinar Boontharm, The Sultanate of Banten AD 1750-1808: A Social and Cultural History. (Theses: University of Hull, 2003), 209-211.
- Hoesein Djajadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten, 192. Sajarah Banten, Pupuh Asmaradana (no. XXXIX) bait 1-42, 181-188. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 342-346.
- Sajarah Banten, Pupuh Pamargengmangsyah (no. XLI) bait 19, 194. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 352.



Infidyat



Infidyat

- Rencana tersebut disetujui melalui pemungutan suara 33 negara di Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November 1947. 13 negara memberikan suara menentang dan 10 negara abstain. Rencana tersebut, yang ditolak oleh Palestina, tidak pernah dilaksanakan. Inggris menyatakan niatnya untuk mengakhiri mandat di Palestina pada tanggal 15 Mei 1948, tetapi pertempuran dimulai sebelum tanggal tersebut.

- Rakyat Inggris mulai menentang kehadiran Inggris di Palestina akibat tewasnya tentara mereka. Selain itu, Inggris marah atas tekanan AS untuk menerima lebih banyak pengungsi Yahudi. Ini merupakan tanda meningkatnya dukungan Amerika terhadap Zionisme.

- Operasi pasukan militer Yahudi, yang disebut "pembersihan" di desa-desa Arab, dimulai pada bulan Desember 1948. Operasi ini juga merupakan jejak negara teroris Israel.

### Proklamasi Israel - 1948

- Israel adalah negara Yahudi pertama yang didirikan secara ilegal setelah ribuan tahun. Itu dideklarasikan pada pukul 16:00 tanggal 14 Mei 1948 di Tel Aviv. Keputusan tersebut mulai berlaku keesokan harinya, ketika pasukan Inggris terakhir meninggalkan daerah tersebut. Setelah keputusan ini, warga Palestina akan mulai memperingati tanggal 15 Mei sebagai "AlNakba", yaitu hari "Bencana" ...

- Pasukan Yahudi mencapai kemajuan lebih lanjut dengan dukungan militan Irgun dan Lehi; Selain tanah yang dicadangkan untuk negara Yahudi, mereka juga mulai merebut wilayah yang diperuntukkan bagi warga Palestina.

- Militan organisasi Irgun dan Lehi membunuh banyak warga Palestina di desa Deir Yasin dekat Yerusalem pada tanggal 9 April. Berita pembantaian tersebut menyebar dengan cepat, menciptakan teror di kalangan warga Palestina, dan ratusan ribu dari mereka berbondong-bondong ke Lebanon, Mesir, dan wilayah Tepi Barat.



- Tepat satu hari setelah negara Israel dideklarasikan, tentara Yordania, Mesir, Lebanon, Irak dan Suriah mulai menyerang Israel, namun mereka berhasil dipukul mundur. Tentara Israel juga menekan perlawanan di wilayah kecil. Garis gencatan senjata yang dihasilkan membuat sebagian besar wilayah Palestina yang diamankan Inggris berada di tangan Israel.

- Mesir mempertahankan Jalur Gaza. Yordania juga mencaplok tanah di sekitar Yerusalem dan wilayah Tepi Barat. Wilayah ini mencakup 25 persen wilayah mandat Inggris. Situasi ini berlangsung hingga perang tahun 1967

- Pada tanggal 5 Juni 1967, tentara penyerang Israel, Mesir, Yordania dan Suriah dikalahkan dalam 6 hari. Di akhir perang ini, Israel menduduki Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, Gaza, dan gurun Sinai.

### Intifada Pertama: 1987 - 1993

- Intifada Pertama melawan pendudukan Israel dimulai di Gaza; Hal ini segera menyebar ke Tepi Barat. Dengan pemberontakan ini, umat Islam memulai periode pembangkangan sipil terhadap penjajah. Simbol dan makna intifada adalah: Warga Palestina melemparkan batu ke arah tentara Israel yang bersenjata lengkap.

- Perjuangan ini, yang menunjukkan kemungkinan perlawanan terhadap senjata dengan satu batu, menjadi salah satu simbol kemerdekaan. Tentara Israel merespons; Banyak warga Palestina yang menjadi martir. Total korban jiwa dalam protes yang berlangsung hingga tahun 1993 melebihi seribu.



### Intifada Kedua – 2000

- Penarikan pasukan penjajah dari Lebanon pada bulan Mei 2000 memusatkan perhatian pada Yasser Arafat . Presiden AS Bill Clinton dan Ehu Barak terpaksa melakukan perundingan akhir yang bertujuan untuk mencapai hasil dalam semua masalah sekaligus, alihalih melakukan perundingan damai secara bertahap.
- Camp David, kediaman musim panas presiden AS, dipilih untuk pembicaraan ini . Selama dua minggu perundingan, tidak tercapai kesepakatan mengenai status Yerusalem dan hak kembalinya pengungsi Palestina.
- Di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh hal ini, pada tanggal 28 September, sayap kanan Ariel Sharon, pemimpin oposisi Partai Likud setelah Netanyahu, mengunjungi area di mana Masjid al-Aqsa berada.
- Ini merupakan tindakan yang sangat provokatif . Warga Palestina memulai demonstrasi untuk memprotes kunjungannya ini. Demonstrasi tersebut berubah menjadi pemberontakan yang dikenal dengan nama intifada Al-Aqsa .

### Pendudukan kembali Tepi Barat 2002

- Para penjajah menduduki hampir seluruh Tepi Barat pada bulan Maret dan Juni 2002 . Sepanjang tahun 2002, kota-kota Palestina sering digerebek, terputus satu sama lain, dikepung, atau diberlakukan jam malam dalam jangka waktu lama.
- Sebuah laporan yang disiapkan oleh PBB mengenai masalah ini menyalahkan kedua belah pihak atas "insiden kekerasan yang membahayakan warga sipil" namun menyimpulkan bahwa tidak ada pembantaian.
- Amnesty International memutuskan bahwa tentara Israel melakukan kejahatan perang dalam operasi yang dilakukan terhadap Jenin dan Nablus di Tepi Barat. "Quad", yang terdiri dari PBB, Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa, sedang bekerja pada "jalur" Dia mencoba menghidupkan kembali proses tersebut dengan menuju solusi di Timur Tengah.



### Pernyataan AS tentang Yerusalem - 6 Desember 2017

- Presiden AS Trump menyatakan bahwa mereka mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tanggal 6 Desember 2017 , dan mengumumkan bahwa mereka memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
- Segera setelah pernyataan ini, Yerusalem mulai melakukan mobilisasi kembali. Perintah penahanan dan praktik kekerasan yang dilakukan polisi Israel, yang menyerang anak-anak, orang tua, dan wanita, kembali memanas. Umat Islam bersuara untuk memulai intifada baru.

### 7 Oktober 2023

- Banjir Al-Aqsa yang dimulai pada tanggal 7 Oktober dinyatakan oleh HAMAS : Hal ini telah dijelaskan selama bertahun-tahun sebagai "langkah penting dan reaksi alami untuk melawan rencana Israel untuk melkuidasi perjuangan Palestina, merampas dan melakukan Yudaisasi terhadap tanah tersebut, dan membangun dominasi penuh atas Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci."